

BOOK CHAPTER

KOMUNIKASI POLITIK ISLAM

**AHMAD SAMPURNA
RAHMI FITRA ULWANI SIAHAAN
HOTNA SARI
IRYUHA TANTAWI
IDAWATI**

**MHD. FITRIUS
ZULFAHMI
UMAR ABDUR RAHIM SM
SHAHIRMAN
SAIDI**



AHLIMEDIA

Penerbit:

AHLIMEDIA PRESS

BOOK CHAPTER

KOMUNIKASI POLITIK ISLAM

Penulis:

Ahmad Sampurna
Rahmi Fitra Ulwani Siahaan
Hotna Sari
Iryuha Tantawi
Idawati

MHD. Fitrius
Zulfahmi
Umar Abdur Rahim SM
Shahirman
Saidi

Editor:

Katimin
H. Hasrat Efendi Samosir

Penyunting:

Masyrifatul Khairiyah

Desain Cover:

Aditya Rendy T.

Penerbit:

Ahlimedia Press (Anggota IKAPI: 264/JTI/2020)
Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36
Kota Malang 65138
Telp: +62812-4125-7171
Telp Penulis: -
www.ahlimediapress.com

QRCBN: 62-155-8333-637

Cetakan Pertama, Maret 2023

Hak cipta oleh Penulis dan Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 72. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jumlah buku yang berjudul *Komunikasi Politik Islam* bisa diselesaikan. Buku ini merupakan kumpulan tugas mata kuliah Komunikasi Politik Islam, Mahasiswa Program Doktorat Komunikasi Penyiaran Islam. Dengan berkembangnya keilmuan komunikasi, maka dengan demikian salah satu yang spontan ikut mengalami perkembangan itu adalah komunikasi politik. Saat ini juga mulai bermunculan istilah komunikasi politik Islam dalam Ilmu Komunikasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Setiap profesi dalam kehidupan di dunia ini sangat membutuhkan komunikasi sehingga Ilmu Komunikasi itu setiap hari mengalami perkembangan. Tanpa komunikasi, hidup tidak berarti sebuah kehidupan. Tujuan penulisan buku ini untuk memenuhi permintaan atas minimnya referensi buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah ini sehingga muncul ide untuk mengumpulkan tulisan-tulisan dalam bentuk tugas mata kuliah untuk dijadikan sebuah buku. Tulisan ini memiliki keunikan, di mana ingin melihat bagaimana politik Islam sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Komunikasi politik Islam yang dibahas dalam buku ini mencakup: Konsepsi Komunikasi Politik Islam, Prinsip-prinsip Politik dalam Al-Qur'an–Hadits, Praktik Politik Islam pada Masa Nabi dan Khulafaurasyidin, Praktik Komunikasi Politik Islam pasca Khulafaurasyidin, Timbulnya Aliran-aliran Politik Partai Politik dalam Islam, Kepemimpinan dan Corak Komunikasi Politik Khulafaurasyidin, Hubungan Islam dan Negara dalam Sejarah Islam, Corak Politik

Sunni dan Syi'i, Partisipasi Politik, Sosialisasi, dan Etika Politik Islam, Komunikasi Partai Politik Islam, dan Nasionalis di Indonesia pada Masa Orde Baru. Selanjutnya, terima kasih kepada seluruh penulis, rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi S3 Program Doktorat Komunikasi Penyiaran Islam yang sudah menyumbangkan karyanya untuk menambah referensi di Bidang Komunikasi Politik Islam. Semoga karya ini selalu menebarkan manfaat bagi akademisi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEPSI KOMUNIKASI POLITIK ISLAM	
(Ahmad Sampurna)	1
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP POLITIK DALAM AL-QUR'AN-HADITS	
(MHD. Fitrius)	20
BAB 3 PRAKTIK POLITIK ISLAM PADA MASA NABI DAN	
KHULAFAU RRASYIDIN	
(Rahmi Fitra Ulwani Siahaan).....	37
BAB 4 PRAKTIK KOMUNIKASI POLITIK ISLAM PASCA	
KHULAFAU RASYIDIN	
(Zulfahmi)	55
BAB 5 TIMBULNYA ALIRAN-ALIRAN POLITIK/PARTAI POLITIK	
DALAM ISLAM	
(Hotna Sari)	69
BAB 6 KEPEMIMPINAN DAN CORAK KOMUNIKASI POLITIK	
KHULAFAU RRASYIDIN	
(Umar Abdur Rahim SM)	86
BAB 7 HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM SEJARAH	
ISLAM	
(Iryuha Tantawi).....	108
BAB 8 CORAK POLITIK SUNNI DAN SYI'I	
(Shahirman).....	125

**BAB 9 PARTISIPASI POLITIK, SOSIALISASI, DAN ETIKA POLITIK
ISLAM**

(Idawati) 142

**BAB 10. KOMUNIKASI PARTAI POLITIK ISLAM DAN NASIONALIS
DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU**

(Saidi) 162

BAB 1
KONSEPSI KOMUNIKASI POLITIK ISLAM
Oleh: Ahmad Sampurna

Komunikasi politik sebagai salah bidang kajian komunikasi, selalu menjadi fenomena yang senantiasa aktual untuk didiskusikan, terlebih di tahun politik seperti sekarang ini. Dewasa ini, politik menjadi hal yang ramai dibicarakan, bahkan tidak hanya oleh para politisi, akademisi maupun pengamat saja tetapi kini telah merambah masyarakat umum yang awam politik. Keberadaan komunikasi politik sudah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi. Tetapi sebagai telaah ilmu, perkembangannya sebagai subdisiplin ilmu yang berakar dalam revolusi ilmu sosial sejak tujuh puluh tahun yang lalu. Alwi Dahlan mengutarakan bahwa komunikasi politik mulai berkembang dalam bentuk awal dalam kandungan ilmu politik sesudah perang Dunia I, meskipun belum memakai penamaan tersebut. Hal itu terlihat dari studi mengenai pendapat umum, propaganda, dan perang urat saraf, serta berkembangnya teori media kritis sebagai bagian dari ilmu politik Arifin, A. (2011).

Ilmuwan Komunikasi A. Muis menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai obyek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik, tetapi pada hakikatnya adalah komunikasi politik. Sedangkan McNair memaparkan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan

untuk mencapai tujuan politik tertentu. Kemudian Graber memandang bahwa komunikasi politik adalah proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan atau aturan, struktur, dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Adapun menurut Susanto mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama. Sedangkan menurut Kantaprawira, komunikasi politik berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup di masyarakat, baik pikiran intra golongan, institut, asosiasi, maupun sector kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah Muhtadi, A. S. (2008). Adapun perihal mengenai pemasaran politik di Indonesia mulai banyak dibicarakan, mulai dari skripsi maupun buku tentang marketing politik yang mulai bermunculan. Dalam buku marketing politik tertulis tujuan dari marketing dalam politik menurut Firmanzah adalah membantu partai politik untuk menjadi lebih baik dalam mengenal masyarakat yang diwakili atau yang menjadi target, kemudian mengembangkan program kerja atau isu politik yang sesuai dengan aspirasi mereka dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat Firmanzah, M. P. (2007).

Pemasaran politik berarti mengaplikasikan prosedur yang sama dari ilmu pemasaran ke dalam pangsa pasar politik di mana para kandidat, lembaga pemerintah dan partai politik

menggunakan ilmu pemasaran tersebut untuk mengendalikan opini masyarakat sesuai arah yang diinginkan Kaid, L. L. (Ed.). (2004). Delapan Prinsip yang sama dilakukan dan diterapkan oleh pasar komersial dan pasar politik adalah perusahaan yang sukses memiliki orientasi pasar dan secara terus-menerus menaikkan standar produk bagi konsumen, atau bisa dikatakan seorang pebisnis harus mengantisipasi kebutuhan konsumen mereka dan tetap mengembangkan inovasi dan pelayanan demi kepuasan konsumen mereka, demikian halnya para politikus yang memiliki orientasi yang hampir sama dan secara berkesinambungan mencoba menciptakan nilai-nilai baru untuk para konstituen mereka dengan cara meningkatkan kualitas kehidupan dan dapat memanfaatkan biaya yang kecil dengan hasil maksimum. Definisi konsep marketing politik pada awalnya mengacu pada 4 (empat) hal, sebagai berikut: a. Menekankan politikal marketing pada proses transaksi yang terjadi antara pemilih dan terpilih. b. Memandang penggunaan marketing mix untuk mempromosikan partai-partai politik. c. Menyatakan politikal marketing perlu memperhatikan proses positioning. d. Marketing politik dianggap perlu menitik beratkan pada penggunaan riset opini dan analisis lingkungan. Kutipan dari Lynda Lee Kaid menyebutkan sedikitnya ada 3 (tiga) persamaan kuat antara pasar politik dan pasar bisnis: a. Keduanya menggunakan strategi serta alat-alat yang digunakan dalam marketing, seperti penelitian pasar, segmentasi pasar, positioning serta pengembangan strategi. b. Pemilih dalam

politik dapat dianalisa sebagai konsumen dalam ilmu pemasaran politik yang menggunakan teori dalam pemasaran tentang perilaku konsumen dalam pasar komersial. c. Keduanya berhubungan dengan pasar kompetisi dan keduanya juga menggunakan pendekatan yang hampir sama untuk meraih kemenangan. Marketing juga dapat memberikan inspirasi sebuah partai politik tentang cara membuat suatu produk politik berupa isu atau program kerja tertentu berdasarkan masalah yang dihadapi masyarakat. Contoh: partai Gerindra yang mencoba meraup rakyat kelas bawah dengan iklan politik di TV yang menggunakan background pedesaan atau orang desa, kemudian penempatan simbol di kendaraan, baju maupun di layar sebuah kapal.

Berangkat dari gambaran awal tentang makna atau hakikat komunikasi politik di atas, maka persoalannya kemudian adalah tentang bagaimana konsepsi komunikasi politik bila ditinjau dari sudut agama Islam? Apa makna atau hakikat dari komunikasi politik Islam? Apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup komunikasi politik Islam? Istilah-istilah apa saja yang menjadi pusat diskursus dalam komunikasi politik Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi pembahasan lebih lanjut dalam makalah ini. Pembahasan akan diakhiri dengan penutup.

Pengertian Komunikasi Politik Islam

Sebelum dibahas pengertian komunikasi politik Islam ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu tentang pengertian

komunikasi dan komunikasi politik, untuk kemudian mendapatkan gambaran tentang pengertian atau makna komunikasi politik Islam.

Kata komunikasi diambil dari Bahasa Latin, “communis” yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata “communis” adalah kata “communico” yang artinya berbagi. Kata komunikasi juga diambil dari Bahasa Inggris dari kata, “communication” atau “communicare” yang berarti membuat sama (*to make common*) Bahfiarti, T. (2012).

Berdasarkan pengertian secara etimologi ini, maka dalam prosesnya jika komunikasi itu dilihat sebagai kata kerja (*verb*) Bahasa Inggris, “communicate”, maka bisa menunjukkan 4 (empat) arti, yaitu: (1) untuk bertukar pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan informasi, (2) untuk membuat tahu, (3) untuk membuat sama, dan (4) untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik. Sedangkan bila dilihat sebagai kata benda (*noun*), “communication”, maka bisa menunjukkan 4 (empat) arti juga, yaitu: (1) pertukaran simbol, pesan-pesan yang sama, dan informasi, (2) proses pertukaran di antara individu-individu melalui simbol-simbol yang sama, (3) seni untuk mengekspresikan gagasan-gagasan, dan (4) ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi. Dengan demikian secara etimologi, kata kunci dari komunikasi itu adalah menuntut adanya kesamaan makna. Jika tidak terbangun kesamaan makna antara komunikator dengan komunikan, maka tujuan

berkomunikasi itu untuk mempengaruhi pendapat dan mengubah perilaku tidak akan tercapai.

Politics, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim dari kata politik atau ilmu politik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Yunani pun mengenal beberapa istilah yang terkait dengan kata politik, seperti *politics* (menyangkut warga negara), *polities* (seorang warga negara), *polis* (kota negara), dan *politeia* (kewargaan). Pengertian leksikal seperti ini mendorong lahirnya penafsiran politik sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi, atau relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik. Penafsiran seperti ini selaras dengan konsepsi seorang antropolog semisal Smith yang menyatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan yang mengarahkan dan menata urusan-urusan publik.

Selain terdapat fungsi administratif pemerintahan, dalam sistem politik juga terjadi penggunaan kekuasaan (*power*) dan perebutan sumber-sumber kekuasaan. Smith sendiri memahami kekuasaan sebagai pengaruh atas pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara terus menerus. Konsep lain yang berkaitan dengan politik adalah otoritas (*authority*), yaitu kekuasaan (formal) yang terlegitimasi.

Politik berasal dari kata “*polis*” yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata “*polis*” ini berkembang menjadi “*politics*” yang artinya kewarganegaraan. Dari kata “*politics*”

menjadi ”*politera*” yang berarti hak-hak kewarganegaraan Sumarno, A. P. (1989).

Komunikasi politik merupakan studi multidisipliner yang melibatkan beberapa cabang ilmu terutama cabang ilmu komunikasi dan ilmu politik. Hal ini bisa dilihat dari kajian komunikasi politik yang secara umum membahas keterkaitan antara proses komunikasi dan proses politik yang berlangsung dalam sebuah sistem politik. Kesulitan yang dialami oleh kebanyakan studi multidisipliner seperti studi komunikasi politik adalah sulitnya menemukan keberimbangan penekanan ataupun perspektif dan penguasaan metodologi lintas ilmu.

Istilah komunikasi politik dalam ilmu politik memang terbilang masih relatif baru, sekalipun obyek kajiannya sudah lama mendapatkan perhatian dalam ilmu politik seperti partisipasi politik, perilaku pemilih, sosialisasi politik, lembaga politik, dan lain-lain. Istilah Komunikasi Politik dalam ilmu politik mulai banyak disebut sejak tahun 1960an ketika Gabriel Almond menerbitkan bukunya “*The Politics of Development Area*”, di mana dia menyebutkan bahwa komunikasi

politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi mengembangkan bidang kajiannya yang beririsan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik.

Sementara itu, komunikasi politik secara sederhana dapat dipahami sebagai Defenisi komunikasi politik yang bersifat

sistematis (lihat Alfian, 1991, Wahyuni 2007) mengasumsikan realitas komunikasi politik sebagai sebuah sistem yang konstan, teratur dan dapat diramalkan misalnya sebagai:

- a. Menurut Ken Goldstein, komunikasi politik dihamai sebagai pertukaran informasi mengenai pelaksanaan kekuasaan.
- b. Menurut Talia Stroud, komunikasi politik adalah interaksi antara elit, media warga Negara mengenai topik-topik yang berkaitan dengan politik.
- c. Menurut Lynn Sanders, komunikasi politik adalah pertukaran gagasan dan pesan, verbal atau visual, secara langsung atau bermedia, dalam suatu ruang public yang dapat diidentifikasi, yang tujuannya dan konsekuensinya adalah mengubah struktur dan produk pemerintahan atau menghindari perubahan tersebut.
- d. Harold D. Lasweel sendiri mengemukakan bahwa komunikasi politik selalu terkait dengan: 1) pertukaran informasi (secara luas mencakup verbal, nonverbal, perilaku, dan sebagainya) dalam mengejar kekuasaan; 2) Transfer informasi apapun mengenai perlombaan atas sumber daya; dan 3) produksi, transmisi dan efek informasi mengenai politik, pendapat politik dan kebijakannya politik.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya komunikasi politik adalah komunikasi yang berlangsung di antara orang per orang atau banyak orang, baik

secara *face to face* maupun dengan menggunakan media, dengan pesan (*message*) yang terkait dengan hal ihwal kekuasaan (*power*), negara, dan kebijakan yang terkait dengan warga negara, *public policy*, dan sebagainya, yang dimasukkan ke dalam kategori politik kekuasaan.

Ruang Lingkup Komunikasi Politik Islam

Sebelum dikemukakan tentang ruang lingkup komunikasi politik, perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu tentang unsur-unsur komunikasi politik. Seperti halnya dengan komunikasi yang lain, komunikasi politik juga memiliki berbagai unsur antara lain yakni:

- a. Komunikator politik. Komunikator tidak menyangkut orang melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung bobot politik, misalnya presiden, anggota DPR, gubernur dan bupati/wali kota.
- b. Pesan politik. Pesan politik ialah pesan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, tersembunyi ataupun terang-terangan baik yang disadari atau tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.
- c. Saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam penyampaian pesan-pesan politik, misalnya media cetak atau media massa.

- d. Sasaran atau Target Politik. Sasaran atau anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum.
- e. Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, di mana nuansa nya akan bermuara pada pemberian suara kepada kandidat dalam pemilihan umum Cangara, H. (2011).

Berdasarkan pendapat Hafied Cangara di atas, maka pada dasarnya ruang lingkup kajian tentang komunikasi politik juga tidak terlepas dari unsure-unsur tersebut. Beberapa pendapat berikut, dapat melengkapi pembahasan tentang ruang lingkup komunikasi politik. Menurut Fagen (1966) ruang lingkup pembahasan komunikasi politik yaitu setiap aktivitas komunikasi yang memuat pertimbangan bersifat politis dalam arti implikasinya bagi sistem politik. Di samping itu, Almond dan Powell (1966) merumuskan ruang lingkup pembahasan komunikasi politik mencakup pada:

- a. Arus informasi yang paling umum dan signifikan dalam sistem politik;
- b. Struktur-struktur yang menampilkan aktivitas-aktivitas komunikasi politik dan dapat diperbandingkan serta dianalisis;

- c. Implikasi penampilan fungsi komunikasi terhadap fungsi-fungsi politik; dan
 - d. Analisis terhadap penyampaian fungsi komunikasi oleh berbagai struktur dan dengan berbagai macam cara. Juga dapat mengemukakan masalah endemik yang dihadapi oleh bermacam-macam sistem dalam memelihara dan mempertahankan tingkat penampilan yang bersifat publik
- Novel, A. (1999).**

Selanjutnya, Lasswell memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: *pertama*, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan *kedua*, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu **Varma, S. P. (1995).**

Lain lagi dengan satu pemikiran lainnya dari Kantaprawira bahwa komunikasi politik dapat dilihat dari kegunaannya saja, di mana untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah **Kantaprawira, R. (2021).** Untuk melihat secara lebih utuh kegunaan komunikasi politik, maka McNair memiliki lima fungsi dasar, yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya. Disini media komunikasi memiliki

fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.

- b. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang objektif, yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
- c. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
- d. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Disinilah media bisa berfungsi sebagai anjing penjaga sebagaimana pernah terjadi dalam kasus Nixon sebagai presiden Amerika karena terlibat kasus Watergate.
- e. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa Joffe, P. (2004).

Pembahasan lainnya yang tidak kalah pentingnya sebagai bagian dari ruang lingkup pembahasan komunikasi politik adalah bentuk-bentuk komunikasi politik. Menurut Arifin, terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator politik untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu sebagai berikut:

- a. **Retorika**, berasal dari bahasa Yunani yaitu *Rhetorica*, yang artinya seni berbicara, asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antar personal. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa yaitu berpidato kepada khalayak.
- b. **Agitasi Politik**, berasal dari bahasa Yunani yaitu *Agitare*, yang artinya bergerak atau menggerakkan. Agitasi bertujuan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami.
- c. **Propaganda**, berasal dari bahasa Latin *Propagare*, yang artinya menanamkan tunas suatu tanaman. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar, biasanya dilakukan politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan yang mudah terkena sugesti.

- d. **Public Relations Politics**, merupakan suatu upaya alternatif dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik. *Public Relations Politics* bertujuan untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, profesional atau aktivis (komunikator) dengan khalayak (kader, simpatisan, masyarakat umum).
- e. **Kampanye Politik** adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Kampanye politik merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.
- f. **Lobi Politik**, istilah lobi mengacu pada tempat para tamu menunggu untuk berbincang-bincang di hotel. Dalam lobi politik pengaruh dari pribadi seorang politikus sangat berpengaruh seperti kompetensinya, penguasaan masalah dan karisma. Lobi politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan konsensus.
- g. **Media Massa**, sebagai perluasan panca indra manusia (*sense extention theory*) dan sebagai media pesan dalam hal pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan otoritas, membentuk dan mengubah opini publik atau

dukungan serta citra politik, untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.

Berdasarkan bentuk-bentuk komunikasi politik sebagaimana yang dikutip di atas, maka dapat juga dipahami bahwa komunikasi politik dalam prakteknya sudah sejak zamannya propaganda berkembang, yakni pada masa Perang Dunia II. Jika dilihat prakteknya dalam dunia Islam, maka komunikasi politik Islam sudah dimulai sejak nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah dan membangun fondasi sebagai sebuah *civil society*.

Dalam konteks sejarah Islam, Piagam Madinah diyakini sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara di bawah kekuasaan Nabi Muhammad Saw. Praktek komunikasi politik berlanjut pada masa kekhalifahan (*khilafah rasyidah*), berlanjut ke Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Fatimiyah, hingga ke kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Lintasan sejarah politik Islam dapat dibaca buku Prof. Dr. Katimin, M.Ag. dengan judul Politik Islam Studi tentang Asas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam yang diterbitkan di Depok oleh penerbit Rajawali Press tahun 2019.

Pembahasan mengenai komunikasi politik sebenarnya masih relatif baru, yakni baru pada masa Perang Dunia II, yang dimulai dengan propaganda. Kemudian mencuat kembali pada masa-masa musim kampanye baik pada pemilihan presiden

ataupun legislatif serta kepala daerah. Pada momen-momen tersebut banyak diskursus mengenai politik sektarian, bahkan identitas keagamaan, sehingga perdebatan mengenai politik Islam terus bergulir. Diskursus mengenai politik Islam sudah sangat luas dibahas para pemikir-pemikir Islam, baik di dunia Timur maupun Barat, bahkan perdebatannya sangat panjang, ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang setuju bahwa dalam Islam ada sistem politik, tetapi ada juga yang tidak setuju bahwa Islam memiliki sistem politik.

Praktek komunikasi politik Islam diyakini sejak masa Nabi Muhammad Saw. hingga masa sekarang, khususnya masa-masa kerajaan Islam di Indonesia, tetapi pembahasannya kemudian mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perpolitikan di Indonesia khususnya dan negara-negara Islam pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Novel, A. (1999). Peradaban komunikasi politik: Potret Manusia Indonesia. *Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Arifin, A. (2011). Komunikasi Politik–Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan dan Komunikasi Politik Indonesia. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Joffe, P. (2004). An Introduction to Political Communication, Brian McNair: book review. *Critical Arts: A Journal of South-North Cultural and Media Studies, 18(2), 63-65.*
- Bahfiarti, T. (2012). Buku Ajar Dasar-Dasar Teori Komunikasi. *Universitas Hasanuddin: Makassar.*
- Cangara, H. (2011). Komunikasi politik konsep, teori dan strategi.
- Effendy, Onong Uchjana. (2004). *Ilmu, Teori, Filsafat Komunikasi.* Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Firmanzah, M. P. (2007). Antara Pemahaman dan Realitas. *Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.*

<https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi#Definisi>, diakses
10/09/2021 11.08 WIB

Kaid, L. L. (Ed.). (2004). *Handbook of political communication research*. Routledge.

Kantaprawira, R. (2021). *Sistem Politik Indonesia*.

Katimin. (2109). *Politik Islam Studi tentang Asas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Depok: Rajawali Press.

McNair, Brian. (2003). *An Intruduction to Political Communication*. London: Routledge.

Muhtadi, A. S. (2008). *Komunikasi politik indonesia: dinamika Islam politik pasca-orde baru*. Remaja Rosdakarya.

Ngalimun. (2017). *Ilmu Komunikasi sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: PT Pusaka Baru Press.

Sumarno, A. P. (1989). *Dimensi-dimensi komunikasi Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syam, Nina Winangsih. (2002). *Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi*. Bandung: Unpad.

Varma, S. P. (1995). Teori politik modern.

Widjaya, A.W. (1988). *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*
(Jakarta: Rineka Cipta).

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP POLITIK DALAM AL-QUR'AN-HADITS

Oleh: MHD. Fitrius

Berbicara mengenai prinsip berarti berbicara tentang sesuatu yang sangat fundamen, yang sangat mendasar, yang sangat asasi. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai topik ini sangat penting sebagai kerangka acuan untuk membangun kerangka atau desain pada tahap lebih lanjut.

Kemanapun dan di manapun, ketika bicara tentang Islam, maka dasar utamanya tidak lain adalah Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Kedua hal tersebut menjadi referensi utama setiap tindaklaku dan sikap untuk setiap Muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw. dikemukakan bahwa beliau meninggalkan dua pusaka yang apabila berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat dalam kehidupannya. Artinya bahwa keduanya adalah menjadi sumber *way of life* setiap umat Islam.

Pada dasarnya aspek-aspek Keislaman itu terdiri dari 3 hal, yaitu aspek akidah, ibadah, dan akhlak/mu'amalah. Pada aspek akhlak atau mu'amalah akan terjadi persinggungan antar sesama manusia secara horizontal, di samping tentu ada akhlak kepada Allah Swt. secara vertikal, dan kepada lingkungannya juga secara horizontal dan diagonal.

Pada aspek horizontal, hubungan sesama manusia banyak hal yang menjadi topik pembahasan/diskursus. Tetapi berbicara mengenai hubungan interaksi, maka akan selalu berkaitan

dengan pembahasan tentang komunikasi. Perkembangan keilmuan komunikasi secara terus-menerus mengalami perkembangan yang signifikan. Pun juga mengalami pembedaan yang beragam, tidak terkecuali dalam hal politik. Pembahasan mengenai komunikasi politik meskipun masih baru, akan tetapi prakteknya sudah lama dilakoni oleh umat manusia. Bahkan di dalam dunia Islam, politik Islam diyakini sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. khususnya setelah Nabi Saw hijrah ke Madinah.

Bagaimana politik Islam menurut Alquran dan Hadis Nabi Saw. menjadi topik yang akan dibahas dalam makalah ini. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan politik Islam, dan apa saja prinsip-prinsip yang mendasarinya sesuai dengan Alquran dan Hadis Nabi Saw.? Kedua pertanyaan tersebut akan dielaborasi lebih lanjut dalam makalah ini.

Hakikat Politik Islam

Dalam konstruksi ajaran Islam, persoalan politik termasuk dalam kajian *fiqh siyāsah*. *Fiqh siyāsah* merupakan satu dari sekian banyak disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

Meskipun Alquran tidak secara eksplisit berbicara tentang bagaimana sistem politik itu muncul, akan tetapi ditegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa

kekuasaan politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Pada sisi lain politik juga selalu terkait dengan ruang dan waktu. Hal tersebutpun menandakan bahwa politik itu merupakan budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan Alquran. Dengan demikian penegasannya bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Swt., maka jangan sekali-kali diragukan hal tersebut. Firman Allah:

Artinya: “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” (Q.s. Al-Baqarah/2: 147).

Ditegaskan pula dalam firman Allah Swt.:

Artinya: “(Apa yang telah Kami ceritakan itu), Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.” (Q.s. Ali ‘Imran/3: 60).

Al Qur’an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplentasikan dalam pengembangan sistem politik Islam.

Prinsip-prinsip Politik Islam

Berbagai terminologi yang semakna dengan istilah prinsip tidak selalu harus dipertentangkan, sebab pada dasarnya prinsip atau istilah lainnya seperti asas, dasar-dasar, nilai-nilai, atau *mabādi*’ adalah memiliki fungsi yang sama. Prinsip-prinsip atau istilah lainnya tersebut dimaksudkan dasar pijakan kenapa

sesuatu itu ada/digunakan. Dengan demikian, prinsip-prinsip sesuatu itu menjadi fundamen atau akar yang daripadanya sesuatu itu dibangun maupun dikembangkan.

Sebagai contoh, prinsip-prinsip politik Islam semakna dengan asas politik Islam dalam terminologi yang dikemukakan oleh Katimin, demikian juga Kuntowijoyo lebih cenderung menggunakan kaidah, sedangkan Robert N. Bellah menyebutkan sebagai nilai-nilai dasar. Kendati begitu, masing-masing mereka tidak sama dalam memandang prinsip-prinsip politik Islam. Katimin—yang menyebutkan dengan istilah asas—misalnya, membagi asas politik Islam dalam Alquran ada 5, yaitu: asas amanah, ketaatan, keadilan, musyawarah, dan persamaan (Katimin, 2019: 2-10). Sementara itu, Kuntowijoyo membagi prinsip politik Islam menjadi 7 hal, yaitu prinsip *ta'āruf* (saling mengenal), *syūrā* (musyawarah), *ta'āwun* (kerjasama), *mashlahah* (menguntungkan masyarakat), *'adl* (adil), *taghyīr* (perubahan), dan *muzākarah* (tukar pikiran) (Kuntowijoyo, 1997: 91).

Robert N. Bellah menyimpulkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin Nabi Muhammad Saw. di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan telah menjadi sebuah negara yang modern untuk ukuran zamannya, bahkan jika dibandingkan dengan zaman modern sekarang ini. Ajaran Islam yang terlihat jelas kesamaannya dengan unsur-unsur dasar dalam demokrasi, adalah: *al-'adl* (keadilan), *al-musāwat* (egalitarian), *syūrā* (musyawarah), *al-syūrā* (konsultasi). Semua unsur ini terealisasi

dalam praktik politik kenegaraan awal masa kejayaan Islam (Geovanie, 2013).

Di sisi lainnya, ada juga yang mengemukakan bahwa prinsip-prinsip politik dalam Islam itu terdiri dari prinsip-prinsip keadilan (*al-'adâlah*), kesamaan (*al- musâwah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*) (Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 9, Nomor 2, Desember 2015, h. 315).

Dikutip dari berbagai sumber disebutkan beberapa prinsip-prinsip politik Islam menurut Alquran dan Hadis Nabi Saw. (Afdhal Ilahi, 2013; Dhiauddin, 2001; Suntana, 2010, Kuntowijoyo, 1999; Tahqiq, 2004; Pulungan, 1999), yaitu:

Menurut Alquran, yaitu:

1. Kedudukan Manusia di atas dan Bumi (Q.s. Al-Baqarah/2 ayat 30),
2. Prinsip Manusia Sebagai Umat yang Satu (Q.s. Al-Baqarah/2 ayat 213),
3. Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan (Q.s. An-Nisa'/4 ayat 135);
4. Prinsip Kepemimpinan (Q.s. An-Nisa'/4 ayat 59, As-Syu'ara/26 ayat 150-152),
5. Prinsip Musyawarah (Q.s. Ali Imran/3 ayat 159),
6. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan (Q.s. Ali Imran/3 ayat 103),
7. Prinsip Persamaan (Q.s. Al-Hujurat/49 ayat 13),

8. Prinsip Hidup Bertetangga/Hubungan antar Negara Bertetangga (Q.s. An-Nisa'/4 ayat 2),
9. Prinsip Tolong-Menolong dan Membela yang Lemah (Q.s. Al-Maidah/5 ayat 2, Al-Balad/90 ayat 12-16)
10. Prinsip Perdamaian dan Peperangan/Hubungan Internasional (Q.s. Al-Anfal ayat 61, Al-Baqarah/2 ayat 190),
11. Prinsip Ekonomi dan Perdagangan (Q.s. Al-Baqarah/2 ayat 275, Al-A'raf ayat 85),
12. Prinsip Administrasi dalam Perikatan/Muamalah (Q.s. Al-Baqarah/2 ayat 282),
13. Prinsip Membela Negara (Q.s. At-Taubah ayat 38),
14. Prinsip Hak-Hak Asasi Q.s. Al-Isra' ayat 33 tentang hak hidup, hak atas milik pribadi dan mencari nafkah Q.s. An-Nisa' ayat 29, hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi Q.s. An-Nur ayat 27, hak berpendapat dan berserikat Q.s. An-Nisa' ayat 59, Ali-Imran ayat 104, hubungan kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama Q.s. Al-Baqarah ayat 256, hak persamaan di depan hukum dan membela diri Q.s. An-Nisa' ayat 58, Al-Syura ayat 41, hak kebebasan dari penganiayaan Q.s. Al-A'raf ayat 33, hak kebebasan dari rasa takut Q.s. Al-Maidah ayat 32),
15. Prinsip Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar (Q.s. Ali Imran ayat 110),

16. Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau Pelaksanaan Suatu Urusan (Q.s. Al-Qashash ayat 26).

Menurut Hadis, yaitu:

1. Prinsip Kebutuhan akan Pemimpin, sebagaimana arti Hadis: *“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin”* (HR. Abu Daud) dan hadis: *“Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka bumi ini kecuali ada salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin mereka”*. (HR. Ahmad)
2. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin, sebagaimana dalam hadis: *“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka”*. (Muttafaq ‘Alaih)
3. Prinsip Berhubungan antara Pemimpin dan yang Dipimpin Berdasarkan Persaudaraan Saling Mencintai, sebagaimana dalam hadis: *“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendo’akan kamu dan kamu mendo’akan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka*

membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.” (HR. Ahmad)

4. Prinsip Keta’atan, sebagaimana dalam hadis: *“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mena’ati perintah baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia perintah untuk melakukan maksiat”*. (HR. Bukhori)
5. Pemimpin yang Tidak Konsisten dan Tidak Bertanggung jawab, sebagaimana dalam hadis: *“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya, barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka itu dan membantu kezaliman mereka, maka ia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya”*. (Hadits yang bersumber dari Abu Hurairah)
6. Prinsip Tolong-Menolong oleh yang Kuat atas yang Lemah dan yang Kaya atas yang Miskin, sebagaimana dalam hadis: *“Barangsiapa memiliki kelebihan berupa kemampuan maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memiliki kemampuan dan barang siapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikan kelebihannya itu kepada orang yang kekurangan bekal”*. (HR. Abu Daud)
7. Prinsip Kebebasan Pendapat, sebagaimana dalam hadis: *“Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak*

mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan lisan maka dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-lemah iman". (HR. Ahmad)

8. Prinsip Persamaan di depan Hukum, sebagaimana hadis: *"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi ALLAH, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya*". (HR. Ahmad)
9. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara atau Pelaksana Suatu Urusan, sebagaimana hadis: *"Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintahan, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka aka berat bagimu mempertanggungjawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada permintaan dari maka kamu akan mendapat kekuatan melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan suatu sumpah, kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu maka serahkanlah ia kepada orang itu lepaskan sumpah jabatanmu*". (HR. Ahmad)
10. Prinsip Musyawarah, sebagaimana hadis: *"Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah*". (Dikutip oleh Muhammad Jalal Syaraf

dan Ali Abd. Al-Mu'thi Muhammad, *Al-Fikr Al-Siyasi fi Al-Islam*).

11. Prinsip Persaudaraan, sebagaimana hadis: “*Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba ALLAH yang bersaudara.* (HR. Bukhari), dan hadis: “*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain*”. (HR. Muslim).

Kuntowijoyo sebagai salah satu intelektual muslim Indonesia melihat hubungan politik dengan Islam berjalan searah atau memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Setiap mekanisme pengambilan keputusan dalam demokrasi harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang diinstitusionalisasikan dalam dewan perwakilan rakyat. Menurut Fahmi Humaydi, orang yang benar-benar memahami substansi demokrasi akan menemukan bahwa substansi tersebut terdapat dalam konsep Islam (Masdar, 1999: 16). Pada pemikiran politik Islam tidak ada pemisahan antara agama dengan negara, politik dengan moral. Semua teori politik yang lahir diangkat dari suatu asumsi bahwa pemerintahan Islam dapat eksis dengan kontrak ketuhanan yang didasarkan pada syari'ah (Masdar, 1999: 39).

Demokrasi pemikiran Islam di Indonesia terbagi dua, yaitu pemikiran Islam tradisionalisme dan pemikiran Islam modernisme. Kemungkinan besar, Kuntowijoyo termasuk dalam kelompok pemikiran politik Islam yang tradisional. Kuntowijoyo tidak pernah terlibat dalam dunia politik praktis,

tapi ide pokok pemikiran politiknya menyatakan Islam dan politik sebuah bangunan yang menyatu. Demokrasi yang sebenarnya bukan hanya sebatas sebuah pemikiran khayalan, tapi harus dilaksanakan dalam praktek kenegaraan. Pandangan ini cenderung memperlihatkan, bahwa pemikiran Kuntowijoyo banyak dipengaruhi oleh kisah kehidupan bernegara dimasa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin. Tidak pernah ada versi demokrasi yang khusus dalam Islam, tetapi nilai dan prinsip Islam mendukung gagasan universal tentang demokrasi.

Hubungan nilai-nilai demokrasi dalam agama Islam dapat dilihat dari kesamaan unsur-unsur demokrasi dengan ajaran Islam. Al-Maududi—salah satu tokoh pemikir Islam—menolak teori demokrasi yang ditawarkan Barat. Konsep dasar demokrasi yang ditawarkan oleh Maududi menyatakan kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan, sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana perintah Tuhan di dunia. Penolakan dan pemikiran Maududi tentang konsep demokrasi yang sebenarnya didasari dari pemahamannya tentang ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa otoritas dan souverenitas tertinggi ada pada Tuhan. Selain itu, konsep demokrasi yang dipraktekan oleh sebagian besar negara modern dianggap gagal menciptakan keadilan sosio-ekonomi, keadilan sosio-politik dan keadilan hukum. Jurang pemisah antara lapisan kaya dan lapisan miskin semakin melebar dan memberikan perbedaan yang mencolok. *Rule of Law* terlihat hanya sebatas slogan kosong tanpa ada pelaksanaan dalam dunia nyata. Pemerintahan yang demokrasi

menurut Maududi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh seluruh masyarakat muslim atau rakyat itu sendiri, bukan dikuasai oleh kaum agamawan tertentu atau kaum ulama (Al-Maududi, 1993: 19-22). Konsep pemikiran Kuntowijoyo tentang demokrasi terlihat jelas banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Maududi. Tulisan Kuntowijoyo dalam buku *Identitas Politik Ummat Islam*, banyak mengulas konsep negara demokrasi yang ditawarkan oleh al-Maududi.

Berdasarkan pemahamannya tentang konsep demokrasi yang diinginkan Islam, Kuntowijoyo mencoba membaginya dalam 3 subtansi masyarakat yang demokratis. (1). Hak politik (Demokrasi politik, mengenai hubungan negara dengan masyarakat), (2). Hak sipil (Demokrasi sosial-ekonomi, mengenai hubungan elite dengan masyarakat banyak), (3). Hak aktualisasi diri (Demokrasi budaya dan agama, mengenai hubungan negara dengan warga negara) (Kuntowijoyo, 1997).

Pada prinsipnya para tokoh Islam dalam memahami Alquran dan Hadis Nabi Saw. terkait dengan politik Islam ditandai dengan pendekatan-pendekatan 'tekstual' dan 'skriptural' (literal) di satu sisi, dan di sisi lain dengan pendekatan 'rasional' dan 'kontekstual' (liberal) (Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 9, Nomor 2, Desember 2015, h. 311-314). Berdasarkan hal tersebut, maka setidaknya memunculkan tiga paradigma dalam pemikiran politik Islam, yaitu: *Pertama*, paradigma Integralistik. Anggapannya adalah bahwa agama dan negara tidak dapat

dipisahkan (*integrated*). Islam adalah *din wa dawlah*. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Antara keduanya merupakan totalitas utuh dan tidak dapat dipisahkan. Para penganut paradigma ini adalah Khurshid Ahmad, Muhammad Asad, Muhammad Husayn Fadhlallah, Sayyid Quthb (1906-1966), Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979), dan Hasan Turabi.

Kedua, Paradigma Substantif. Anggapannya bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berbiak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral. Paradigma ini juga memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh *ummah*. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Alquran yang seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa Alquran bukanlah buku tentang ilmu politik. Meskipun demikian, mereka tetap mengakui bahwa Alquran mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang kemudian menjadi landasan bagi aktivitas sosial dan

politik umat manusia. Para pendukung pemikiran ini, di antaranya adalah Mohamad Husayn Haykal (1888-1956), Muhammad Abduh (1849-1905), Fazlurrahman (1919-1988), dan Qamaruddin Khan.

Ketiga, Paradigma Sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya; integralistik dan substantif. Sebagai gantinya, diajukanlah konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata. Dengan perkataan lain, aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak bertali temali dengan urusan kenegaraan. Para pemikir politik yang masuk dalam kategori paradigma ketiga adalah Ali Abdurraziq (1888-1966), Thaha Husein (1889-1973), Ahmad Luthfi Sayyid (1872-1963), kemudian disusul belakangan oleh Muhammad Sa'id al-Asymawi (Mesir, lahir 1932).

Penulis sendiri berkesimpulan bahwa meskipun sumber-sumber utama ajaran Islam, yakni Alquran dan Hadis tidak mengemukakan secara terperinci tidak mengemukakan sistem politik Islam, tetapi pada dasarnya nilai-nilai politik yang dibutuhkan untuk membangun keharmonisan hubungan kepada Allah, manusia dan lingkungan telah diatur secara konkret. Bukankah esensi politik adalah untuk menjaga keseimbangan

dan keharmonisan hubungan-hubungan tersebut? Pun dalam sejarah panjang umat Islam ditawarkan berbagai macam sistem politik, dan pada kenyataannya mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masanya. Artinya bahwa sistem politik Islam memang tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis, tetapi prinsip-prinsip dan bahkan prakteknya dalam sejarah Islam menandakan bahwa ia tidak boleh lepas dari kekuasaan politik itu sendiri. Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Dhiauddin. (2001). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres.

Geovanie, J. (2013). *Civil Religion: Dimensi Sosial Politik Islam*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Huwaydi, Fahmi. (1996). *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, Isu-isu Besar Politik Islam*. Bandung: Mizan.

Kasdi, Abdurrahman. "Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Volume 9, Nomor 2, Desember 2015.

Katimin. (2109). *Politik Islam Studi tentang Asas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Depok: Rajawali Press.

Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.

Masdar, Umaruddin (et al.). (1999). *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: LkiS.

Al-Maududi, Abu A'la. (1993). *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan.

Pulungan, Sayuthi. (1999). *Fiqih Siyasah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suntana, Ija. (2010). *Kapita Selekta Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Tahqiq, Nanang. (2004). *Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media.

BAB 3
PRAKTIK POLITIK ISLAM PADA MASA NABI
DAN KHULAFARRASYIDIN
Oleh: Rahmi Fitra Ulwani Siahaan

Islam sebagai suatu agama yang memiliki landasan hukum Alquran dan hadits juga merupakan agama yang tak terlepas dari interaksi negara yang merupakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* pada realitanya merupakan sosok pemimpin yang benar-benar mampu menjadi pemimpin agama dan pemimpin negara.

Berbincang tentang perkembangan Islam saat ini tentu kita tidak bisa mengingkari sejarah yang merupakan bagian dari proses awal munculnya peradaban Islam di masa lampau. Mengetahui sejarah menjadi salah satu cara penting untuk menyingkap tentang bagaimana esensi dan eksistensi Islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Sehingga kemudian hal itu menggiring kita kepada wawasan dan pemahaman baru sebagai bahan perbandingan serta relevansinya terhadap keadaan Islam dalam konteks era ini. (Bahri, 2011)

Arti penting politik dalam sejarah Islam dilukiskan oleh Muh Kurdi Ali dalam bukunya *Aqwaluna wa Af'aluna* (teori dan praktek-prektek) bahwa kebutuhan umat dan bangsa akan politik sama dengan kebutuhan manusia akan air dan udara. Dilihat dari perjalanan sejarah Islam, politik Islam sudah dimulai pada masa

Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Rasulullah memulai tahapan kepemimpinannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, di mana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan “masyarakat Islam”.

Politik Islam pada Masa Nabi Muhammad Saw

Kekuasaan dalam politik Islam diketahui bahwa pandangan Islam tidak hanya sebatas kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau biasa disebut siyasah adalah cara untuk mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ia muncul dalam dunia publik maupun domestik, serta kultural dan struktural, personal maupun komunal. Meski perkembangannya, politik mempunyai penyempitan makna menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan bersifat sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk masa depan yang panjang. Kekuasaan yang sejalan dengan politik Islam ialah kekuasaan yang seperti dicontohkan Rasulullah Saw. Perjalanan sejarah Islam masa Rasulullah sebagai pangkal dari adanya politik dalam Islam, dan akan disusul dengan perkembangan mandatang untuk menyempurnakan langkah hidup umat Islam. Rasulullah telah menyusun langkah hidup bagi masyarakat muslim mempertahankan persatuan dalam bingkai Islam dari beberapa ras dan agama.

Munculnya Nabi Muhammad Saw pada waktu itu, bangsa Arab sedang melewati suatu masa jahiliyah, semua kehidupan Arab terjerumus kedalam kenistaan, penyembahan berhala dan politeisme, dan pelanggaran sosial merupakan tatanan masyarakat pada waktu itu. Nabi Muhammad Saw ketika mulai menyiarkan agama Islam yang beliau terima dari Allah Swt dimekkah, kota ini memiliki sistem kemasyarakatan dibawah pimpinan suku bangsa Quraisy, akhirnya kemudian Nabi bersama sahabatnya hijrah ke Madinah karena tidak betah terhadap kekejaman dan kebencian yang brutal dari orang Quraisy, kemudian Nabi menyalurkan perhatiannya untuk mencari tempat baru untuk kegiatan dakwahnya, di Makkah Nabi telah memperoleh sekelompok pengikut yang sangat sedikit jumlahnya. (Nasution, 1986)

Muhammad sebagai Nabi, tentu dengan segenap keyakinan, kita semua sependapat bahwa Muhammad adalah Nabi sekaligus Rasul Allah yang dipilih atau diangkat langsung oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah agama kepada umat manusia. Sedangkan Muhammad sebagai manusia politik (*zoon politicon*) dalam kajian ini kita asumsikan sebagai manusia yang tidak lepas dari berbagai kepentingan yang ingin diwujudkan, baik keinginan yang berorientasi pada kemuliaan akhirat maupun pada orientasi yang bersifat sosial kemanusiaan yang profan. Praktik politik yang dimaksud dalam kajian ini adalah tindakan politik Muhammad baik pada fase Makkah maupun pada fase Madinah, seperti: *Bai'at Aqabah*, peristiwa

hijrah, dan langkah politik Muhammad sebagai pemimpin politik di Madinah.

1. Bai'at Aqabah; Praktik Politik Nabi Muhammad Pra Hijrah

Pada tahun 621 dan 622 M, Nabi berturut-turut memperoleh dukungan moral dan dukungan politik dari sekelompok orang Arab (suku Aus dan suku Khazraj) kota Yatsrib yang menyatakan diri masuk Islam. Peristiwa ini mempunyai keistimewaan tidak seperti orang Arab Mekkah masuk Islam. Karena disamping mereka menerima Islam sebagai agama mereka, mereka juga membai'at Nabi. Dalam bai'at di tahun 621 M, dikenal dengan Bai'at Aqabah pertama, mereka berikrar bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan menaati Rasulullah dalam segala hal yang benar. Sedangkan pada bai'at tahun 622 M, dikenal dengan *bai'at Aqabah* kedua, mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga mereka dan akan mentaati beliau sebagai pemimpin mereka. Ada dua hal penting dalam peristiwa *bai'at* tersebut: *pertama*, persaksian akan keesaan Allah SWT serta membenarkan ajaran dan kerasulan Muhammad; *kedua*, kesediaan mereka memberikan loyalitas kepada Muhammad Baik sebagai utusan Allah maupun sebagai pemimpin (Sjadzali, 2003).

Demikian peristiwa *bai'at* itu dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu: sudut pandang teologis dan sudut pandang politik. Pengakuan mereka akan ke-Esaan Allah dan kerasulan

Muhammad adalah peristiwa yang bersifat teologis, sedangkan kesediaan mereka untuk loyal kepada Muhammad sebagai pemimpin adalah peristiwa politik, tepatnya apa yang dalam ilmu politik disebut sebagai kontrak sosial, yaitu penyerahan hak-hak kekuasaan kepada Nabi untuk mengatur kehidupan sosial dan politik mereka. Fakta itu menunjukkan bahwa antara Muhammad dan penduduk Yatsrib itu telah terjadi fakta persekutuan, karena kedua pihak mencapai kesepakatan supaya saling menjaga dan melindungi keselamatan bersama. Dalam *bai'at* kedua tergambar pula adanya penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta *bai'at* kepada Nabi yang mereka akui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik disebut dengan kontrak sosial. Peristiwa tersebut mengantarkan umat Islam dari kelompok kecil manusia yang lemah menjadi satu komunitas politik yang kuat di Madinah dibawah komando Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan, dua *bai'at* itu adalah dasar fundamen yang mengantarkan umat Islam menjadi komunitas masyarakat negara. Kedua peristiwa itu dianggap sebagai pondasi pertama bangunan Negara Islam.

2. Hijrah sebagai Praktik Politik Nabi Muhammad

Peristiwa hijrah terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Di mana peristiwa hijrah itu bukan semata-mata atas kehendak Muhammad, catatan sejarah menyatakan peristiwa hijrah itu terjadi karena ada undangan langsung dari para pemuka atau

tokoh-tokoh masyarakat dari Yastrib sesaat setelah mereka melakukan kontrak sosial bai'at di bukit Aqobah.

Peristiwa hijrah itu tidak semata-mata adalah peristiwa dalam rangka menegakkan agama, melainkan peristiwa itu juga bisa dibaca sebagai peristiwa politik. Di mana suatu gerakan sosial yang diupayakan di Mekkah, berbuah negara di Madinah. Singkatnya, Islam pada fase Madinah tidak hanya memanusia melainkan telah berkembang menjadi masyarakat politik atau negara. Islam menjadi identitas bersama sebagai satu kesatuan yang utuh dan sebagai satu komunitas politik. Tepatnya Islam bermetamorfosis menjadi masyarakat politik di Madinah. Di mana di dalamnya ada sistem kekuasaan, juga sistem hukum yang menjadi pegangan setiap warga negara dalam bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan sosial dan politik.

3. Praktik Politik Nabi Muhammad Saw di Madinah; Negara Madinah dan Piagam Madinah

Dari kaca mata sejarah dapat diketahui bahwa, Nabi hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, ada dua aktifitas yang dilakukan sesampainya di Madinah yaitu mendirikan Masjid Quba dan Kota Madinah. Kota madinah atau dikenal juga Yatsrib, sebelum datangnya Islam selalu diwarnai pertikaian dan permusuhan antar golongan dan suku, yaitu suku Aus dan Khazraj. (Pulungan, 2014)

Dengan berakhirnya perang Bu'ats, maka berakhir pula pertikaian antara suku Aus dan Khazraj. Hijrah Nabi

Muhammad merupakan titik balik dari karir beliau terhadap kebangkitan dan kejayaan Islam. Nabi Muhammad mampu memberikan kehidupan yang lebih tentram, damai dan sejahtera dibawah naungan ajaran Islam yang mulia. Tidak lama Nabi menetap di Madinah, atau menurut ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di Madinah beliau memaklumkan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen masyarakat majmuk di Madinah. Piagam itu dikenal sebagai “Piagam Madinah”. Piagam Madinah adalah undang-undang negara yang mengatur kehidupan bernegara dari seluruh komunitas majmuk di Madinah.

Ibnu Ishaq adalah perowi utama dari naskah piagam, beliau memberikan keterangan mengenai piagam madinah, bahwa: “Rasulullah telah menulis suatu “piagam” di antara orang-orang muhajirin dan Anshor yang memuat tentang perjanjian dengan kaum Yahudi, mengakui akan agama mereka dan harta benda mereka”. keterangan ibnu ishaq tersebut mengandung dua unsur penting, yaitu:

- a. Piagam yang tertulis itu adalah mengatur hubungan antara sesama kaum muslimin, antara orang-orang Muhajirin yang datang dari makkah dan juga orang-orang Anshor yang menjadi penduduk asli madinah.
- b. Piagam itu adalah perjanjian antara kaum muslim di satu pihak, dengan kaum Yahudi di pihak lainnya yang

memuat pengakuan dan perlindungan terhadap agama mereka. (HR, 2007)

Tewujudnya Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawanan Muhammad. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun ini di bawah kepemimpinannya. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Anshar, juga suku-suku dikalangan Anshar sendiri. Dikalangan Anshar, Nabi diakui telah merekat kembali hubungan antarsuku yang sebelumnya selalu bermusuhan. (Iqbal, 2007)

Langkah politik tersebut diputuskan Muhammad secara mandiri tanpa ada tuntunan dari wahyu Allah. Akan tetapi tentu Muhammad sangat menyadari bahwa inisiatif tersebut tidak bertentangan dengan wahyu Allah. Oleh karena itu, masyarakat muslim dan non muslim pimpinan Muhammad menerima Piagam Madinah atas dua pertimbangan. Pertama, nilai-nilainya dibenarkan ajaran Islam. Kedua, berfungsi sebagai dokumen politik yang berisi kesepakatan antar berbagai golongan yang ada dalam kota Madinah untuk mewujudkan kesatuan politik bersama.

Politik Islam pada Masa *Khulafaurrasyidin*

Khulafaur Rasyidin ialah berarti para (pemimpin) pengganti Rasulullah SAW. yang arif dan bijaksana. Akan tetapi perlu diketahui bahwa jabatan sebagai khalifah disini bukanlah jabatan warisan turun menurun sebagaimana yang dilakukan oleh para raja Romawi dan Persia, Namun, dipilih secara demokratis. Pada masa khulafaur rasyidin terhitung selama 30 tahun, yang terdiri dari empat khalifah, dalam hal ini sebagaimana berikut:

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq

Tidak ada satupun nash yang “qat’i” atau isyarat yang jelas dari Nabi Muhammad tentang siapa yang menggantikan beliau menjadi khalifah, yang ada hanya perintah Nabi Muhammad kepada Abu Bakr untuk menjadi imam shalat menjelang beliau wafat. Sebagian orang muslim menafsirkan ini isyarat kekhalifahan. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazah beliau dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar telah bermusyawarah dengan cukup alot untuk menentukan orang yang tepat sebagai pemimpin umat Islam. Dengan semangat ukhuwah islamiah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. (Zahroh, 1996)

Proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai Khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin alAbbas, Zubair bin al-Awwam bin al-Ash, Khalid bin Sa’id, Miqdad bin Amir, Salman al-

Farisi, Abu Zar al-Gifari, Amma bin Yasir, Bara bin Azib dan Ubai bin Ka'ab. Telah terjadi pertemuan sebagian kaum muhajirin dan Anshar dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah, mereka bermaksud membai'at Ali dengan anggapan bahwa Ali bin Abi Thalib, lebih patut menjadi Khalifah karena Ali berasal dari bani Hasyim yang berarti Ahlul bait.

Pada masa awal pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar telah dihadapkan pada tiga peristiwa penting yang memerlukan solusi segera. Pertama adalah orang yang murtad, kedua adalah munculnya nabi-nabi palsu dan ketiga, orang yang enggan membayar zakat. Pada masa Abu Bakar banyak digunakan untuk menyelesaikan “Perang Riddah” yang ditimbulkan oleh suku-suku Arab yang menganggap perjanjian yang mereka buat bersama Nabi Muhammad dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. (Supriyadi, 2008)

2. Umar bin Khattab

Umar bin Khatthab (583-644) nama lengkapnya adalah Umar bin Khatthab bin Nufail keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah empat tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad (Amin, 2010). Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian, dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah masuk Islam, Umar mempertaruhkan seluruh sisa hidupnya untuk membela dakwah Rasul. Umar menjadi benteng dan pilar ajaran Islam

yang paling kukuh. Ia menjadi orang kepercayaan Rasulullah sekaligus penasihat utamanya. Umar juga berperan besar bagi perkembangan dan kejayaan Islam di kemudian hari. (Murad, 2007)

Khalifah Umar bin Khatab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggungjawabnya yang luar biasa pada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Dalam banyak hal Umar bin Khatthab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan genius.

Menjelang wafatnya Abu Bakar, beliau memilih dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dan meminta kaum muslimin untuk membai'atnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari instabilitas politik yang besar kemungkinan akan menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan, mengingat pengangkatan khalifah pada zaman Abu Bakr dan juga kondisi muslimin yang baru saja melawan kaum murtad.

Usaha-usaha yang telah dimulai Abu Bakar dilanjutkan pada masa khalifah Umar bin Khattab, yaitu ekspansi ke Damaskus, Bizantium, Suria, Mesir dan Irak. Pada masa ini kekuatan politik sangat kuat sebagaimana pada masa Nabi dan Abu Bakar. Umar menyebutkan dirinya sebagai “*Khalifah Khalifati Rasulillah*” (pengganti dari Rasulullah). Ia memperkenalkan istilah “*Amir Al-Mukminin*” (komandan orang-orang yang beriman).

Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syiria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar bin Khattab mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi negara yang sudah berkembang di Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi delapan propinsi, menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, membentuk kepolisian untuk menjaga keamanan, mendirikan “Bait Al- Mal”, menentukan mata uang dan menetapkan Tahun Hijriah.

3. Usman bin Affan

Utsman bin Affan menjabat sebagai kepala negara selama dua belas tahun. Enam tahun pertama ia begitu cakap menjalankan amanah kekhalfahan. Pemerintahannya cukup stabil. Bahkan sifat Utsman yang lebih lembut dibanding khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab) menjadi daya tarik tersendiri bagi rakyatnya, tidak ada satu pun yang menunjukkan ketidaksukaan terhadapnya. (Supriyadi, 2008)

Pada masa Ustman dibangun kapal-kapal perang sehingga dapat menaklukkan pulau Cyprus pada tahun 28 H yang di pimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Peradaban Islam pada masa Usman bin Affan selain ditandai dengan berbagai kecanggihan teknologi kelautan, armada laut, serta angkatan bersenjata yang handal sehingga dapat mengalahkan kekuatankekuatan besar Bizantium, Romawi, serta Konstantinopel. Peradaban pada masa itu juga ditandai dengan dilakukannya pengumpulan dan penyatuan Al-Qur'an. (Hasan, 2001)

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan ini mulai terlihat perbedaan yang kuat dan tajam. Perbedaan pendapat ini menjadi pemicu terjadinya perpecahan politik dan menjadi prolog terbentuknya madzhab-madzhab politik. Kebijakan-kebijakan politik pada masa Usman bin Affan ini ada beberapa juga yang menambah pemicu pada perbedaaan yang berkelanjutan, antara lain: (1) Usman bin Affan mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah dan menyebar ke berbagai daerah. Penyebaran ini besar pengaruhnya terhadap hukum Islam yang semakin berkembang ketika terjadi pergolakan politik di wilayah-wilayah Islam. Para sahabat ini pada zaman Abu Bakr dan Umar bin Khattab selalu diminta untuk disamping mereka sebagai pertimbangan pendapat pada saat bermusyawarah. (2) Dalam penentuan pegawai dan pengangkatan pejabat cenderung memprioritaskan saudara-saudaranya sehingga menimbulkan ikatan primordial yang tidak

berkembang. (3) Kelemah-lembutan sifat Usman bin Affan terhadap pejabat-pejabatnya yang bertentangan sekali dengan dengan kebijakan Umar bin Khattab yang berbunyi, “Lebih baik saya menyingkirkan pejabat setiap hari dari pada membiarkan mereka berlaku zalim mesti hanya sekejap. (Surabaya, 2011)

4. Ali bin Abi Thalib

Pengukuhan Ali bin Abi Thalib tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah sebelumnya. Kondisi politik yang carut marut membuat masyarakat harus segera mengangkat kepala negara demi menjaga stabilitas. Orang-orang pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk bersedia dibaiat menjadi pengganti Utsman. Alasan para sahabat memilih Ali adalah karena ia termasuk sahabat yang terlebih dulu masuk Islam dan paling dekat dengan Rasulullah.

Baik pemberontak maupun Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Mereka meminta Ali bin Abi Thalib untuk bersedia diba'iat. Namun, Ali bin Abi Thalib menolak. Ia menghendaki agar urusan ini diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior. Setelah umat Islam mengungkapkan untuk segera membutuhkan pemimpin, akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia diba'iat menjadi khalifah. Namun, ada beberapa sahabat senior yang tidak mau ikut memba'iat Ali bin Abi Thalib.

Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak ada masa sedikitpun yang bisa dikatakan stabil. Meskipun tidak

menyetujui pembunuhan Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menunjukkan simpati terhadap pemberontak dan tidak mengambil langkah untuk menghukum orang yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah itu. Abdullah bin Umar tidak sepaham dan meninggalkan Madinah. Muawiyah mengklaim sebagai wali keluarganya, tidak mau mematuhi Ali bin Abi Thalib dan merasa berkewajiban melakukan balas dendam atas kematian itu. Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam melakukan pemberontakan. Sampai pada puncaknya, meletuslah pertempuran antara Ali dan Muawiyah yang disebut Perang Shiffin pada bulan Shafar tahun 37 H. Dari peristiwa ini, umat terpecah menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang setia dengan Ali dan kemudian dinamakan sebagai Syi'ah. *Kedua*, kelompok yang setia kepada Muawiyah. *Ketiga*, kelompok sempalan dari tentara Ali yang kemudian dikenal dengan Khawarij.

Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* pada realitanya merupakan sosok pemimpin yang benar-benar mampu menjadi pemimpin agama dan pemimpin negara. Namun, sepeninggal Nabi Muhammad mengalami perselisihan mengenai pemimpin selanjutnya yaitu antara khulafaurrasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Faktor pendukung lain adalah kemampuan atau kapabilitas pribadi khalifah. Mereka yang terpilih sebagai khalifah secara kultural memiliki kemampuan lebih dalam bidang politik dan agama. Hal ini dilihat dari kedekatan mereka kepada Rasulullah,

sehingga kemampuannya dianggap setara, dan juga latar genealogis mereka yang berasal dari suku yang berpengaruh, yaitu Suku Qurays.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. M. (2010). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bahri, S. (2011). *Peta Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Hasan, H. I. (2001). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- HR, R. (2007). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Murad, M. (2007). *Kisah Hidup Umar Ibn Khattab*. Jakarta: Zaman.
- Nasution, H. (1986). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Pulungan, S. (2014). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: Ombak.

Sjadzali, M. (2003). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Ed. 5*. Jakarta: UI Press.

Supriyadi, D. (2008). *Sejarah Peradapan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Surabaya, T. P. (2011). *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Zahroh, I. M. (1996). *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*. Jakarta: Logos.

BAB 4
PRAKTIK KOMUNIKASI POLITIK ISLAM
PASCA KHULAFATUR RASYIDIN

Oleh: Zulfahmi

Kekuasaan politik Islam pada awalnya ditandai dengan pengembangan wilayah dan penguasaan dakwah, setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Kota Madinah. Kota Madinah menjadi episentrum peradaban dunia saat itu. Peradaban Islam dimulai dari Madinah ketika Nabi Muhammad sukses menyampaikan ajaran Islam melalui pesan-pesan komunikasi politik bernuasa Islam.

Setelah Rasulullah SAW wafat, amanah dakwah berada pada generasi Rasulullah yakni para sahabat yang kemudian dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ajaran Islam tidak mati seiring wafatnya Rasulullah menghadap Sang Khalik. Para sahabat justru mengerahkan segala potensi dan kelebihan yang mereka miliki sebagai pengganti Rasulullah mengembangkan dakwah Islam. Cara sahabat menjalin komunikasi politik setelah Rasulullah wafat tetap memakai cara-cara Rasulullah. Bahkan, penyebaran Islam melalui kekuasaan politik di luar kawasan jazirah Arab semakin meluas sampai ke kawasan Eropah (Wahyu Ilaihi dkk, 79: 2007).

Praktik politik Islam melalui penyampaian komunikasi politik yang santun, ternyata tidak sampai di masa kepemimpinan Ali saja, tetapi sebelumnya juga praktik

komunikasi politik santun juga dipraktikkan pada masa Abu Bakar Siddik, Umar Bin Khattab dan Khalifah Usman Bin Affan.

Secara singkat, penulisan makalah mini ini fokus menampilkan praktik politik Islam pada masa Bani Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Sejak zaman Khulafaur-Rasyidin praktik politik Islam kental melalui penguasaan wilayah dakwah. Pasca Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa Dinasti Muawiyah bin Abu Sufyan, memiliki peran yang cukup strategis. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, setelah Khalifah Usman Bin Affan wafat, kekhalifahan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Namun, Muawiyah menolak membai'at Ali. Sampai terjadilah perang Siffin yang berujung *tahkim* yang membuat banyak pihak kecewa, hingga Ali bin Abi Thalib mati dibunuh. Sehingga jabatan khalifah diberikan kepada putranya yaitu Hasan bin Ali. Karena Hasan bin Ali ingin memadamkan gejolak dan krisis politik, maka jabatan khalifah diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Daulah Bani Umayyah mengambil nama keturunan dari Umayyah Ibnu Abdu Syams Ibnu Abdul Manaf (Hamka, 189-190: 2016).

Setelah kekuasaan Bani Umayyah runtuh, munculnya Dinas Abbsiyah. Dinamakan Dinas Abbasiyah, karena pendiri dan penguasa negeri ini adaah keturunan Al Abbas paman Rasulullah SAW. Dalam kekuasaan dinastinya, praktik politik sangat banyak dilakukan para khalifahnya. Pusat pemerintahan dari dinasti ini berada di Kuffah dan pada akhirnya berada di

Kota Bagdad. Pusat pemerintahan ini sampai runtuhnya kekuasaan politik Islam pada dinasti ini. Dalam catatan sejarah, Dinas Abbasiyah memerintah lebih dari lima abad, yakni dari tahun 132 H–656 H. Pakar sejarah membagi Dinasti Abbasiyyah dalam dua periode penting, yakni ; periode Abbasiyyah I (132 H–447 H) dan periode Abbasiyyah II (447 H–656 H) (Wahyu Ilahi Dkk117-118: 2007).

Penulisan makalah ini secara singkat akan membahas banyak hal terkait Praktik-praktik politik Islam yang terjadi pada dua masa kepemimpinan kekuasaan Islam, yakni kekuasaan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah. Mengurai praktik politik Islam yang terjadi pada dua kepemimpinan kerajaan Islam ini, salah satu cara memotret keberhasilan dakwah para khalifahnya dalam mengomunikasikan Islam dari jalur politik. Praktik-praktik politik Islam yang terjadi pada masa itu, menjadi tolok ukur keberhasilan komunikasi politik Islam di masa lalu.

POLITIK ISLAM

Politik *syar'i* atau dikenal sebutan politik Islam adalah salah satu aspek kajian fikih Islam mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Politik Islam mencakup seluruh hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu pada bidang yang kemudian kita sebut dengan *fikih ibadah*, yakni mencakup hubungan antara manusia dengan pribadinya yang kemudian kita sebut dengan sebutan fiqh halal dan haram. Di sisi lain,

politik Islam juga disebut dengan *alwal syahshiyyah* (hukum tentang kehidupan pribadi) (Yusuf Al-Qhardhawi, 24: 2019).

Menurut Yusuf Al-Qhardhawi, (24: 2019) jika ditelusuri dari sejarah ilmu pengetahuan, komunikasi politik sudah dikenal sejak jaman Aristoteles dan Cicero. Kajian hubungan antara komunikasi dan politik secara sistematis telah dimulai dengan karya-karya kaum Sosid di Yunani dan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam karyanya, “*politics and rethoric*”.

Kajian komunikasi politik di era modern berakar dari ilmu politik, meskipun masuk dalam konteks, serta dipelajari sebagai bagian dari propaganda. Dimulai dari tahun 1922 dengan penelitian dari Ferdinand Tonnies dan Walter Lipmann tentang opini public pada masyarakat, sampai Harold Lasswell menulis disertasi doktoralnya tentang “*Propaganda Technique in the World War*” (1927). Berikat rintisan Lasswell melalui disertasinya tersebut, Wilbur Schramm lalu menempatkan Lasswell sebagai tokoh utama dalam studi komunikasi politik.

Memahami komunikasi seperti yang dijelaskan di atas, menurut Anang Anas Azhar (70: 2017) dapat dipahami bahwa pelaku komunikasi akan melakukan empat tindakan yakni, membentuk, menyampaikan, menerima dan mengolah pesan. Keempat tindakan tersebut, sangat lazim terjadi dalam berkomunikasi dengan sesama makhluk.

Di sisi lain, perkembangan komunikasi mengarah kepada barang seperti surat kabar. Surat kabar mulai berkembang

menjadi kekuatan yang cukup dipertimbangkan. Surat kabar telah mampu memunculkan opini yang dapat memengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan masyarakat. Memasuki abad ke-19, ilmu tentang surat kabar mulai bermunculan di Eropa. Pada era tersebut, ilmu persurat kabaran atau ilmu publisistik sangat menonjol, tetapi istilah ilmu komunikasi masih belum muncul.

Kembali membahas Lasswell, ia adalah murid Charles Merriam, seorang ahli ilmu politik yang menemukan pendekatan *behavioral* (tingkah laku) dalam kajian ilmu politik, yang mengembangkan bidang yang ditekuni gurunya secara lebih luas. Minatnya terhadap propaganda yang didorong oleh aktivitas seputar dua perang dunia yang telah menghasilkan fokus kajian kembar yaitu, motif-motif para komunikator dan simbol-simbol kunci yang menjadi isi pesan. Kedua fokus tersebut, tergabung dalam perhatian para analis yang tertarik mengenai teknik-teknik propaganda. Kontribusi Lasswell juga dapat dilihat dalam bukunya, "*Propaganda and Communication in World History*", yang memuat formulasi yang hingga kini banyak digunakan dalam riset komunikasi massa. Definisi terkenalnya tentang komunikasi adalah "*who, says what, in with channel, to whom, with what effect*" (siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dengan efek apa).

Hampir dapat dipastikan, bahwa praktik praktik komunikasi politik Islam dapat kita temukan dari periode ke periode. Kesuksesan dakwah Islam di Andalusia, sebenarnya

tidak terlepas dari kesuksesan komunikasi politik para sahabat Rasulullah, kemudian ikut mempertahankannya adalah para khalifah yang berada masa masa Dinas Umayyah dan Dinas Abbsiyah. Kajian ini sesungguhnya sangat menarik untuk kita telusuri, terutama jejak rekam para khalifah yang terbilang sukses menjalankan komunikasi politik Islamnya di masa kepemimpinannya.

PRAKTIK KOMUNIKASI POLITIK Islam MASA BANI UMAYYAH

Sebuah keniscayaan, pasca Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Islam seringkali dipandang tidak sesuai lagi dengan syariat Islam. Peristiwa pemberontakan (*bughat*) Wali Syam Mu'awiyah bin Abi Sufyan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang diperangi dalam Perang Siffin, kemudian berlanjut dengan kekisruhan negara pada masa kekhalifahan Ali yang diakhiri dengan terbunuhnya sang Khalifah oleh Kaum Khawarij, menunjukkan betapa jauh tuntunan Rasulullah SAW dalam hal perpolitikan pada masa itu, bahkan masih di masa adanya para Sahabat.

Menurut Taqiyuddin An Nabhani, (23-26: 1007) tercatat, 14 Khalifah pasca Khulafaur Rasyiddin atau yang dikenal dengan masa Kekhalifahan Umayyah konflik politik sering terjadi. Para komunikator politik yang disebut dengan khalifah, justru terjadi praktik-praktik kotor yang mengancurkan dari saudara kepada saudaranya sendiri. Walaupun agak enggan

menyebut dengan nama keluarga Umayyah, dalam masa ini, Namun, fakta yang terjadi adalah pada masa ini Khalifah-khalifah yang dibai'at kebanyakan berasal dari keluarga tersebut.

Lantas bagaimana perjalanan praktik komunikasi politik pada masa Bani Umayyah ? Jika kita telusuri fakta dan literatur sejarah, setidaknya ada beberapa torehan praktik komunikasi politik Islam antara lain.

MUNCULNYA PENYEMPITAN CALON KHALIFAH

Munculnya penyempitan calon-calon yang diajukan sebagai khalifah pengganti khalifah sebelumnya semakin marak. Praktik komunikasi politik seperti ini justru terjadi di masa Dinasti Umayyah dan satu sisi, kondisi ini menjadi menjadi preseden buruk bagi peradaban dunia Islam. Tapi di sisi lain, ini menjadi prestasi yang baik, karena calon khalifah tidak ditetapkan sebebas mungkin. Calon khalifah, harus berasal dari keluarga Umayyah. Inilah yang dikatakan sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, tetapi sejauh mana penyimpangan tersebut. Dalam konteks ini, para khalifah terbilang sukses melakukan komunikasi politik Islam, interaksi para pemegang kekuasaan dan rakyat berjalan dengan baik, meski dalam banyak hal bertentangan dengan keinginan rakyat banyak.

Perluasan kekuasaan Islam pada masa Dinasti Umayyah berjalan singkat. Dalam kekuasaannya selama 90 tahun, wilayah

Islam semakin luas, mulai dari Spanyol, sampai dengan India. Penaklukan militer ini berjalan cepat terutama pada pemerintahan Khalifah Al Walid. Segenap Afrika Utara diduduki dan pada tahun 91 H / 710 M pasukan Muslim menyebrangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol, kemudian menyebrangi Sungai Pyrenees dan menyerang Carolingian Prancis.

Bagi beberapa kalangan luas wilayah Islam pada masa ini adalah yang terluas dibanding dengan masa kekhalifahan lainnya. Perluasan-perluasan berikutnya hanyalah berupa pengembangan dari luas wilayah yang telah ada. Malah pada akhir masa Kekhalifahan Utsmani, wilayahnya semakin menyempit akibat sparatisme dan berkembangnya nation state, sampai akhirnya hilanglah wilayah kekhalifahan Islam pada tahun 1924 (3 Maret), saat diruntuhkannya Kekhalifahan Utsmaniyyah sehingga wilayah Islam terpecah menjadi negeri-negeri Islam, sampai sekarang.

Pada masa dinasti Umayyah, pembangunan fisik terlihat di mana bahkan semakin marak dilakukan. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyiddin, pembangunan terlihat lebih fokus kepada pembangunan ruhul Islam, dalam artian penerapan hukum-hukum Islam di muka bumi. Masa Umayyah pembangunan fisik dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang, hal-hal yang khusus antara lain.

Kehidupan Perpolitikan dan Kemasyarakatan Kehidupan perpolitikan masa kekhalifahan Umayyah tidak begitu jauh

berbeda dengan masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyiddin. Kehadiran Islam di daerah-daerah taklukan Dinas Umayyah, bagaikan hujan yang mengguyur padang yang kering, sehingga menumbuhkan benih-benih tumbuhan yang bersemi. Bila pada masa Khulafaur Rasyiddin kejayaan secara fisik masih belum terlihat, maka mulai Masa Umayyah inilah mulai terlihat hasilnya. Sarjana-sarjana Islam mulai bermunculan, Ilmu Pengetahuan berkembang pesat, pembangunan fisik marak dilakukan. Kota-kota baru dibangun. Inilah karunia Allah. Di mana Islam kemudian menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

Beberapa uraian yang disebutkan di atas, kejayaan Islam di masa Dinasti Umayyah tidak terlepas dari praktik komunikasi politik Islam yang dilakukan para khalifahnyanya. Pesan-pesan politik yang disampaikan terukur dan menjadi titik awal perkembangan dakwah Islam ke kawasan Eropah dan lainnya. Kejayaan Islam ini salah satunya ditunjukkan dengan kesejahteraan yang terjadi. Hemat penulis, ini merupakan salah satu praktik komunikasi politik Islam yang dilakukan para khalifah.

Namun seringkali keberadaan khalifah-khalifah ini dipandang sebelah mata. Kebesaran yang dibangunnya seolah pupus, yang mungkin apabila dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin masa sekarang pun, masih jauh perbandingannya. Mungkin perbuatan Yazid pada Peristiwa Karbala, 10 Muharam, pembantaian Husein RA dan keluarganya memang sepertinya tidak dapat dimaafkan, Namun, Mu'awiyah mungkin bisa dinilai

berbeda. Beliau adalah orang yang sejaman dengan Rasul saw, Khalifah kelima, Politikus ulung, serta penghalau Byzantium di daerah utara Islam. Namun, karena kesalahannya memaksakan anaknya Yazid untuk menjadi khalifah sehingga menerapkan sistem putera mahkota dalam pemerintahan Islam maka seolah pupus kebajikan yang dibuatnya.

Sistem putera mahkota memang merupakan sistem yang mungkar dalam pandangan Islam, serta bertentangan dengan sistem Islam. Karena sesuai dengan pilar pemerintahan Islam, kekuasaan adalah milik ummat, bukan milik khalifah. Walau khalifah hanya merupakan wakil ummat untuk memegang kekuasaan sementara statusnya tetap wakil, maka bagaimana mungkin khalifah bisa menghadiahkan kekuasaannya kepada orang lain. Khalifah Mu'awiyah telah mempraktikkan komunikasi politik Islam (Taqiyuddin An Nabhani, (23-26: 1007).

Praktik komunikasi politik yang dilakukan Mu'awiyah dalam melakukan pergantian Khalifah, justru telah membelokkan pemahaman sebagian umat Islam saat itu mengenai mekanisme pergantian elit. Dari pemilihan secara bebas menjadi pemilihan terbatas (keluarga) atau penunjukkan orang tertentu. Inilah yang menyimpang. Namun, mengenai proses *bai'at* sebagai *thariqah* pengangkatan khalifah tetap dilakukan, dan tetap dilakukan dengan prosedur yang sama sebagaimana masa Khulafaur Rasyiddin.

Praktik dan tradisi komunikasi politik Islam sejak Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin sampai Dinasti Bani Umayyah sudah dilakukan. Bentuk komunikasi politiknya dilakukan melalui kekuasaan. Pesan penguasaan melalui kekuasaan sangat leluasa menyampaikan pesan komunikasi politik, terutama yang sangat berdekatan dengan identitas Islam, symbol-simbol Islam. Kekuasaan juga memberikan celah seluas mungkin agar pengembangan kekuasaan wilayah Islam menyebar di luar kawasan jazirah arab. Fakta yang terjadi justru, penyebaran Islam sampai ke Eropah misalnya, di Andalusia, Cordova. Melalui kekuasaan yang dipegang penguasa Islam, pesan komunikasi politik Islam tersebar luas dan menjadi ikon peradaban dunia yang tidak pernah terlupakan,

Selanjutnya, praktik dan komunikasi politik Islam dilakukan sang komunikator yakni khalifah. Khalifah di masa Dinas Umayyah merupakan juru kunci sebagai komunikator politik. Khalifah yang kuat tauhidnya, memiliki kekuatan dari kekhalifahannya dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi politik. Prilaku dan sikap keteladanan ;pada hampir semua khalifah yang memimpin di masa Dinasti Umayyah menjadi corong utama penyebaran Islam di kawasan Eropah.

Setiap masa manusia ada kelebihan dan kekurangannya, Namun, apabila Islam masih ditegakkan maka itulah hal yang pokok, karena tegaknya syariat Islam di muka bumi adalah suatu keharusan. Dengan kesinambungannya melanjutkan kehidupan Islam sejak ditegakkannya oleh Rasulullah Muhammad saw di

Madinah al Munawarah, kekhilafahan ini meluaskan dakwah Islam sampai ke sepertiga bumi. Di saat bangsa-bangsa lain masih tidur pulas, maka ummat Islam membangun kejayaannya dan membangkitkan manusia serta menjadikan Islam benar-benar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dari sinilah, fakta dan bukti bahwa komunikator politik Islam diterima umat saat itu. Pesan-pesan dakwah yang dikomunikasi berjalan baik dan diterima umat Islam bahkan di luar umat Islam.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bab pendahuluan dan pembahasan dalam uraian makalah mini ini, praktik komunikasi politik Islam pada masa Dinas Umayyah dapat disimpulkan yakni di antaranya ;

Pertama, kekuasaan politik Islam ditandai dengan pengembangan wilayah dan penguasaan dakwah, terutama setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Kota Madinah. Kota Madinah menjadi pusat peradaban Islam dunia. Peradaban Islam dimulai dari Madinah ketika Nabi Muhammad sukses mengembangkan ajaran Islam melalui pesan-pesan komunikasi politik yang bernuasa Islam. Praktik komunikasi politik Islam dilakukan dengan santun. Praktik komunikasi politik juga dilakukan pada masa Khuafur Rasyidin.

Kedua, selain pergantian khalifah, kesuksesan praktik komunikasi politik yang dilakukan pada masa Dinasti Umayyah dalam melakukan komunikasi politik adalah penyempitan pemilihan calon khalifah, sehingga khalifah harus berasal dari kalangan keluarga atau keturunan keluarga saja. Kemudian,

perluasan kekuasaan Islam menyebar di mana-mana bahkan sampai Eropah. Kesuksesan lain adalah maraknya pembangunan fisik di masa Bani Umayyah. Ini dibuktikan perkembangan infrastuktur tumbuh sebagai wujud suksesnya para komunikator politik dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi. Arsitektur gedung megawah menjadi bukti otentik bahwa para khalifah yang berkuasa pada masa itu memiliki kekuatan luar biasa dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi politik Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Wahyu Ilaihi dkk, *Pengantar Sejarah Dakwah*, (Jakarta, Kencana, 2007).

Hamka, *Sejarah Umat Islam, Pra Kenabian Hingga Islam di Nusantara*, (Jakarta, gema Insani, 2016).

Wahyu Ilaihi Dkk, *Sejarah Dakwah Islam*, (Jakarta, Kencana, 2007).

Yusuf Al-Qhardhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Jakarta, Pustaka Al Kaustar, 2019).

Anang Anas Azhar, *Pencitraan Politik Elektoral, Kajian Segi Tiga Politik PAN*, (Yogyakarta, Atab Buku, 2017).

Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam–Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik* (terjemahan), (Al Izzah, Bangil, 1997).

Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam–Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik* (terjemahan), (Al Izzah, Bangil, 1997).

BAB 5
**TIMBULNYA ALIRAN-ALIRAN POLITIK/
PARTAI POLITIK DALAM ISLAM**

Oleh: Hotna Sari

Buku ini membahas tentang Timbulnya aliran-aliran politik /Partai Politik dalam Islam banyaknya aliran pemikiran yang diwarisi generasi umat Islam sampai sekarang baik aliran politik maupun teologis. Sebelum Islam masuk ke kota Mekah, bangsa Arab terdiri dari suku-suku, salah satunya adalah suku Quraisy yang memiliki kedudukan terhormat di antara suku-suku lainnya karena mereka suku yang menjadi pewaris dari nabi Ibrahim dan Ismail bahkan kemuliaan dapat diwariskan dari keturunan tertentu (Abidin, 2006:117-128). Setelah nabi hijrah ke Madinah dalam waktu yang bersamaan Nabi memegang dua jabatan yaitu pemimpin politik dan dan pemimpin agama. Nabi juga berhasil mendirikan sebuah negara yang dikenal dengan Negara Madinah. (Fadli, 2018: 89-106).

Tema politik masih menjadi isu yang menarik dibicarakan pada saat ini apalagi politik Islam. (Fadli, 2018: 89-106). Secara etimologi politik dalam bahasa arabnya disebut “*siyasah*” atau dalam bahasa Inggrisnya “*politics*”. Politik itu sendiri berarti cerdas dan bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan politik sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan

definisi tentang ilmu politik. (Syafie, 1996: 10). Politik secara etimologi adalah pemerintahan, pengambil keputusan, pembuat kebijakan dll. Sedangkan makna istilah, Fiqh siyasah diartikan sebagai berikut, Menurut Ahmad Fathi Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. (Djazuli, 2003: 39).

Sesudah Nabi wafat masalah yang pertama sekali muncul adalah kekosongan pemimpin politik, Nabi tidak meninggalkan pesan dengan jelas dan tegas siapa yang akan menggantikannya. Sebelum Nabi di makamkan para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah merumuskan untuk menjadi pemimpin Negara antara kalangan Anshor dan Muhajirin, pada akhirnya terpilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Penunjukan Abu bakar sebagai pengganti Nabi tidak dibenarkan dari kalangan Keluarga Nabi (*Ahlu bayt*). Bahwa kepemimpinan sudah di tetapkan oleh Nabi Muhammad sebelum wafatnya yakni Ali Bin Abi Thalib dengan mengambil dalil dari hadis Nabi (*man kuntu maulahu fa'aliyyu maulahu*). Ahli Bayt gagal menaikkan Ali menjadi pemimpin kekuasaan sementara yang naik menjadi pemimpin adalah Abu Bakar ini melahirkan perpecahan politik yang serius di internal umat Islam. (Fadli, 2018: 89-106).

Partai politik secara gamlang dimaknai orang banyak sebagai salah satu alat atau transportasi bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menuju dan mendapatkan kekuasaan. Baik kekuasaan dalam bingkai legislative, eksekutif maupun yudikatif, malah sebagian orang juga dapat memanfaatkannya

menjadi arena bisnis kalau tidak mendapatkan kekuasaan. Mengikuti pengertian istilah, partai atau hizb adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama. (Imarah, 1419: 184).

PENGERTIAN POLITIK ISLAM

Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam/syari'ah dikatakan oleh Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan- ketentuan Islam (Hamid, 2003: 16).

Politik Islam merupakan aktivitas Politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok Politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana Politik Model Islam Struktural bisa melalui Islam Politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai.(Nasiwan, 2003:101).

Dengan kata lain bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada. Namun, tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan

kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan ummat.

TIMBULNYA ALIRAN-ALIRAN POLITIK

Munculnya pemikiran politik Islam diawali pada masa Rasulullah sejak mendirikan komunitas Islam di sekitaran Madinah pada tahun 622 M. pada masa tersebut terbilang sebagai awal kebangkitan umat Muslim mampu berinteraksi dengan suku-suku di luar Islam. Sistem pemikiran ini berlangsung hingga Rasulullah wafat dan dilanjutkan pada generasi sahabat-sahabatnya (*khulafa' rosyyidun*) hingga puncaknya dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pasca wafatnya Rasulullah, terjadi saling merebutkan kekuasaan antara satu kelompok dengan yang lain. Menurut Phillip K Hitti, pasca wafatnya Nabi Muhammad saw yaitu (1) Kelompok Muhajirin dan Ansar (disebut kelompok sahabah) dengan argumentasi masing masing, (2) Kelompok legitimis (*Ashab an nash wa ta'yyin*) yang meyakini bahwa Nabi Muhammad saw menunjuk Ali Ibn Abi talib sebagai penggantinya, dan (3) Kelompok aristokrat Qurays yang dimotori oleh Bani Umayyah. Akhirnya kelompok pertamalah yang berhasil menduduki kekhalifahan, yaitu dengan terpilihnya Abu Bakar as Shiddiq. (Hitti, 2005: 32).

Abu Bakar as Siddiq berhasil menjadi khalifah pertama yang berkuasa selama dua tahun (11-13H/632-634M). Keterpilihan Abu Bakar melewati proses musyawarah yang alot, antara kelompok Muhajirin dan Ansar. Majelis Tsaqifah

Bani Sa'adah menjadi saksi atas perdebatan para sahabat senior tentang sistem politik yang akan dijalankan. Perdebatan ini dipicu oleh dua hal. Pertama, tidak adanya kejelasan sistem politik dari Rasulullah sebagai pemegang otoritas keagamaan. Kedua, persaingan kelompok sosial antara Muhajirin dan Ansar yang merasa memiliki hak yang sama atas kepemimpinan umat Islam. Akhir drama politik di Tsaqifah Bani Sa'adah adalah disetujuinya Abu Bakar sebagai khalifah oleh mayoritas umat Islam pada saat itu. Alasan pemilihan Abu Bakar adalah aspek senioritas, loyalitas, dan kapabilitas. Abu Bakar termasuk kelompok as Sabiqun al Awwalun, loyal kepada Rasulullah dalam mendampingi dakwahnya, dan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dalam masalah keislaman. Setelah Abu Bakar Wafat yang menggantikan khalifah adalah Umar Ibn Khattab, Umar memerintah selama 10 tahun (13-23H/634-644M). Penunjukan Umar sebagai khalifah adalah hasil dari keputusan muswarah para sahabat senior di Madinah dan ini tidak bisa dinggap sebagai otoritarianisme Abu Bakar. Umar yang ditunjuk sebagai khalifah untuk menghindari perpecahan dikangan internal Islam itu sendiri. Awal mula timbulnya aliran politik pada masa khalifah Ustman bin Affan (setelah wafatnya), pada masa itu dilatarbelakangi kepentingan kelompok yang melahirkan perselisihan hingga terbunuh Khalifah Ustman. Kemudian, khalifah di gantikan Ali bin Abu Thalib dan perpecahan terus berlanjut. Islam yang mengikuti Ali bin Abu Thalib menamakan dirinya dengan Syi'ah sementara yang

kontra dengan Ali bin Abu Thalib menyebutkan dirinya dengan khawarij. Perpecahan dikalangan umat Islam memuncak kemudian terjadilah peperangan di antara Ali bin Abu Thalib dan Aisyah (perang Jamal), dan peperangan Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah (*Shiffin*). (Rojak dkk, 2001:49-50).

Menurut Abid Al-Jabiri, jauh sebelum persoalan politik tersebut mengemuka, telah terbangun kerangka pemikiran yang memungkinkan terjadinya variasi kelompok politik dan pemikiran di kalangan umat Islam. Situasi krisis politik pasca nabi, hanyalah sebuah momentum yang memantik munculnya perbedaan tersebut, benih dan kerangkanya sudah tersedia sebelumnya. Asumsi Al-Jabiri tersebut bisa dibuktikan bila melihat dinamika aliran teologi dalam Islam pada rentang waktu kemudian, baik syiah maupun sunni yang terus berkembang dari periode ke periode tidak lagi berbentuk sebagai aliran politik an sich, tetapi juga aliran pemikiran yang memiliki corak dan identitas yang berbeda, antara satu sama lainnya. Kalau hanya persoalan politik, pasti keberlangsungannya hanya sementara, hanya sebatas perebutan kepentingan politik. Namun, karena yang memicu munculnya aliran tersebut adalah kerangka pemikiran (paradigma), maka aliran tersebut pun abadi, melampaui konteks krisis politik di Arab pasca kepemimpinan nabi Muhammad saw (Abidin, 2012: 117-128).

ALIRAN-ALIRAN POLITIK DALAM ISLAM

1. Sunni

Sunni dikenal juga dengan istilah Ahli Sunnah Waljamaah adalah satu aliran yang mengklaim mengikuti Sunnah aliran yang mengikuti Rasul dan Para sahabat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa paham Sunni adalah paham yang berpegang teguh pada tradisi salah satu mazhab dari mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dalam bidang fikih; ajaran Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi dalam bidang teologi; ajaran al-Junaid dan al-Ghazali dalam bidang tasawuf. (Abdullah dkk, 2005: 6).

2. Syiah

Syi'ah secara etimologi berarti pengikut, pendukung, pembela, pencinta, yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu. (Shihab, 2007: 763). Ajaran Syiah berawal pada sebutan yang untuk pertama kalinya ditujukan kepada para pengikut Ali (Syiat Ali), pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa hidup Nabi. (Thabathaba'i, 1993: 40). Syiah dalam Bahasa Arab dan Bahasa Persia ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syiah menolak kepemimpinan dari tiga Khalifah Sunni pertama seperti juga Sunni menolak Imam dari Imam Syiah. Bentuk tunggal dari Syiah adalah Syi'i (Bahasa Arab) menunjuk kepada pengikut dari Ahli Bayt dan Imam Ali. (Al-Nemr, 1988: 12).

3. Khawarij

Khawarij adalah aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib kemudian, asySyahraani berpendapat Khawarij adalah orang yang berpaling atau keluar dari pemimpin yang sah secara konstitusional baik dalam pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin atau pemerintahan tabi'in. (Purnama, 2016: 32-213). Mazhab khawarij muncul bersamaan dengan mazhab Syi'ah, masing-masing muncul sebagai sebuah mazhab pada masa pemerintahan khalifah Ali ibn Abi Thalib. Pada awalnya, pengikut kedua mazhab ini adalah para pendukung Ali bin Abi Thalib, meskipun pemikiran mazhab khawarij lebih dahulu muncul daripada mazhab Syi'ah. Untuk mengidentifikasi sekte Khawarij, baik sebagai gerakan politik maupun kerangka doktrinalnya, kekisruhan politik kekuasaan yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib, atau dikenal peristiwa al-fitnah al-kubra, penting untuk dijadikan titik-tolak. (Zahrah, 1996: 154).

PARTAI POLITIK DALAM ISLAM

Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintahan. (Przeworski, 2003: 75).

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. (Budiardjo, 2008: 404).

Dalam Al-Qur'an istilah partai disebut dengan perkataan *Hizb* (Partai). *Hizb* secara lughawi mempunyai makna: Pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas. Kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan. Ketiga, kader serta partisipannya. Mengikuti pengertian istilah, partai (*hizb*) adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama. (Yusuf, 2014: 487-488).

Istilah Partai dalam percaturan politik hari ini sudah sangat membaaur dengan kehidupan manusia, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Terkecuali kepada negara-negara yang menganut sistem monarki yang tidak menganut sistem kepartaian untuk menentukan kepala negara dan parlemen seperti: Oman, Saudi arab, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, dan bagian Negara-negara lainnya. Sementara itu hampir sebagian negara besar telah menggunakan sistem partai sebagai salah satu perangkat dalam politik negaranya.

Maka jelaslah bagi kita bahwa konsep *Hizb* dalam Al-Qur'an memang ditunjukkan kepada mereka pengikut Allah SWT (*Hizb Allah*) dan pengikut Syaitan (*Hizb Syaitan*). Dalam arti

lain, yakni mereka yang mengikuti jalan kebenaran (*Haq*) dan mereka yang mengikuti jalan keburukan/kesesatan (*Batil*). Kalaupun konsep tersebut dapat diangkat dalam mensosialisasikan partai, maka Islam hanya mengenal Partai Islam (*Hizb Allah*) yang esensi dan hakikatnya berdasarkan pada Islam, aturan Islam, pengurus Islam, dan pelaksanaanyapun Islam. Dan partai Syaitan (*Hizb Syaitan*) yang didasarkan atas ideologi yang dibuat.

Manusia (Partai yang bukan dasar Islam) yang operasionalnya mengejar uang, jabatan, pangkat, dan materi keduniaan. (Thaib, 1994: 77). Sebuah Partai Politik adalah merupakan satu organisasi yang mengikat anggotanya sesuai dengan ketentuan partai yang bertujuan untuk memenangkan pemilu dalam rangka menggapai sejumlah kursi di parlemen. Apabila partai tersebut menang mutlak atau mayoritas di parlemen maka mereka akan membentuk pemerintahan negara sesuai dengan kehendak partai tersebut. (Thaib, 1994: 77). Maka ada persoalan yang fundamental dalam hal ini adalah apabila partai tersebut bernuansa Islam sebagai sebuah partai Islam yang mengutamakan atas kehendak Hukum Islam bagi rakyatnya, maka keberuntungan barangkali pada pihak Umat Muslim. Namun, kalaulah Partai yang memenangkan bukan dari partai Islam dan tidak mengutamakan hukum Islam walaupun

Partai tersebut bukan Partai Kafir, maka bisa dipastikan malapetaka dan bencana politik paling besar akan menimpa ummat Islam dan Wilayah Mayoritas. (Khaliq, 2005: 106).

Partai politik muncul pertama kali di Eropa Barat. Kemunculan partai politik dilatarbelakangi dengan semakin meluasnya ide bahwa partai politik merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan sebagai proses politik, maka partai politik berkembang dengan fungsi sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah pihak lain. (Budiarjo, 2003: 5).

Menurut Lipset dan Rokkan, dasar pembentukan partai politik di Eropa adalah Social Cleavages, yaitu pembelahan sosial yang dihasilkan oleh ketegangan-ketegangan sosial-kultural antara pusat-daerah, negara-agama, tuan tanah-Industriawan dan Pengusaha-Buruh. Dalam ketegangan sosio Kultural ini, orang akan melakukan identifikasi diri dan pada akhirnya memilih suatu representasi politik bagi kepentingannya yang lain, misalnya dalam rangka pemilihan umum. (Michael, 1984: 8).

Di Indonesia sendiri, Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman Kolonial Belanda sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Partaipartai politik didirikan bertujuan untuk melakukan pergerakan ke arah kemerdekaan Indonesia. Mereka melihat kemerdekaan sebagai hak setiap orang dan sekelompok orang yang terlingkup di dalam suatu bangsa, tanpa perlu menghubungkannya dengan aliran yang hidup dalam masyarakat,

maupun ajaran agama yang di anut. (Karim, 1983: 54). Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan partai Politik

dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). (Jatmika: 1999: 32).

Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Islam sudah terlibat aktif dan berkontribusi sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka hingga kini, kontribusi Islam dalam panggung politik juga tidak bisa diabaikan. Berkembangnya partai Islam di Indonesia setidaknya didasarkan pada beberapa alasan, seperti realitas sosial bahwa Islam berkembang dalam sebuah negara yang memiliki basis agama yang kuat. Selain itu, Islam juga menyediakan visi dan ideologi yang memungkinkan untuk ditransformasikan dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa. Islam kompatibel dengan nilai demokrasi. Islam mendukung hak asasi manusia, kesetaraan dan egalitarianisme, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui, di Indonesia sudah ada beberapa partai yang mengusung nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya seperti PKS, PKB, PPP dan terbaru Partai Gelora (Zoelva, 2008: 1-10).

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik Islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan *Ulill Amr* (pemegang kekuasaan) dan menepati janji.

Munculnya aliran dalam politik Islam dilatarbelakangi oleh kepentingan kelompok yang mengarah terjadinya perselisihan hingga terbunuh Khalifah Usman. Kelompok Sunni dimulai sejak berakhirnya pemerintahan al-Khulafa' al-Rasyidun dikenal juga dengan ahlal-hadis wa al-sunnah, ahlal-haqq wa al-sunnah dan ahlal-haqq wa al-din wa al-jama'ah. Setelah berakhir masa khalifah yang empat tersebut, naiklah Mu'awiyah yang membangun Dinasti Bani Umayyah. Namun, naiknya Mu'awiyah mendapat tantangan dari sebagian umat Islam yang mendukung Ali (Syi'ah) dan kelompok sempalan Khawarij. Akhirnya pada periode awal umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu mayoritas pendukung Mu'awiyah yang kemudian dikenal dengan jamaah (Sunni). Syi'ah pengikut yang setia kepada Ali bin Abi Thalib dan mazhab politik yang pertama lahir dalam islam, mazhab ini lahir akhir pada masa pemerintahan Ustman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali, setiap kali Ali berhubungan dengan masyarakat, mereka semakin mengagumi bakat, kekuatan beragama, dan ilmunya. Karena itu, para propagandis syiah mereka mengeksploitasi kekaguman mereka terhadap Ali. Khawarij adalah orang-orang yang kecewa kepada Ali Bin Abi Thalib karena menerima arbitrase dari Muawiyah, Kemudian mereka keluar dari barisan Ali, dan menghukum kan La hukma illa Lillah.

Pada awalnya Islam memang tidak mengenal sistem partai dama mengurus dan mengatur Negara, yang ada adalah sistem

musyawarah, penunjukan, dan bai'at terhadap seseorang dalam kasus pemilihan kepala Negara. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui representative ummah, yakni badan *ahl al halli wa al-aqdi* yang menetapkan seseorang menjadi pemimpin ummah. Boleh jadi sistem semacam itu mudah dilakukan pada zaman awal Islam berkaitan dengan minimnya komunitas muslim, sehingga mudah dikomunikasikan dan mudah dikontrol. Sementara hari ini selain muslim sudah sangat ramai, pengaruh dunia luar juga menentukan terhadap plakat dan atribut politik muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal. *Syi'ah Dan Sunni Dalam Perspektif Pemikiran Islam*. (HUNAF: Jurnal Studia Islamika 3(2), 2006).
- Abidin Zainal. *Imamah Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Sosial*. (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2012).
- Abu Zahra Muhammad. *Imam Syafi'i: Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik Dan Fiqh*. (Jakarta: Lentera Basritama, 2005).
- Abdullah Taufik, Ahmad Sukardja, Azyumardi Azra, Bahtiar EEffendy, Budhi Munawar, Rachman M, Din Syamsuddin, Hendro Prasetyo, Ihsan Ali Fauzi, Johan Hendrik, Meuleman, Komaruddin Hidayat, Nurcholish Madjid, M Quraish Shihab, and Sudarnoto Abdul Hakim, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).
- Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Tahun 2003).

Imarah Muhammad, *Mak'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, (Kairo: Nahdhah Mishr, 1419).

K Hitti Phillip. *History Of The Arabs*. (Cecep Lukman Hakim & Dedi Slamet Riyadi. (Jakarta: Serambi, 2005). Kencana Syaifiie Inu. *Al-Qur'an Dan Ilmu Politik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Jatmika Sigit, *Partai Kebijakan dan Demokrasi* (Pustaka pelajar, Yogyakarta Tahun 1999).

Abu Zahra Muhammad. *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*. (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1996).

Lihat Tulisan Hamdan Zoelva, *Partai Politik Islam Dalam Peta Politik Indonesia*, dimuat dalam Blog Hamdan Zoeva Tahun 2008.

Mun'iem Al-Nemr Abdul. *Sejarah Dan Dokemen-dokemen Syiah*. (Jakarta: Yayasan Alumni Timur Tengah, 1988).

Michael Robert, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi* (Jakarta: Rajawali Press 1984).

Madjid Nurcholish. *Khasanah Intelektual Islam*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019). Nasiwan,

Diskursus Antara Islam dan Negara Suatu Kajian tentang Islam Politik, (Pontianak: Yayasan Insan Cinta, 2003).

Rojak Abdul, and Anwar Rosihon. *Ilmu Kalam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Przeworski Adam, *Sejumlah Masalah dalam Studi Transisi Menuju Demokrasi, dalam Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2003).

Thabathaba'I Allamamah M. H. *Islam SYI'AH: Asal Usul dan Perkembangannya*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafidi, 1989).

BAB 6
KEPEMIMPINAN DAN CORAK KOMUNIKASI
POLITIK KHULAFARRASYIDIN
Oleh: Umar Abdur Rahim SM

Membahas tentang sejarah Islam adalah salah satu hal penting yang harus diketahui seorang muslim untuk memahami tentang sesuatu dalam perjalanan kehidupan sertaperadaban manusia. Hal tersebut dilakukan karena lewat sejarahlah kita bisa mengenal hal-hal yang mendasar atau fundamental dari sesuatu, sebab-akibat serta maksud dan tujuan dari sesuatu hal itu ada atau dilakukan.

Dalam prespektif keilmuan, sesungguhnya mengkaji tentang sejarah tidak saja sekedar mengingat, mengenang terhadap masa lalu, tidak hanya mengingat kisah-kisah nyata, tidak saja sekedar mengingat akan kilas perjalanan pahit manis atau kejayaan dan keberhasilan masa lalu, akan tetapi lebih dari sekedar itu, lewat sejarah kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dimasa lalu, apa dan mengapa dan lain sebagainya.

Ada banyak sekali sisi dan dimensi sejarah yang dapat diambil pelajarannya, salah satunya adalah sisi ketokohan yang ada dalam sejarah. Sisi tokoh mempunyai andil yang cukup penting dalam sejarah, sisi tokoh juga mengajarkan kita mencermati dan menganalisis hal-hal yang telah lalu untuk kemudian diambil pelajaran darinya yang dapat menjadi

sumbangsih pemikiran, strategi maupun hal lainnya dalam sebuah terapan aktifitas, terapan kelimuan dan lain sebagainya.

Membahas ketokohan Khulafaurasyidin merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji kilas perjalanan keIslamannya, termasuk membahas bagaimana corak kepemimpinan yang mereka lakukan pada masanya dalam menjalankan kekhalifahan atau pemerintahan sebagai penerus dan penyambung estapeta kerisalahan Rasulullah. Dalam tulisan ini penulis coba memaparkan bagaimana kepemimpinan khulafaurasyidin dan bagaimana komunikasi politik Islam yang para khufurrasyidin bangun dan lakukan dimasanya.

Jika ditela'ah secara mendasar, maka kata “Khulafaur Rasyidin,” terdiri dari dua kata, “Al-khulafa” bentuk jama’ dari “khalifah” yang berarti “pengganti,” dan “Ar-Rasyidin” ialah berarti “benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana”. Jika disatukan, kata “*Khulafaur Rasyidin*” berarti para (pemimpin) pengganti Rasulullah yang arif dan bijaksana (Adnan, 95). Kata khilafah dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut khalifah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut khalifah. Oleh karena itu, tidak akan ada suatu khilafah tanpa adanya seorang khalifah (Ade, 25).

Khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah.

berdasarkan pandangan tersebut, maka muncullah suatu konsep bahwa Dinnul Islam bukanlah sebuah agama yang berisi hal-hal ritual peribadahan saja, akan tetapi dinnul Islam adalah sebuah konsep hidup yang komprehensif dan menyeluruh yang meliputi Ad-dinn wa Ad-daulah atau Islam adalah agama sekaligus undang-undang kehidupan yang memerlukan pengaturan dan kedaulatan secara politik yang salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk negara.

Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Abu Bakar As-Shidiq beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shalallahu alaihi Wassalam yang juga merupakan “*Assabiqunal Awwalun*” atau termasuk di antara sahabat- sahabat Nabi yang pertama-tama masuk memeluk Ajaran Islam dan beriman kepada Allah dan kerisalahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Beliau mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra Islam ia bernama Abu Ka’bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 M, dan wafat pada tanggal 23 Jumadil akhir tahun 13 H bertepatan dengan bulan Agustus 634 M, dalam usianya 63 tahun, usianya lebih muda dari Nabi SAW 3 tahun. Beliau diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari, karena beliau termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sementara gelar “As-Shidiq” (Suntiah, Maslani, 69) diberikan

karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi SAW terutama pada saat peristiwa Isra' Mi'raj.

Terpilihnya Menjadi Khalifah

Setelah peristiwa wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam serta merta dilanda oleh kebingungan dan kekhawatiran tentang bagaimana menjalankan Islam tanpa adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah bahkan sekelas Umar Bin Khattab pun merasakan hal demikian sehingga beliau marah dan tidak percaya akan berita wafatnya rasulullah hingga akhirnya reda setelah mendapatkan penjelasan dan peringatan oleh Abu Bakar Shidiq.

Bermula dari peristiwa itulah kemudian para sahabat nabi berinisiatif untuk bermusyawarah terlebih dahulu memilih siapa pengganti Rasulullah sebelum Rasul dimakamkan. Sebelum terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, pada mulanya terjadi pendapat atau usulan oleh kaum Anshar dan Muhajirin yang sama-sama di antara dua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Akan tetapi kemudian usulan itu ditolak dengan tegas, sehingga di antara mereka menyimpulkan bahwa kaum muhajirin memang lebih berhak untuk menjadi pengganti Nabi dan menjadi pemimpin Umat Islam selanjutnya. Semua sepakat, maka Umar bin Khattab maju dan membaiaat Abu Bakar yang kemudian dibaiaat oleh semua yang hadir di tsaqifah (Usairi, 144).

Pasca terpilihnya Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menyatakan pidatonya, “taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasulnya di tengah kalian, jika aku bermaksiat maka tidak wajib kalian taat kepadaku.” Setelah pembaitan dan pernyataan beliau tersebut, dengan demikian, maka pasca wafatnya Rasulullah, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah pelanjut estapeta kepemimpinan Rasul dan menjadi khalifah Islam pertama yang dipilih oleh umat Islam dan menjadi pemimpin Agama sekaligus kepala negara kaum Muslimin.

Kepemimpinan dan Komunikasi Politik Abu Bakar

Masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar tidaklah lama. Beliau memimpin hanya berlangsung sekitar dua tahun (Suyuti, 126), waktu dua tahun itu habis untuk menyelesaikan masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal muncul dari kelanjutan kebingungan umat Islam atas wafatnya Rasul, yang beranggapan bahwa ajaran Islam telah selesai seiring dengan wafatnya Rasulullah.

Sehingga dampak dari kesalahan prespektif tersebut, banyak dari umat Islam pada saat itu, terutama mereka yang baru masuk Islam dan belum kuat pondasi iman serta tauhidnya, murtad dan kembali ke agama atau kepercayaan mereka sebelumnya dan menolak patuh pada estapeta kepemimpinan dan pemerintah Islam yang telah diemban oleh khalifah Abu Bakar pada saat itu. Masalah lainnya yaitu munculnya nabi palsu

yang ingin mengambil kesempatan dan keuntungan dari situasi yang ada sehingga muncullah pemberontakan-pemberontakan kepada pemerintahan Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu.

Gaya komunikasi Abu Bakar terkenal dengan sosok yang berkomunikasi dengan lemah lembut, Namun, kelembutan dan kehati-hatian Abu Bakar dianggap menjadi senjata bagi musuh-musuh Islam, beliau diuji dengan munculnya kekacauan dan pemberontakan pada masa awal-awal pemerintahannya tersebut. Para pemberontak dan pengacau yang dilatar belakangi oleh para kaum munafik mengira bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang lemah dan mudah dikalahkan, sehingga mereka berani membuat kekacauan dan memanfaatkan situai yang ada.

Abu Bakar memutuskan untuk bertindak tegas yakni membentuk pasukan perang yang dipimpin oleh para sahabat Nabi yang tangguh untuk melawan seluruh pemberontak. Tindakan tersebut didukung oleh banyak umat muslim yang masih kuat imannya dan masih setia, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama seluruh kekacauan berhasil diatasi sehingga menguatkan kembali posisi Islam ditengah-tengah umat pada saat itu.

Sebelum memperluas kepentingan ke luar negeri, Abu Bakar menyelesaikan terlebih dahulu kepentingan di dalam negeri. Untuk itu pada tahun pertama kepemimpinan, Abu Bakar disibukan dan berfokus menyelesaikan masalah-masalah internal. Pada tahun kedua Abu Bakar melanjutkan perjuangan Rasul dalam menyebarkan ajaran Islam dengan melakukan

ekspansi ajaran Islam hingga ke beberapa wilayah termasuk wilayah-wilayah yang berada di luar semenanjung Arab (Hamka, 160).

Corak komunikasi kepemimpinan Abu Bakar bersifat sentral atau terpusat, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian Abu Bakar dalam beberapa hal, Abu Bakar tetap melakukan musyawarah seperti pada zaman Rasul dalam menyelesaikan suatu masalah. Langkah politik yang ditempuh Abu-Bakar sangat efektif dan sukses membawa dampak yang positif. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq berhasil melakukan perluasan wilayah, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan dan lain sebagainya.

Meskipun menjalankan kepemimpinan yang hanya dua tahun, Namun, khalifah Abu Bakar menjalankan tugasnya dengan maksimal dan tetap berkontribusi memberikan manfaat untuk Islam. Abu Bakar juga berhasil menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal, berhasil mengislamkan kembali golongan pemberontak yang memusuhi Islam, dan berhasil mempersatukan kembali suku-suku yang terpecah belah.

Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di kota Madinah pada usia 63 tahun. Abu Bakar meninggal karena sakit, beliau dimakamkan di rumah putrinya Aisyah dan berada tepat di samping makam Rasulullah. Sebelum meninggal Abu Bakar memberikan amanah dan berwasiat bahwa Umar bin

Khatablah yang akan menjadi penggantinya dalam meneruskan estapeta kerisalahan nabi dan melanjutkan kepemimpinan umat Islam menggantikan beliau.

Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Umar bin Khatthab (583-644) memiliki nama lengkap Umar bin Khatthab bin Nufail keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah empat tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umar baru memeluk dan masuk agama Islam pada tahun kelima setelah kenabian(Samsul Munir,98) dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Setelah masuk Islam, Umar bin khattab mendedikasikan hidupnya sepenuh jiwa dan raga untuk bersama Rasul dalam dakwah ajaran Islam. Hadirnya Umar membuat Islam semakin kokoh dan kuat. Umar menjadi seorang kepercayaan Rasulullah sekaligus menjadi salah satu sahabat yang cukup dipertimbangkan masukan, ide gagasan dan nasihatnya.

Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan gaya komunikasi yang keras, tegas, pemberani dan tidak mengenal gentar jika ia merasa dirinya benar. Beliau juga adalah seorang yang pandai berkomunikasi dan bernegosiasi dengan berbagai kalangan dan fasih bicaranya. Umar bin Khatthab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Abu Bakar As-shidiq. Islamnya Umar dalam

sejarah Islam memiliki andil besar dan merupakan membuat posisi umat Islam menjadi semakin kuat (Musthfa, 29).

Dalam banyak kasus Umar bin Khatthab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana, memiliki ide serta gagasan yang cemerlang. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar, membuat kedudukannya semakin dihormati dikalangan masyarakat baik kawan ataupun lawan bahkan Umar pun dikenal sebagai sosok yang ahli strategi perang dan seorang sahabat yang tangguh dimedan perang sehingga beliau mendapat gelar "Singa padang pasir" (Arif, 2).

Terpilihnya Menjadi Khalifah

Ketika Khalifah Abu Bakar mulai sakit, ia berkonsultasi dengan para sahabat lain mengenai khalifah sesudahnya. Ia berkata kepada mereka: "aku sekarang telah menderit sakit seperti yang kalian lihat. Sepertinya ajalku akan segera datang. Oleh karena itu, angkatlah seseorang yang kalian cintai sebagai pemimpin kalian yang akan menggantikanku. Barangkali apabila kalian menentukannya pada saat aku masih hidup sekarang, kalian tidak akan berselisih pendapat nantinya setelah kematianku". Kemudian para sahabat bermusyawarah sesama mereka.

Hasilnya, mereka menghadap khalifah Abu Bakar dan memintanya agar menetapkan seseorang yang ia kehendaki sebagai pemimpin mereka. Abu Bakar kemudian bertanya pada mereka: "jangan- jangan kalian akan berselisih setelah aku

tentukan?” Mereka menjawab: “Ya” Dia berkata: “Kalau begitu, berilah aku tenggang waktu untuk berpikir karena Allah, untuk kepentingan agama dan kaum muslimin.” Kemudian Abu Bakar memanggil Ustman bin Affan dan meminta pendapatnya tentang siapa yang akan dijadikan penggantinya. Ustman mengusulkan nama Umar bin al-khattab. Lalu Abu Bakar memerintahkannya untuk menulis surat wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau diangkat sebagai khalifah pada tahun 13H/634M kekhalfahan Umar adalah masa yang penuh dengan kemajuan dan kegemilangan pada dunia muslim.

Kepemimpinan dan Komunikasi Politik Umar bin Khattab

Selama masa kepemimpinan dan pemerintahan Umar bin Khattab sebagai khalifah, kekuasaan Islam bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Selain merapikan dan memanageremen pemerintahan Islam secara internal, Umar bin khattab juga melakukan ekspansi wilayah kerisalahan dan kekuasaan Islam menjadi lenih luas dan berkembang. Umar mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan kerajaan-kerajaan yang ada di Persia, mengambil alih Mesir, Palestina, Syiria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi Byzantium dan lain sebagainya.

Umar bin Khattab banyak melakukan reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan-kebijakan pemerintahannya terutama kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kebijakan publik, termasuk membangun

sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus diseluruh wilayah kekuasaan Islam.

Ada beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa khalifah Umar bin Khatthab, yang meliputi Sistem pemerintahan (politik), ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan agama. Sebagaimana dijelaskan berikut:

Pada masa khalifah Umar bin khatab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar Radhiallahu ‘anhu segera mengatur administrasi negara dan menatanya dengan sangat baik.

Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin khatab mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi. Mulai sejak masa Umar pemerintahan dikelola oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi.

Selain itu, pada masa Umar bin Khatab juga mulai dibangun suatu lembaga formal yang disebut lembaga penerangan dan pembinaan hukum Islam yang membidangi masalah pembinaan umat. Dimasa ini juga terbentuknya sistem atau badan kemiliteran. Pada masa khalifah Umar bin Khattab ekspansi Islam meliputi daerah Arabia, syiria, Mesir, dan Persia. Karena wilayah Islam bertambah luas maka Umar berusaha

mengadakan penyusunan pemerintah Islam dan peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Masa pemerintahan Umar bin Khatab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 H/634M sampai tahun 23H/644M. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa pemerintahannya oleh Khalifah Umar dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Ia meninggal pada tahun 644M karena dibunuh oleh Fairuz atau Abu Lukluk, budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Sebelum meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih Khalifah pengganti dari salah satu anggotanya. Mereka adalah Usman, Ali, Tholhah, Zubair, Saad bin Abi Waqash dan Abdurrahman bin Auf.

Khalifah Utsman bin Affan (23-36 H/644-656 M)

Khalifah selanjutnya adalah sahabat Nabi Utsman bin Affan, Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar, dan menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. pada waktu itu. Ia sangat kaya Namun, tetap sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Ia juga mendapat julukan *zun nurain*, artinya yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad secara berurutan setelah salah satu meninggal.

Usman bin Affan merupakan khalifah ke tiga umat Islam di periode awal Islam. Selain Abu Bakar dan Umar, Usman juga dikenal sebagai salah satu sahabat nabi yang dermawan. Ia telah mengeluarkan harta bendanya yang tidak sedikit. Menurut riwayat Quthadah, barang-barang yang didermakan oleh Utsman adalah tidak kurang dari 1000 pikulan unta. Salah satu kedermawanan Utsman yaitu membeli sumber mata air (sumur raumah) dari orang yahudi yang disedekahkan untuk seluruh kaum muslimin ketika mendapati musibah dalam kesukaran Air dikota Madinah (Faisal, 225).

Terpilihnya Utsman Menjadi Khalifah

Pasca Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang dipilih Umar sebelumnya (pada saat sakit) membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari enam orang calon untuk diangkat sebagai khalifah baru, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdullah. Adapun tim formatur ini dikepalai oleh Abdurrahman ibnu Auf (Suyuti, 134) dan mereka berkumpul dalam salah satu rumah selama tiga hari pemilihan ini hanya mempunyai hak pilih, dan tidak berhak dipilih.

Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang Syura akhirnya memberi mandat kekhalifaan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang yaitu selama 12 tahun (24-36 H/644-656 M), tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa

kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi dua periode yaitu enam tahun terakhir merupakan masa kejayaan pemerintahannya dan tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang kurang baik (Baladzuri, 25) Utsman menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Masa kekhalifahan Utsman adalah yang paling lama di antara ketiga khalifah lainnya.

Kepemimpinan dan Komunikasi Politik Usman bin Affan

Mengikuti khalifah pendahulunya yaitu khalifa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, khalifah Utsman juga dikenal dengan sosok yang begitu menjunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum dalam kepemimpinan dan pemerintahannya, seperti ketika beliau menganjurkan kepada petugas-petugas qadhi nya yang berada di daerah untuk menjalankan tugasnya agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran.

Sehingga beliau mengirimkan surat kepada petugas yang isinya adalah: “Maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang benar. Maka Allah tidak akan menerima juga kecuali dengan kebenaran. Ambillah kebenaran dan perhatikanlah amanah, tegakkanlah amanah itu dan janganlah kalian merupakan orang yang pertama kali meniadakannya, Maka kalian akan merupakan kongsi oarang-orang sesudahmu, Penuhilah! Jangan kalian berbuat aniaya kepada anak yatim

piatu dan begitu juga yang berbuat aniaya kepada orang yang engkau mengikat janji kepadanya” (Athiyah, 104).

Selain itu dalam corak komunikasi dan gaya kepemimpinannya beliau juga membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang rinci dan jelas melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Abu bakar dan Umar bin Khattab. Hal yang membuat banyak masyarakat kecewa pada masa kepemimpinan Ustman adalah kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting di antaranya adalah Marwan ibn Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Ustman hanya menyandang gelar Khalifah.

Usman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. di masa akhir kepemimpinannya, kondisi politik semakin mencekam. Hingga berakibat pada terbunuhnya Usman bin Affan oleh pemberontak yang berhasil masuk ke dalam kamarnya dan membunuhnya saat membaca sedang Al-quran.

Khalifah Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M)

Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hasyim. Ali adalah putera putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali dilahirkan sepuluh tahun sebelum Nabi saw diutus oleh Allah menjadi rasul. Khalifah Ali bin abi thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari

kalangan anak-anak. Nabi Muhammad semenjak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian setelah kakeknya meninggal dia asuh oleh paman nya Abu Thalib. Karena Rasulullah hendak menolong dan membalas jasa pamannya, maka Ali diasuh oleh Nabi saw. dan didik. Pengetahuannya dalam agama Islam sangat luas.

Ketika pada masa Kekhalifahan Abu Bakar, Rasulullah selalu mengajak Ali untuk memusyawarahkan masalah-masalah penting. Begitu pula Umar bin Khattab dan juga Usman bin Affan mereka tidak akan mengambil kebijaksanaan atau melakukan tindakan dan keputusan tanpa terlebih dahulu melakukan tukar pikiran atau bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib (Faisal, 234).

1. Terpilihnya Ali Menjadi Khalifah

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah ke empat umat Islam di periode awal Islam. Setelah khalifah Usman bin Affan wafat akibat pembunuhan oleh pemberontak yang waktu itu telah menguasai Madinah, maka pemerintahan dijatuhkan pada Ali bin Abi Thalib sebagaimana hasil keputusan dari sidang dewan formatur bahwa Ali bin Abi Thalib akan menjadi khalifah setelah Usman bin Affan.

Pada waktu pembaiatan Ali berpidato setelah diangkat untuk menjadi khalifah, yaitu, “Wahai manusia, kamu telah membaiatku sebagaimana yang telah kamu lakukan kepada khalifah-khalifah yang lebih dahulu daripadaku. Aku hanya

boleh menolak sebelum jatuh pilihan. Apabila pilihan telah jatuh, menolak tidak boleh lagi. Imam harus teguh dan rakyat harus patuh. Baiat terhadap diriku ini ialah baiat yang rata yang umum. Barangsiapa yang memungkirinya maka terpisahlah ia dari agama Islam”.

2. Kepemimpinan dan Komunikasi Politik Ali bin Abi Thalib

Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berlangsung selama enam tahun. Dalam masa pemerintahannya, corak dan gaya komunikasi dimasa Ali tidak begitu terlihat dikarenakan sibuk menghadapi polemik internal antara para sahabat. Ali menghadapi berbagai pergolakan dalam tubuh umat Islam. Pergolakan ini merupakan akibat dari terbunuhnya Usman bin Affan. Tidak ada masa sedikit pun selama pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya, pada tahun ke-36 Hijriyah (\pm 658 M), ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah dan setelah itu Ali disibukan dengan perpecahan dan perperangan umat Islam. Perang ini diakhiri dengan diadakannya perjanjian untuk menyelesaikan persoalan di antara kedua belah pihak yang dikenal dengan tahkim. Dalam perjanjian itu masing-masing pihak harus mengirimkan satu orang wakilnya. Ali bin Abi Thalib mewakilkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah diwakili oleh Amru bin Ash. Abu Musa al-Asy'ari dikenal sebagai orang yang lurus dan jujur.

Tahkim ini ternyata tidak menyelesaikan persoalan umat Islam. Tetapi bahkan telah menambah perpecahan di antara umat Islam. Akibat dari diadakannya tahkim ini, tentara Ali bin Abi Thalib terpecah. Sebagian tentara Ali menyatakan keluar dan mereka membentuk kelompok sendiri yang tidak memihak kepada siapa pun. Kelompok yang keluar dari tentara Ali ini kemudian dikenal dengan sebutan kaum Khawarij (orang-orang yang keluar). Kaum Khawarij ini menyatakan permusuhannya baik kepada Ali bin Abi Thalib maupun kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka pun bahkan berjanji akan membunuh keempat tokoh yang telah menyebabkan umat Islam terpecah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amru bin Ash. Di antara keempat tokoh ini, yang terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Ali dibunuh oleh anggota dari kaum Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Ali meninggal pada tanggal 19 Ramadhan 40 H (661 M). Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, penggantinya adalah puteranya, yaitu Hasan bin Ali, dan kemudian Husein bin Ali, adik dari Hasan. Setelah itu, kepemimpinan umat Islam berpindah tangan kepada keluarga Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian mendirikan Dinasti Bani Umayyah.

Analisis Corak Komunikasi Politik Khulafaurrasyidin

Dari sisi prespektif komunikasi Islam, sesungguhnya komunikasi politik yang dilakukan oleh para khulafurrasyidin dapat ditela'ah dari beberapa aspek. Pertama, masing-masing

para khulafaurrasyidin mempunyai corak komunikasi yang berbeda. Hal tersebut jika ditela'ah dapat disebabkan oleh latar belakang yang berbeda pula. Khalifah Abu Bakar mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda dengan Umar Bin Khatab. Begitu juga dengan Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kedua, lebih spesifik kepada pendekatan komunikasi yang dilakukan, masing-masing para khulafaurrasyidin mempunyai pendekatan komunikasi yang memiliki kesamaan dan perbedaan.

Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq yang terkenal dengan lemah lembut lebih memakai prinsip dan pendekatan komunikasi yang lemah lembut Namun, tegas. Namun, di balik sisi kelembutannya, Abu Bakar juga melakukan pendekatan komunikasi yang tegas dan tindakan yang keras kepada siapa saja yang menyimpang dari ajaran Rasul, baik dari kalangan murtadin maupun kepada para musyrikin yang mulai merasa memiliki peluang besar untuk kembali menggempur umat Islam selepas kepergian Rasulullah. Selain itu, Abu Bakar juga melakukan pendekatan komunikasi yang tegas dan tindakan yang keras kepada para nabi-nabi palsu yang hadir dan membuat kegaduhan dan mengambil peluang dari sebagian umat Islam yang imannya belum kuat dan merasa bingung selepas kepergian Rasulullah.

Sedangkan Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga mempunyai Aspek pendekatan komunikasi yang hampir sama kepada orang muslim Namun, disisi lain, mereka memiliki spesifikasi yang lebih menjurus kepada pendekatan komunikasi organisasi yang dilakukan untuk menata dan menjalankan roda kepemimpinan secara tertata dan terorganisirnya kepemimpinan mereka dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Adnan, *Wajah Islam Periode Makkah-Madinah*,
Vol. 5 (Cendikia: Jurnal Study Keislaman, 2019)

Ade Shitu-Agbetola, "Theori of al- Khilafah in The Religion-
Political View of Sayyid kutb, dalam Hamdar Islamicus:
Quartely journal of Studies and Researchin Islam,
Summer, (1991)

Ratu Suntiah & Maslani, *Sejarah Peradaban Isalm*,(Bandung:
PT. Remaja Rosda Karya, 2017)

Ahmad al-'Usairi, *Sejarah Islam*, (Jakarta: Akbar Media, 2003)

Suyuti Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*(Jakarta: Bumi
Aksara 2018)

Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta:
Amzah, 2010)

Musthafa Murad, *Kisah Hidup Umar Ibn Khattab*, (Jakarta:
Penerbit Zaman, 2007)

Arif Setiawan, *Islam dimasa Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Hijri
Pustaka, 2002)

Al-Baladzuri, *Fatuhul Buldam*, Jilid V, (Mesir: Maktabah An-Nahdah Al-Misriyah)

Faisal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M)*, (Yogyakarta:IRCiSoD 2017)

Athiyah Musthafa Musyififah, *Al-Qadha fi Al-Islam*, (cet 1: Asy-Syarqul Austh)

BAB 7
HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA
DALAM SEJARAH ISLAM
Oleh: Iryuha Tantawi

Al-Mawdûdi, pemikir Islam kontemporer mengatakan, bahwa Islam suatu agama yang sangat lengkap memuat prinsip-prinsip mengenai semua segi kehidupan meliputi etika, moral, politik, sosial dan ekonomi. Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu keyakinan, tetapi suatu sistem yang lengkap dan mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh umat manusia (Azhar, 1996; 135). Sementara itu, Ibnu Khaldûn melihat bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan Negara. Agama berperan dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat, rasa solidaritas itu akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat. Seluruh perhatiannya terarah kepada kebaikan dan kebenaran. Agama pula tujuan solidaritas itu menjadi satu. Yang diperjuangkan bersama adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Mushthâfa Kemal al-Tattûr menyatakan bahwa agama dan negara memiliki korelasi, Namun, dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah, karena itu ia menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan negara (Nasution, 1994; 142).

Di Indonesia perbedaan pendapat tentang hubungan agama dan negara antara Soekarno yang mewakili kelompok nasionalis sekuler, dan Muhammad Natsir yang mewakili nasionalis Islam pada akhirnya bermuara kepada suatu kesepakatan nasional dengan lahirnya “Piagam Jakarta 22 Juni 1945.” Piagam ini, memuat dasar negara, kemudian mengalami perubahan dengan dicoretinya tujuh kata dari sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, (Syazadli, 1993;196) tetapi polemik tentang hubungan agama dengan negara masih tetap berlanjut sampai tulisan ini diterbitkan.

Untuk mengetahui lebih mendalam hubungan antara negara dengan agama dalam perspektif Islam, perlu dikaji ayat-ayat Al-Qur’an secara akurat dan mengaitkannya dengan sirah Nabi saw dalam membangun negara Madani. Di samping itu, berbagai pandangan dan sikap-sikap tokoh-tokoh Islam atau ulama-ulama terkemuka, sangat perlu dicermati secara komprehensif. Dengan upaya seperti ini, di satu sisi akan dapat dirumuskan hubungan negara dengan agama itu sendiri dalam berbagai aspeknya. Pada sisi lain, persoalan tentang hubungan negara dengan agama sangat penting untuk dibahas, karena persoalan tersebut kelihatannya masih menjadi perdebatan yang alot dalam pemikiran Islam.

Pengertian Negara dan Agama

Negara dalam terminologi secara umum, melahirkan beberapa pengertian. Namun, negara dalam terminologi Islam

yang diistilahkan dengan dawlah, pengertiannya selalu merujuk pada Al-Qur'an yang menggunakan term al-balad dan derivasinya. (Shihab, 1997; 785) Kata al-balad secara leksikal berarti tinggal di suatu tempat, kota atau daerah, dan negeri. (al-Munawwir, 1997; 104) Kata al-balad yang berarti kota ditemukan dalam QS. al-Balad (90): 1-2, yakni: لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (Aku benar-benar ber-sumpah dengan kota ini (Mekah), dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini). Sedangkan derivasi kata al-balad yang berarti negeri ditemukan dalam QS. al-Fajr (89):11, yakni; الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ (yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri ini). Pengertian yang sama, juga terdapat dalam QS. al-Furqân (25): 49, yakni ; لِنَحْيِيَّ بِهِ بَلْدَةً مَّيْمَنًا ; وَنَسْقِيَهُ (agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati).

Negeri yang juga dapat diartikan negara (al-bilâd), disebut dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuknya sebanyak 19 kali dengan perincian: kata balada disebut sebanyak 8 kali, kata baladan 1 kali, kata bilâdi 5 kali, sedangkan kata baldatun disebut sebanyak 5 kali, yang kesemuanya berarti negara/negeri.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa masalah negara memang ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Namun, dari dalil-dalil tersebut tidak ditemukan pengertian negara secara akurat. Karena itu, Muhammad Izzat Darwazah ketika mengelompokkan ayat-ayat tentang negara, ia berkesimpulan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menyebut

sistem dan bentuk negara dalam Islam. (Pulungan, 1996; 10) Berdasar pada kesimpulan tersebut, dan untuk menemukan pengertian negara dalam perspektif Islam, terlebih dahulu harus merujuk pada unsur-unsur negara itu sendiri. Dalam hal ini, al-Mawardi menyebutkan unsur-unsur negara sebagai berikut:

1. Di dalam negara ada agama yang dihayati. Agama yang diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati manusia, karenanya merupakan sendi sekaligus unsur yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.
2. Di dalam negara, ada penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur.
3. Di dalam negara, harus ada keadilan yang menyeluruh. Terwujudnya keadilan akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negara yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa serta menjamin stabilitas dalam negeri.
4. Di dalam negara, harus tercipta keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, inisiatif dan daya kreasi akan berkembang di kalangan rakyat.
5. Di dalam negara, terwujud kesuburan tanah. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat terpenuhi, dan dengan

demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya.

6. Di dalam negara, ada generasi. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi yang lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme.

Sedangkan Ibn Abi Râbi' berpendapat, bahwa untuk mendirikan negara diperlukan dua unsur dan sendi. Pertama, harus ada wilayah di dalamnya, terdapat air bersih, tempat mata pencaharian, terhindar dari serangan musuh, jalan-jalan raya, tempat shalat di tengah kota, dan pasar-pasar. Kedua, harus ada raja atau penguasa sebagai pengelola negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat.

Relevan dengan uraian di atas, negara dalam perspektif Islam menurut rumusan penulis adalah suatu daerah kekuasaan yang memiliki batas-batas wilayah, di dalam wilayah tersebut ada kelompok, persekutuan manusia yang beragama, ada penguasa, ada keadilan dan tercipta suasana yang aman, kesuburan tanah, serta ada generasi penerus.

Berdasarkan pengertian negara yang telah dikemukakan di atas, terungkap bahwa salah satu unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama itu sendiri. Dengan adanya agama, maka tercipta keadilan dan suasana yang aman. Ajaran agama juga memotivasi penganutnya untuk menjadikan negara yang dihuninya menjadi subur, dan mereka yang ditugasi dalam pengelolaan negara adalah para generasi sekarang dan

mendatang. Jadi, kelihatan bahwa agama merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara menurut perspektif Islam. (Nasution, 1992; 445)

Agama secara redaksional memiliki banyak pengertian, Di dalam Al-Qur'an disebut dengan term; al-dîn dan atau al-millah. Upaya pendefinisian al-dîn dan al-millah, terlebih dahulu perlu ditelusuri aspek morfologisnya. Kata al-dîn, berasal dari kata dayana, yadînu kemudian dibaca dâna, yadînu. Dâna (دَانَ) yang arti dasarnya “hutang” adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau ditunaikan. Dari kata ini, kemudian jika di-tashrîf melahirkan kata dîn (دِينٌ) “agama” adalah sesuatu undang-undang atau hukum yang harus ditunaikan oleh manusia, dan mengabaikannya akan berarti “hutang” yang akan tetap dituntut untuk ditunaikan, serta akan mendapatkan hukuman atau balasan, jika tidak ditunaikan. Sedangkan kata al-millah, berasal kata milal yang menurut bahasa berarti sunnah (sistem) dan tharîqah (cara). Menurut al-Râghib al-Ashfâni, pengertian millah dengan al-dîn adalah sama, walaupun ada juga perbedaannya.

Agama diturunkan oleh Allah swt, berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk. Dengan fungsi seperti ini, maka agama memiliki tujuan untuk memberi keselamatan dan kebahagiaan yang abadi kepada penganutnya, sehingga hidupnya menjadi tenteram (al-amn), baik di dunia maupun di akhirat kelak. Fungsi-fungsi agama tersebut, tentu pula mencakup untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat

dalam sebuah negara, bilamana penganutnya menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.

Pandangan Ulama Mengenai Hubungan Agama dengan Negara

Pandangan mengenai hubungan antara agama dengan Negara ada tiga. Pertama, mereka berpendirian bahwa, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antar manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu. Agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain sistem kenegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw, dan oleh empat al-Khulafâ al-Rasyidîn.

Para ulama yang memiliki pandangan seperti ini antara lain, Syekh Hasan alBanna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridhâ, dan yang paling vokal adalah Abû al-A'lâ al-Mawdûdi. Abû al-A'lâ al-Mawdûdi menegaskan, bahwa ajaran

Islam yang berkaitan dengan pemerintahan, dan yang diimplementasikan oleh Nabi saw dengan membangun negara Madinah memiliki sembilan ciri khas sebagai berikut:

1. Negara berdasarkan kekuasaan perundang-undangan Illahi, yakni kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah swt, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah khilâfah atau perwakilan;
2. Keadilan antar manusia, yakni tumpuan bangunan negara ia bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka;
3. Persamaan antara kaum muslimin, yakni bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air;
4. Tanggung jawab pemerintah, yakni bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang beriman, bersifat adil dan benar;
5. Permusyawaratan, yakni keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridhaan mereka, mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah;

6. Ketaatan dalam hal kebajikan, yakni kewajiban menaati pemerintah dalam hal-hal yang baik saja;
7. Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang, yakni bahwa orang-orang yang mengejar jabatan-jabatan kepemimpinan di dalam pemerintahan, serta berdaya upaya untuk itu, mereka sesungguhnya adalah orang yang paling sedikit keahlian dan kelayakan.
8. Tujuan adanya negara, yakni menegakkan kehidupan islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti.
9. Amar ma'rûf nahyi munkar, yakni bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak, bahkan wajib membela kebaikan dan mempertahankannya, ber-upaya dengan sungguh-sungguh dalam mencegah kemunkaran.

Pandangan atau aliran yang kedua mengemukakan, bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut pandangan ini, Nabi Muhammad saw, hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ulama atau tokohnya adalah 'Âli Abd. al-Râziq dan Thâha Husain.

Menurut 'Âli Abd. al-Râziq bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan khilâfah itu tidak perlu, karena risâlah atau misi kenabian dengan pemeritahan memiliki perbedaan. Risalah kenabian itu bukan pemerintahan

dan bahwa agama itu bukan negara. Selanjutnya, Thâha Husein menjelaskan bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud kembali bukan dengan jalan kembali pada ajaran Islam yang lama, dan juga bukan mengadakan reformasi atau pembaruan ajaran Islam, melainkan dengan perubahan-perubahan total yang bernafas liberal dan sekuler dengan berkiblat ke Barat. Dia juga menegaskan bahwa dari awal sejarah Islam, agama dan negara selalu terpisah. (Syadzali, 1993; 138)

Pandangan atau aliran yang ketiga menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan. Pandangan ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Maha Penciptanya. Pandangan ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Ulama atau tokohnya yang terkenal antara lain Muhammad Husain Haikal.

Menurut Muhammad Haikal, bahwa kehidupan bernegara bagi umat Islam itu baru dimulai pada waktu Nabi saw berhijrah dan menetap di Madinah. Di tempat yang baru itulah Nabi saw berdasarkan wahyu-wahyu meletakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha dan jual beli. Tentang apakah ajaran Islam lebih dekat dengan sistem republik dari pada sistem kerajaan, Haikal menyatakan bahwa

memang khalifah pada periode pertama Islam itu dibaiat berdasarkan musyawarah, dan tidak selalu melalui pemilihan langsung, dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan serupa dengan sistem parlementer atau sistem perwakilan. Dengan pembaitan oleh rakyat setelah konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kiranya dapat dikatakan bahwa kedudukan para khalifah tersebut lebih dekat dengan kedudukan presiden daripada kedudukan raja.

Berdasarkan pandangan para ulama yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan, bahwa konsep negara dan agama memiliki relevansi yang sangat signifikan pada aspek demokrasi. Tidak berlebihan, jika saat ini bentuk negara demokrasi justru dianggap yang paling representatif terhadap nilai-nilai agama, ketimbang bentuk-bentuk lain yang berkembang di negara-negara muslim. Karena itu, demokrasi dalam sebuah negara di pandang sebagai aturan politik yang paling layak, dan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi itu sendiri.

Pemikiran tentang Hubungan Islam dengan Demokrasi

Mengenai hubungan Islam dengan demokrasi, terdapat dua problem. Pertama, problem filosofis, yakni jika klaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total, maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, problem historis sosiologis, yakni ketika kenyataannya peran agama tidak jarang

digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya.

Nilai demokrasi ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi atau lanjutan dari pokok itu. Ada tiga nilai pokok demokrasi yaitu, keadilan, kebebasan, dan musyawarah. Keadilan merupakan landasan demokrasi dan peluang bagi semua orang untuk mengatur kehidupannya sesuai keinginannya. Perintah untuk menegakkan keadilan, antara lain terdapat dalam QS. al-Mâidah (5): 8.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa pemikiran tentang hubungan Islam dengan demokrasi, terletak pada adanya gagasan dalam Islam tentang persamaan derajat (almusâwah), yakni suatu perlakuan yang sama di hadapan hukum, penegakan keadilan dengan tanpa pandang bulu (al-‘adâlah), serta kebebasan berekspresi (al-hurriyah) melalui musyawarah. Gagasan dan sistem demokrasi yang demikian, tidak terlepas dari sentuhan nilai-nilai agama. Bahwa, manusia mengakui dan meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan pemilik alam semesta. Manusia sebagai ciptaan (makhluk-Nya)

berkewajiban mengabdikan dan menyembah kepada-Nya secara murni dan tulus. Relasi ini sekaligus mengikis praktek perbudakan di muka bumi, sebagai eksese dari penegakan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban setiap pribadi manusia di hadapan-Nya.

Penegakan keadilan, persamaan hak dan pertanggung jawaban pemerintahan kepada rakyat sebagai pilar-pilar demokrasi merupakan interpretasi real dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai demokratisasi dalam aplikatifnya harus ditopang oleh realisasi penerapan HAM, guna memanusiakan manusia di hadapan Tuhan. Pola seperti ini sangat relevan dengan esensi Islam yang menginginkan terwujudnya cinta-kasih sesama manusia di sisi-Nya. Pemerintahan yang demokratis, akan menghapus strata sosial masyarakat, mengubur sikap arogansi penguasa, serta mendudukan hukum di atas segalanya. Proses semacam ini, pada hakikatnya juga bagian dari aplikasi nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan, bahwa proses demokratisasi di muka bumi ini merupakan konsekuensi logis dari upaya pembumih nilai-nilai Islam. hakikat demokrasi merupakan aktualisasi interpretasi yang benar atas nilai-nilai pokok Islam. pemberdayaan atas nilai-nilai demokratisasi sama halnya dengan pengukuhan relasi manusia dengan Tuhan. Karenanya, usaha keras untuk membangun masyarakat yang demokratis tidak kalah urgensinya dengan nilai ibadah semacam shalat dan puasa. Sungguh sangat disayangkan bila

ulama dan umara (pemerintah) justru meninggalkan gagasan demokrasi yang ditawarkan oleh agama.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Hubungan antara agama dengan negara sangat erat dan terkait dalam berbagai aspeknya. Negara dalam perspektif Islam, disebut dengan al-bilâd dan wilayah kekuasaannya disebut dengan al-dawlah. Dengan merujuk pada kedua term ini yang bersumber dari Al-Qur'an, unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama itu sendiri yang dalam perspektif Islam disebut dengan al-dîn dan atau al-millah, yakni syariat yang bersumber dari Tuhan dan berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk. Dengan fungsi seperti ini, tujuan pokok agama adalah keselamatan kepada masing-masing penganutnya, termasuk di dalamnya untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dalam sebuah negara.
2. Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam masalah hubungan negara dengan agama. Namun, dari pandangan-pandangan mereka itu, dapat dirumuskan bahwa hubungan antara negara dan agama terlihat dalam aspek ketatanegaran dan demokrasi. Agama, dalam hal ini Islam, mewajibkan terbentuknya suatu negara dan memberi kelonggaran dalam hal bentuk dan pengaturan teknis masalah sosial-politik, bentuk dan susunan negara tidak wajib, yang penting bagaimana mengamalkan nilai-nilai ajaran agama itu

sendiri dalam sebuah negara. Dengan kata lain, demokrasi dalam sebuah negara dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, dan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi itu sendiri.

3. Pemikiran tentang hubungan Islam dengan demokrasi, terletak pada adanya prinsip-prinsip Islam tentang keadilan (al-‘adâlah), kebebasan dan persamaan (al-musâwa), serta menjunjung tinggi musyawarah (al-syûrah). Bagi Islam, demokrasi dalam sebuah negara dapat terwujud bila seorang penguasa menegakkan keadilan. Islam juga mengajarkan untuk memperlakukan semua warga negara (rakyat) secara sama, dengan tidak pandang bulu di muka hukum. Yang terakhir adalah bahwa Islam menganggap musyawarah sebagai sistem dan mekanisme yang transparan dalam kontrol kekuasaan pertanggungjawaban penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- . Dialog Keterbukaan, Jakarta: Paramadina, 1998.
- . Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Arab Indonesia, Cet. IV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Qur'ân al-Karîm.
- Azhar, Muhammad. Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Berdasarkan Turunnya Wahyu, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci alQur'an, 1992.
- Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I. Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1985.
- Pulungan, J. Suyuthi. Prinsip-prinsip Piagam Madinah, Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm: Tafsir atas Surat-surat Pendek

Syazadli, Munawir. Islam dan Tata Negara, Cet. I; Jakarta: UI Press, 1993.

BAB 8

CORAK POLITIK SUNNI DAN SYI'Ī

Oleh: Shahirman

Sebelum lebih jauh membahas bagaimana kontrak sosial dalam pemikiran politik kiranya perlu diungkapkan sejarah pelaksanaan kontrak sosial dalam Islam dan kiranya sejarah itu dapat terlihat semenjak pembangunan Negara Madinah. Pembangunan tersebut diawali dengan adanya peristiwa *bai'ah Aqobah* pertama dilanjutkan dengan *bai'ah Aqobah* kedua yang kemudian melahirkan perjanjian Madinah. Dalam perjanjian yang dikenal dengan Konstitusi Madinah tersebut, nabi tidak saja diakui sebagai *hakam* bagi masyarakat Madinah, tetapi juga sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat. Sebagai pemimpin tertinggi Negara Islam, kewenangan Nabi dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuatnya tersebut, Muhammad mencoba menerapkan hukum kesetaraan kedudukan dalam sebuah masyarakat, sehingga sebagai pemimpin ia tidak bisa memaksa masyarakat.

Menurut penulis tindakan tersebut tidak lepas oleh realitas politik saat itu, kekuatan politik yang Muhammad bangun tidak memungkinkan dia untuk menjadi pemimpin yang otokrat. Hal ini karena di saat Negara Islam berdiri di Madinah, pengikut Muhammad hanya 100 orang, baru setelah pada abad 5 H pasca membelotnya.

Corak Politik Sunni

Satu hal yang menarik diungkapkan oleh Rahman, berbagai macam kitab yang mengulas masalah teologi pada masa itu, kerap kali terdapat suatu bab khusus, yang biasanya ditempelkan pada bagian terakhir dari buku-buku mereka yang membahas pemikiran politik dalam Islam dengan nama *kitâb al-Imâmah*. (Rahman Zainuddin, 1995, 335). Ghilan al-Dimasyqi misalnya, (Muhammad ‘Abid al-Jabiri, 2003, 90-92). dalam suratnya kepada Umar ibn Abdul Aziz disamping ia menerangkan masalah iman ia juga menguraikan masalah imamah. Menurutnya imamah boleh dipegang oleh golongan luar selain suku Quraisy, karena setiap orang yang berpegang pada Qur’an dan Sunnah berhak atas imamah, dan imamah ditetapkan melalui konsensus umat. (Muhammad ‘Abid al-Jabiri, 2003, 90-92). Penamaan dengan kata *al-Imâmah* ini lebih umum dipakai oleh kalangan *Syi’i*. Pemimpin bukanlah berdasar sebuah suksesi pemilihan tetapi berada dalam sebuah garis warisan Ali. Abū Bakr dan Umar merupakan perampas kekuasaan sah, sehingga bagi kalangan *Syi’i*, kepemimpinan umat Islam di mulai dari Ali dan keturunannya. Hal ini kiranya menunjukkan bahwa penulisan ini merupakan upaya jawaban atas polemik dari kalangan *syi’ah*.

Menurut M. Nafis, salah satu upaya untuk menunjukkan kredibilitas pemerintahannya adalah dengan adanya pemanfaatan politik dengan menggunakan bahasa agama.

Pemanfaatan bahasa agama dalam pemerintahan ini sangat kuat, sehingga khalifah dianggap sebagai wakil dari kepercayaan Allah di muka bumi. (M. Nafis, 2009, 91-92). Dengan demikian, pergeseran konsep khilafah yang dilakukan oleh Umayyah semakin dikembangkan oleh Dinasti Abasiyyah, sehingga konsep khilafah Allah menunjukkan klaim bahwa kekuasaan Abasiyah didirikan oleh otoritas Tuhan dan bukan merupakan pilihan rakyat. dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran ini mendapat pengakuan dari intelektual Sunni. Namun, demikian, di samping pengukuhan otoritas kekuasaan dengan memakai trem-trem agama, Abasiyyah tetap mengukuhkan legitimasinya dengan melalui *al-Bai'ah al-Āmmah* sebagai simbol dari dukungan rakyat. Kenyataan ini menurut Nafis, menunjukkan bahwa kekuasaan yang dianut oleh Abasiyyah memiliki corak teokratis-Absolut sekaligus berwajah populis-demokratis. (M. Nafis, 2009, 91-92).

Di sisi lain perumusan sistem politik kenegaraan Islam dicoba dilakukan oleh penguasa Islam saat itu. Sejak penguasa pertama Umayyah, pelbagai pembaharuan dalam sistem pemerintahan dengan mengenalkan sistem suksesi kepemimpinan baru dengan melalui pengangkatan dan pemilihan secara terbatas. (Jurji Zaidan, 132) Rakyat tidak lagi masuk dalam pergulatan kepemimpinan Islam, namun hanya orang-orang yang terpilih dan memiliki kapabilitas yang dapat mengusulkan naiknya seorang pemimpin. Di kemudian hari prinsip ini semakin mapan dalam pemerintahan Islam dengan

menjelma dalam *Ahll al-Halli wal 'Aqdi* Naiknya Abasiyyah sebagai penguasa Islam semakin memapankan konsep-konsep tersebut, bahkan Abasiyyah bergerak lebih jauh dari Umayyah dengan mengembangkan pelbagai ide tentang hak suci dan hak absolut kepemimpinan Islam yang dapat mengukuhkan legitimasi kekuasaan Abasiyyah. Dimensi- dimensi keagamaan pada otoritas kepemimpinan Abasiyyah pada gilirannya memperkuat tampilan-tampilan pemerintahan yang dekat agama.

Bersamaan dengan hal tersebut, berkembang secara pesat sebuah sistem pendidikan hellenisme di Abasiyyah. (W. Montgomery Watt, 1985, hlm. 37). Pengaruh ini, secara sosiologis dapat diterima secara logis, kedekatan geografis dan keterkaitan dengan Persia menyebabkan mudahnya pengaruh hellenistic masuk dan berkembang pada masa ini. Di sisi lain, sekte Muktazilah mulai menancapkan kuku “kekuasaannya” dalam Istana, sehingga obor rasionalisme semakin berkembang pesat dan puncaknya pada kekuasaan al-Makmun, Muktazilah menjadi aliran resmi kerajaan. (W. Montgomery Watt, 1985, hlm. 38).

Pandangan Sunni tentang Penataan Negara

Yuris pertama adalah Imam Abu Yusuf (w.187 H), disamping menyusun teori pendistribusian keuangan negara, ia juga mengungkapkan tentang teori keabsolutan kekuasaan khalifah, meskipun hanya sepersepuluh dari karyanya, *Kitab al-*

Kharaj. Ia dianggap oleh para intelektual Sunni sebagai seorang intelektual Sunni, meskipun keberadaannya di Abasiyyah jauh sebelum paham Sunni berkembang. Dia diangkat sebagai kepala pengadilan di Baghdad pada masa al-Mahdi dan terus berlanjut hingga akhir kekuasaan Harun ar-Rasyid.

Menurutnya sebagaimana yang dikutip oleh Nafis, bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan dan kekuasaan tersebut diberikan sebagian kecil kepada hamba-hambanya. Karena itu, khalifah merupakan hasil pancaran dari kekuasaan Tuhan, sehingga ia memiliki kewajiban yang harus menunaikan amanah tersebut sebaik-baiknya, sedangkan rakyat wajib menaati seluruh kebijakannya. (M. Nafis, 2009, 92). Kenyataan ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf sebagai ketua pengadilan telah gagal dalam mengupayakan keselarasan antara penguasa dan rakyat, sehingga ia tidak saja mengantisipasi adanya kemungkinan khalifah berbuat zalim. Namun, terlepas, dari gagalnya Abu Yusuf memperingati khalifah, secara politis kekuasaan Abasiyyah saat itu, sedang berada pada puncaknya, sehingga mereka berusaha mengukuhkan pelbagai legitimasi.

Setelah Abu Yusuf terdapat Abu Bakr Muhammad ibn al-Thayyib ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Qasim al-Baqillani al-Bisri, yang lebih populer dengan sebutan al-Baqillani. Seorang penganut imam Malik yang wafat pada 1030 M. Ia hidup bertepatan ketika kekuasaan Buwaihi mendominasi kekuasaan Abasiyyah. (Ilhamuddin, 1997. 13) Selain ahli teologi, ia juga merupakan ahli politik. Doktrin politiknya terdapat dalam

karyanya yang berjudul *al-Tamhid fi ar-Radd 'ala 'I- Mulhidah wa 'I-Rafidah wa 'I-Khawarij wa-'I Mu'tazilah*. (Ahmad Syafii Maarif, 1985. 23). Secara sekilas, kitab ini merupakan upaya difensif dari perkembangan pemikiran Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Di bawah pengaruh kebangkitan kekuatan Syiah yang mulai berkembang, ia berusaha melacak metode tentang konsep imamah. (Ahmad Syafii Maarif, 1985. 23).

Dikatakannya, bahwa imamah merupakan hasil konsensus komunitas muslim, sehingga bila sistem penetapan tidak sah, maka sistem pemilihan menjadisah. Karena itu, ia menolak tentang legitimasi dengan adanya dua imam atau lebih pada waktu yang bersamaan. (Ahmad Syafii Maarif, 1985. 24-25). Oleh karena itu, dalam teori politiknya, al- Baqillani menekankan hanya ada satu khalifah, dan satu penguasa pemegang kedaulatan tertinggi.

Menurut penulis, pendapat ini dipengaruhi oleh perkembangan sosio politik yang berkembang pada saat itu. Makin merosotnya kekuasaan yang efektif di Abasiyyah dan naiknya kekuatan dan prestise lain menyebabkan adanya proses devaluasi, penurunan nilai terhadap otoritas khalifah. Karena itu, para legislator

Corak Politik Syi'ah

Adapun identitas itu sendiri adalah produk konstruksi secara sosial dan historis sehingga konstruksi identitas bersifat kontekstual. Proses konstruksi tersebut selalu berkaitan dengan

mayoritas Sunni, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Sunnisme di Indonesia tidaklah monolitik; paling tidak, ada tradisional dan modernis; moderat dan radikal. Hal ini telah mewarnai hubungan Sunni-syiah yang pada gilirannya mempengaruhi konstruksi identitas Syiah. Pada sisi lain, komunis Syiah juga bukanlah entitas yang monolitik; berdasarkan formasi historisnya komunitas Syiah terdiri atas keturunan Arab, kelompok kampus, dan alumni Qum (Zulkifli 2013).

Perbedaan yang paling mendasar antara Islam Syi'ah dan Sunni terletak pada persoalan *khilafah (imamah)*. Bagi Syi'ah *imamah* adalah suatu masalah penting dan prinsipil, karena merupakan bagian dari akidah dan mempunyai posisi sentral serta perwujudan dari *lutf* (anugerah) terhadap makhluk-Nya sebagaimana *Nubuwwah*. Adapun hal-hal prinsip dalam akidah Syi'ah adalah: Tauhid, *Nubuwwah*, keadilan ilahi, *imamah* dan hari kebangkitan. Sedangkan dalam Islam Sunni persoalan *imamah (khilafah)* tidaklah sepenuhnya ditolak, tetapi bukanlah suatu prinsip utama dalam agama (lebih bernuansa politis dan sosial. (Mutahhari, Murtadha. 1991, 7).

Di masa sebelum Islam, suku Quraisy merupakan salah satu *klan* bangsa Arab yang memiliki kedudukan terhormat di antara *klan-klan* lainnya. Kemuliaan dan kehormatan suku ini, selain karena mereka hidup di sekitar ka'bah, tempat tetap disucikan serta dijaga oleh mereka. Menurut Syed Amir Ali, pengawasan terhadap rumah suci ini merupakan pewarisan

secara turun temurun dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. (Ali, Syed Amir. 1978, 2).

Ketika Nabi saw. datang, kesakralan Bani Hasyim masih menyimpan kejayaan. Bahkan setelah kebangkitan Muhammad sebagai utusan Tuhan dan pemegang otoritas tertinggi di Arabia, berhasil membawa Bani Hasyim ke puncak kekuasaan, serta fakta yang diakui menyerahnya Abu Sufyan kepada Nabi ketika terjadi *Fath Makkah* (Penaklukan Makkah) (Jafri, 1989: 42). (M. Jafri, S. Husain. 1989, 38).

Nabi juga mengetahui betul adanya keterkaitan antara Nabi Ibrahim dan Ka'bah yang populer dan sangat mengakar. Orang Arab pada umumnya dan empat generasi pada khususnya. (M. Jafri, S. Husain. 1989, 38). Semua faktor yang dibicarakan di atas, adalah pangkal pembentukan latar belakang yang tidak dapat dipisahkan, hal mana masalah pergantian Nabi Muhammad harus dipertimbangkan, dan masalah ini tidak dapat hanya harus dipertimbangkan dan titik pandang masyarakat Arab abad ketujuh, karena umat Muhammad di waktu kematiannya terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang, nilai dan gagasan yang datang dari berbagai pelosok Arabiyah. Oleh karena itu, wajarlah jika bermacam-macam orang memandang masalah dari berbagai sudut pandangannya.

Pada masa sebelum Islam, suku Quraisy adalah salah satu bangsa Arab yang memiliki kedudukan terhormat di antara suku-suku lain. Kehormatan tersebut, karena mereka hidup di

sekitar Ka'bah, tempat ini tetap disucikan dan dipelihara oleh mereka dan merupakan pewarisan secara turun-temurun dari Nabi Ibrahim dan Ismail. (Ali, Syed Amir. 1978, 2). Di Madinah, sifat dan komposisi masyarakat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad (selanjutnya disebut Nabi saw.) tidak homogen, baik latar belakang kultural, tradisi maupun dalam institusi politik. Sikap dominan dan yang utama pada masyarakat Arab ialah kesetiaan pada suku atau *al-Ashabiyyah* (M. Jafri, S. Husain. 1989, 38). Bahkan bukan hanya ciri-ciri fisik yang ditentukan secara genetik tetapi mereka percaya bahwa kemuliaan pun diwariskan di dalam keturunan tertentu. Dengan kata lain, moral pun diturunkan secara genetik. (M. Jafri, S. Husain. 1989, 30).

Asumsi pertama mengisyaratkan bahwa status sosial seseorang ditentukan oleh status warganya, setiap anggota warga selalu menjelaskan sejumlah perbuatan masyhur para nenek moyang mereka. Orang Arab percaya bahwa selain karakteristik fisikal, karakteristik perilaku juga herediter. (Rahman, Budhi Munawar. 1995, 700). Bahkan menarik untuk dicatat bahwa *khalq* (karakteristik fisik) dan *khulq* (perilaku) ditulis sama dalam bahasa Arab (خلق). Perilaku yang menjadi tradisi suatu kabilah, dan menjadi kebanggaan anggota kabilah, lazim disebut dengan *Sunnah*. Di antara *Sunnah* yang paling dihargai adalah mengurus dan memelihara tempat-tempat suci. Bangsa Arab khususnya, Arab selatan pengurusanrumah suci (*bait*) dan kehormatan tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya,

sejak zaman jahiliyah orang Arab tidak mengenal pemisahan antara kepemimpinan temporal dan kepemimpinan sakral.

Maka kecenderungan inilah yang banyak mempengaruhi masyarakat kampus untuk mendalami cara berpikir ataupun pikiran- pikiran mereka, seperti Murthadha Muththahhari, Sayid Hosen Nasr, Thabaththaba'i, Ali Syariati dan Al-Jafri serta lainnya. Jika Syi'ah-Sunni dalam perspektif pemikiran Islam dipandang sebagai sebuah ijtihad, maka saling tuding dan saling menyalahkan serta menganggap paham dan pendapatnya yang paling baik dan benarpasti dapat dihindari. Sehingga dapat tercipta saling pengertian dan kerjasama yang baik antara penganut Syi'ah dan penganut Sunnisebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Syakh Mahmud Syaltutdan almarhum Ayatullah Bowjerdi Saleh seorang *Marja' Besar* Syi'ah. Oleh karena itu, perbedaan antara Syi'ah dan Sunni dalam perspektif Islam adalah sebagai sunnatullah yang tidak bisa dielakandan dihindari oleh siapa pun bahkan perbedaan-perbedaan itu akanmemperluas wawasan dan pengetahuan serta menjadi rahmat. Kalau disadari bahwa hasil dari sebuah pemikiran atau interpretasi, hasilnyaadalah rerlatif, maka dari itu, untuk hal-hal yang sifatnya relatif tidakboleh ada pemaksaan pendapat dan merasa dia paling benar, sebab kemutlakan kebenaran itu hanya milik Allah swt., tidak milik manusia biasa.

Biarkanlah Syi'ah-Sunni bergulir ber-*fastabiqulkhairaat* di dalam kehidupan sosial dan keummatan. Nanti sejarah yang akan menilai dan akan memfonis. Karena Syiah-Sunni adalah

kenyataan sosial dan sejarah (Mathar, 2005). Oleh karena itu, dalam dunia ilmiah, perbedaan pendapat dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa, yang tidak wajar adalah memaksakan satu pendapat kepada orang lain, sehingga kita tidak punya kewenangan untuk menyatakan pendapat kita yang paling benar, sementara selain kita adalah salah, maka sebenarnya kita telah mengambil kewenangan Allah sebagai penentu kebenaran.

Sejarah dan perkembangan Syiah di Indonesia padadasarnya adalah sejarah komunitas resistensi terutama pada era Orde Baru dan sekarang masih berlangsung bila berhadapan dengan kelompok anti-Syiah dari mayoritas Sunni. Komunitas Syiah sendiri menyebut kelompok anti-Syiah sebagai Wahabi atau Nasibi. Seiring dengan proses demokratisasi gerakan anti-Syiah semakin gencar dalam berbagai bentuk framing dan mobilisasi sumber daya. Di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi kekerasan sektarian terhadap penganut dan lembaga pendidikan Syiah. Puncaknya adalah deklarasi ANNAS (Aliansi Nasional Anti Syiah) di Bandung 20 April 2014 yang dipelopori oleh Athian Ali dan didukung oleh tokoh-tokoh anti-Syiah dari NU, Muhamadiyah, PERSIS, Al-Irsyad dan lain-lain. Kemudian berdiri cabang-cabang ANNAS di daerah-daerah. Gerakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yakni perseteruan pribadi, kepentingan politik, dan ekonomi, baik dari faktor domestik maupun internasional. Konflik Syria ikut mempengaruhi peningkatan sentimen anti-Syiah di Indonesia (IPAC 2016).

Namun, sikap moderat dari dua organisasi Islam NU dan Muhammadiyah dan tokoh-tokoh intelektual Muslim Indonesia terhadap Syiah sangat berpengaruh terhadap konstruksi identitas Syiah. Hasilnya adalah bahwa komunitas Syiah secara umum mengalami transformasi dari identitas resistensi ke project identity. Transformasi tersebut seiring dengan proses demokratisasi di Indonesia pada era reformasi dan gelombang perkembangan Syiah dari fase individual, institusional hingga fase organisasional.

1. Sifat dan komposisi masyarakat Arab ialah kesetiaan pada suku dan keturunan menjadi masalah penting dalam hal ini keturunan Bani Hasyim yang dikenal *Ahl al-Bait* yang terkait dengan Ibrahim dan ka'bah. Sejarah itu sangat berdampak pada masyarakat Arab. Oleh karena itu, tatkala nabi wafat terdapat kecenderungan untuk mendukung Ali (dari Bani Hasyim) sebagai akibat dari gagasan yang telah ada dari berbagai suku bangsa Arab yang bersama membentuk umat Muhammad di Madinah (kewarisan jabatan religius sekaligus politik) selain tentunya didukung oleh *nash* atau *wasiat*, yang kemudian melahirkan golongan Syi'ah dan pada gilirannya lahir golongan Sunni sebagai sebuah mazhab yang berbeda dengan Syi'ah.
2. Perbedaan itu selain karena perbedaan *nash* atau didalam memahami *nash*, juga terkait dengan sejarah bangsa Arab yang menjunjung tinggi primordial.

3. Penciptaan saling pengertian dan saling memahami dan upaya pendekatan Syi'ah-Sunni tanpa harus melakukan koreksi terhadap prinsip-prinsip dan akidah masing-masing, karena koreksi seperti itu adalah sia-sia belaka.
4. Buku-buku dan kitab-kitab, baik judul maupun isinya yang sengaja memicu terjadinya konflik internal sebaiknya tidak perlu diterbitkan atau dicetak ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Alam, Muhammad Hindi. t.th. *Dairah al- Maarif al-Islamiyah*. Jilid14.
- Ali, Syed Amir. 1978. *The Spirit of Islam*. Delhi: Idarah Adabiyah Amin, Ahmad. t.th. *Dhuhr al-Islam*. Cet. VII. Kairo: Mattabat Nah Dhat al-Misriah.
- Baqir, Haidar. 1994. *Satu Islam Sebuah Dilema*. Cet. III. Bandung: Mizan.
- Dep. Agama. 1994. *Alqur'an dan Terjemahannya*.
- Dewan Redaksi. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 5. Cet. III. Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibnu Fariq, Abu Husain. 1994. *Mu'jam al-Muqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Ilhamuddin, *Pemikiran Kalam al-Baqillani; Studi Persamaan dan Perbedaan dengan al-Asy'ari* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)
- Jurji Zaidan, *Tārīkh Tamaddun al-Islâmi, Jilid 1* (Beirut: Dar al-Hilal, ttp)
- M. Jafri, S. Husain. 1989. *Origin and Early Development of Syi'ah Islam*, diterjemahkan oleh Meith Keiraha dengan judul "*Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah*". Cet. I. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- M. Nafis, "Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kekhalifahan Abbasiyyah," Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 91-92. Tidak diterbitkan.
- Ma'luf, Louis. 1967. *Al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyrik
- Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Tragedi Intelektual; Perselingkuhan Politik dan Agama*, Terj. Zamzam Afandi Abdillah (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), hlm. 90-92. Menurutnya, karya dari Ghilan ini tidak dapat ditemukan lagi, sehingga pengetahuan mengenai pemikirannya ditemukan terserak-serak pada tulisan sejarah sekte, dan

salah satunya adalah surat yang dikirimkannya kepada Umar ibn Abdul Aziz.

Mutahhari, Murtadha. 1991. *Man and Universe*. Diterjemahkan oleh Satrio Pinandito dengan judul "*Imamah dan Khilafah*". Cet. I. Firdaus.

Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid II. Cet. II. Jakarta: UI Press.

Rahman Zainuddin, "Sejarah Pemikiran Politik Islam; Sebuah Upaya Kontekstual" dalam Tim Penyusun (ed.), *Kontekstualisasi ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. (Jakarta: IPHI & Paramadina, 1995)

Rahman, Budhi Munawar. 1995. *Doktrin Islam dan Peradaban*. Cet. II. Bandung: Mizan.

Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terj: Adang Afandi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm.236. Dalam sejarah Islam Indonesia, Peristiwa ini hampir serupa dengan yang dialami oleh para penguasa Pajang. Lihat M. Misbahuddin, "Konflik Islam Pesisir Vs Islam Pedalaman 1620-1636" Skripsi Fakultas Adab UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 46. Tidak diterbitkan.

Syirazi, Ayatullah Nasir Makarim. 1990. *Ma'rifat al-Imamah*, diterjemahkan oleh Musa al-Kadzim dan Syamsuri dengan judul "*Imamah*". Cet. II. Yayasan as-Sajjad

The Enciclopedia American International Edition. 1980 Volume 15 dan 24. Grolier International Inc.

The World Book Enciclopedia. 1998. Volume 10. U.S.A: Wordbook Inc.

W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Britain: Edinburgh, 1985), hlm. 37.

Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus*. Jakarta: PT. Hadiakarya

BAB 9
PARTISIPASI POLITIK, SOSIALISASI,
DAN ETIKA POLITIK ISLAM

Oleh: Idawati

Politik merupakan suatu rangkaian atas, prinsip, kejadian, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan tata cara melaksanakannya, di mana dalam setiap pelaksanaannya membutuhkan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*). Untuk mengatur membagi dan mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu adanya kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*Authority*) untuk menjalin kerjasama dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

Islam dan politik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, Islam tidak bisa terlepas dari peraturan-peraturan yang mengatur setiap urusan masyarakat dan negara, karena Islam adalah agama yang bukan sekedar mengatur tentang ibadah, akan tetapi lebih dari itu Islam mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, Islam merupakan agama yang cinta damai, menuntun masyarakat untuk hidup sejahtera, dan sentosa bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam dikenal dengan sebutan "*Rahmatan lil'alam*",

sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an, Surah Al-anbiya, ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Komunikasi politik merupakan sebuah aspek yang selalu dapat ditemui dalam setiap aktivitas politik. Sesuai dengan pandangan ini, studi komunikasi politik akan dapat dilihat melalui studi ilmu politik. Hal ini kurang disadari oleh banyak orang. Seluruh interaksi yang terjadi antara sesama anggota masyarakat dan elite politik disebut komunikasi politik Purreklolon, T. P. (2016).

Bentuk komunikasi politik Islam, dalam dunia Islam dimulai di Madinah sejak Nabi memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus sebagai *Da'i* (pemuka agama), Negara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah Islam adalah Madinah, pemerintahan Rasulullah pada saat itu dapat diamati bahwa pendekatan pemerintahan Rasulullah Saw tersebut menggunakan pendekatan, Normatif, dan Deskriptif Historis, yaitu menekankan kepada Alquran, dan hadits, serta bidang muamalah, terbukti keberhasilan pemerintahan Rasulullah di Madinah mengalami perubahan yang signifikan, ketika sebelumnya lemah dan tertindas, kini mereka menjadi kedudukan terhormat dan menjadi umat yang sangat kuat serta

mampu berdiri sendiri Muslimin, (2021). Tentang politik dalam Islam juga dijelaskan dalam Alquran, Surah Al-imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Partisipasi politik merupakan kegiatan warganegara yang bertujuan yang bertujuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun Pegawai Negeri. Sifat partisipasi politik ini sukarela bukan dimobilisasi oleh atau partai yang berkuasa Rahman, A. (2017).

Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan seorang warga negara dalam menentukan pilihannya, Namun, secara luas dapat dikatakan bahwa partisipasi dimulai dari tahap mengamati dan mengambil sebuah keputusan hingga

analisis kebijakan itu sendiri bahkan diharapkan langsung berperan pada tahap awal dalam pembuatan kebijakan hingga tahap akhir seperti analisis kebijakan. Namun, ada beberapa hal yang mempengaruhi partisipasi dalam politik seperti terpaan sosialisasi politik yang diterima masyarakat dan status sosial ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut Syarif, M. A. (2016).

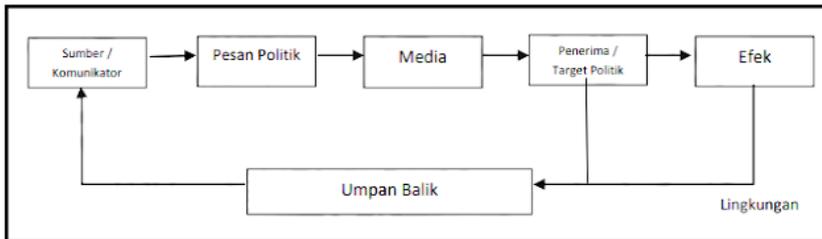
Tujuan dari komunikasi politik adalah menciptakan kesamaan pemahaman politik, seperti permasalahan, isu, kebijakan politik, antara suatu partai ke partai lainnya. Dalam hal ini juga partai politik bertujuan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam politik, bisa juga diartikan sebagai sebuah bentuk keiatan warga negara yang bertindak baik secara pribadi maupun kolektif dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah secara spontan. Komunikasi politik juga memiliki tujuan untuk mensosialisasikan politik kepada seluruh masyarakat agar mampu memberikan perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan masyarakat proses belajar pemahaman tentang politik.

Jika kita lihat DiIndonesia banyaknya terjadi kasus-kasus bahwa Pemerintah kurang menjalankan komunikasi politik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara politis, daerah hanya dijadikan sebagai objek untuk menerima beban, tanpa pernah bisa mengembangkan kreasi dan inovasi dari daerah hal ini dapat dilihat dari sumber APBD sebagian

besar ditanggung oleh APBN, sedangkan sebagian besar kekayaan daerah diambil oleh pusat dengan bagian yang merata.

Untuk itu sangat penting mensosialisasikan komunikasi politik dalam menangani kasus-kasus politik, pembinaan dan atau mengaktifkan komunikasi politik antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat. Karena komunikasi politik merupakan salah satu senjata ampuh, dalam mengatur, mengoordinasikan, mensinkronkan lembaga negara secara vertikal maupun horizontal. Sosialisasi komunikasi politik yang paling penting bertujuan untuk mengalirkan informasi baik dari atas kebawah maupun sebaliknya dengan demikian akan terjadi proses saling memahami antara negara/Pemerintah dan masyarakat Supriyatno, Y. (2011).

Dalam proses sosialisasi komunikasi politik, penting memahami unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi politik, sebagaimana unsur tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 01: Unsur Komunikasi Politik

1. Sumber/Komunikator adalah: semua peristiwa komunikasi yang terjadi melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi, misalnya partai, lembaga atau

organisasi. Sumber sering juga disebut sebagai pengirim pesan politik atau (komunikator politik).

2. Pesan Politik adalah: Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah suatu informasi politik yang disampaikan pengirim kepada penerima, isi dari pesan tersebut berupa informasi, pengetahuan, nasihat, atau propaganda politik
3. Media adalah: media yang dimaksud disini adalah alat/sarana yang digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber kepada penerima.
4. Penerima adalah: pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber, penerima bisa berbentuk, orang perorangan, kelompok, negara, atau partai, penerima adalah elemen yang paling penting dalam komunikasi, karena penerima adalah sasaran komunikasi tersebut.
5. Efek atau pengaruh adalah: perbedaan antara apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh sipenerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada sikap, tingkah laku, dan pengetahuan. Oleh sebab itu pengaruh juga dapat diartikan sebagai perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, tindakan, sikap, seseorang sebagai akibat dari penerimaan isi pesan.
6. Umpan Balik/tanggapan balik adalah: umpan balik merupakan salah satu bentuk pengaruh yang berasal dari penerima. Sebenarnya umpan balik juga berasal dari unsur

lain seperti media dan pesan, meskipun pesan belum sampai pada penerima, seperti terdapat gangguan sebelum sampai ketujuannya.

7. Lingkungan adalah: salah satu unsur komunikasi, lingkungan merupakan faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi, adapun faktor lingkungan tersebut, psikologis, lingkungan sosial budaya, lingkungan fisik, dan dimensi waktu Pureklolon, T. P. (2016).

Untuk itu dalam sosialisasi komunikasi politik unsur diatas sangat diperlukan untuk mencapai sebuah keberhasilan politik terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam komunikasi politik.

Secara sederhana komunikasi politik merupakan komunikasi yang berhubungan dengan pesan politik dan aktor politik, atau melibatkan kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah, dengan demikian komunikasi politik sebagai sebuah ilmu terapan, dan dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi antara yang merintah, dengan yang diperintah, yang bertujuan untuk saling mempengaruhi, sehingga masalah yang dihadapi dapat mengikat seluruh warganya pada sanksi yang ditetapkan secara kolektif oleh lembaga-lembaga politik Alfikri, M. (2022). Edukasi politik sangat penting diberikan terhadap masyarakat, di mana edukasi ini bertujuan untuk melakukan usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik terhadap masyarakat sehingga mereka dapat memahami dan menhayati nilai-nilai

yang terkandung dalam suatu sistem politik secara ideal yang ingin dibangun dan diwujudkan Adiwidjaja, I.

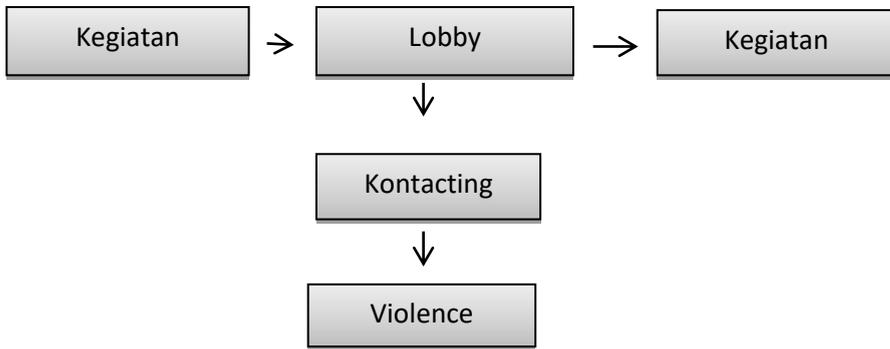
Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai bentuk sebuah kegiatan mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala bentuk kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai bagian bentuk kegiatan partisipasi politik. Partisipasi politik juga merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Karena partisipasi bisa bersifat individu dan kolektif, terorganisir maupun spontan Arniti, N. K. (2020).

Secara harfiah partisipasi politik berarti keikutsertaan dalam konteks politik yang mengacu kepada keikutsertaan warganegara dalam berbagai proses politik. Dalam hal ini partisipasi politik merupakan kegiatan yang berusaha untuk mempengaruhi keputusan diberbagai kegiatan politik. Keikutsertaan dalam proses politik bukan hanya sekedar memberikan dukungan terhadap sebuah keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpinnya, akan tetapi merupakan sebuah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi

pembuatan keputusan pemerintah. Keterlibatan warga negara dalam semua tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Bentuk partisipasi: adapun bentuk-bentuk partisipasi politik adalah:



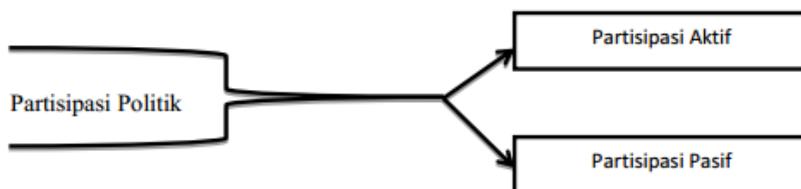
Gambar 03: Bentuk Partisipasi Politik

1. Kegiatan pemilihan yaitu: kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi cari legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby: yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan organisasi: yaitu partisipasi individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

4. **Kontacting:** yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. **Violence (Tindakan kekerasan),** yaitu tindakan individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia, atau harta benda, termasuk, huru-hara, teror, pembunuhan politik, revolusi dan pemberontakan.

Anggota masyarakat dalam hal ini perlu mengambil bagian atau berpartisipasi dalam berproses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, F., Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). Dengan kata lain setiap anggota masyarakat wajib tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sudah seharusnya terlibat dalam proses pembangunan terutama pembangunan bidang politik.

Bentuk partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu:



Gambar 03: Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi aktif yaitu: mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah,

mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemerintah.

Sedangkan partisipasi pasif: berupa kegiatan-kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan apa yang menjadi sudah menjadi keputusan pemerintah Subekti, T. (2014).

Etika Politik Islam

Membahas tentang kegiatan politik, maka sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan etika berpolitik, budaya politik senantiasa pembinaan nilai-nilai normatif dan perwujudan cita-cita, adapun cita-cita etika politik yaitu, untuk mewujudkan ruang kebebasan berpendapat dan terbentuknya institusi pemerintah yang adil. Dalam etika politik Islam diimplementasikan dalam kepemimpinan Rasulullah di Madinah yang menunjukkan suatu puncak keberhasilan yang gemilang. Terwujudnya pemerintahan yang adil, dan inilah yang merupakan buah dari cita-cita etika politik Islam yang diterapkan Rasulullah selama menjadi pemimpin politik Madinah.

Dalam realitas politik menunjukkan tidak sedikit praktek-praktek yang tidak terpuji dilakukan oleh para politikus untuk mencapai tujuan politiknya, praktek Machiavellisme suatu politik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya, praktek ini merupakan praktek yang melanggar asas-asas dari etika politik. Di mana menurut Ibnu khaldun sistem

politik dengan kekuatannya dan otoritas yang dimilikinya yang sangat besar haruslah berlandaskan prinsip-prinsip yang religius (etika) yang direfleksikan dari etika politik dalam akhlak dan kejujuran dakwah Rasulullah Saw.

Islam merupakan agama yang syarat muatan dengan politik, hal ini dijelaskan oleh Antony Black menerangkan bahwa politik Islam menerangkan mulai masalah etika berpolitik, filsafat politik, agama, hukum, hingga tata negara, Black juga menjelaskan bahwa kanzah pemikiran politik Islam itu bermuara pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara.

Islam juga mengajarkan bagaimana hendak menegakkan konsep-konsep politik dalam Islam, terdapat dalam Alquran, surah Al-Maidah, Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَلَا تَعْدِلُوا ۚ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya dijelaskan kembali dalam surah Annisa Ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat diatas menjelaskan bahwa suatu alasan yang kuat bukan suatu alasan jika kita bepolitik secara praktis, ketika dikaitkan dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip bepolitik, baik sosialisasi politik, partisipasi politik, agitasi dan propaganda politik, merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan untuk melakukannya selama masih dalam konteks etika-etika bepolitik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Akbar, A. (2013). *“Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan mulut (perkataan, kritik nasehat), Namun, apabila tak mampu melakukannya maka lakaukan dengan hati, agar tidak melakukan kemungkaran tersebut, itu adalah merupakan tingkatan iman yang paling rendah”*.

Propaganda politik dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah dan *Khalifah*. Tentang siapa yang akan menjadi

Khalifah, siapa yang berhak menjadi pemimpin(khalifah) setelah Rasulullah SAW setelah wafat, mengingak posisi Rasulullah pada saat itu selain menjadi pemimpin beliau juga sebagai seorang Rasul, pada saat itu propaganda dimasa Rasulullah diatur sangat tegas tentang sistem pergantian *khalifah*, perilaku berbohong banyak terjadi bahkan saat Rasulullah masih hidup diancam masuk neraka bagi orang yang berbohong atas nama Nabi Alkadri, A. (2021).

Melihat fenomena yang berkembang, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia yang sedang berlangsung masih menyentuh lapisan kehidupan masyarakat yang menggetirkan, denyut reformasi yang lebih menampakkan diri dalam bentuk formalitas yang belum menyentuh relung kehidupan publik yang faktual. Bahkan, sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, lebih tepatnya berseberangan dengan nilai-nilai moral.

Sebagai seorang politisi sesungguhnya jangan seperti istilah politisi rabun ayam, yang diistilahkan oleh Syafii Maarif, yang hanya mau melihat yang dekat-dekat, yang langsung menyangkut kepentingan jangka pendek mereka, sedikitpun tidak risau terhadap kondisi bangsa dan masyarakat yang memprihatinkan dan porak poranda, serta kondisi krisis yang terjadi, penegakkan hukum yang penuh sandiwara dan demokrasi yang kebablasan, dan sebagian dari mereka terlibat dalam carut marut kehidupan politik tersebut.

Etika dan moral begitu terlihat sangat memudar dalam dunia politik Indonesia yang berkembang saat ini, bahkan nyaris semua proses demokratisasi telah terpingkas dari makna dan nilainya yang bersifat moral A'la, A. (2005).

Partisipasi dan Pandangan Islam Tentang Sosialisasi, partisipasi politik, agitasi dan propaganda Mengacu Kepada Etika Politik Islam. Bahwa:

1. Partisipasi politik berarti keikutsertaan dalam konteks politik yang mengacu kepada keikutsertaan warganegara dalam berbagai proses politik. Dalam hal ini partisipasi politik merupakan kegiatan yang berusaha untuk mempengaruhi keputusan diberbagai kegiatan politik.
2. Pandangan Islam Tentang Sosialisasi, partisipasi politik, agitasi dan propaganda Mengacu Kepada Etika Politik Islam:

Dalam etika politik Islam diimplementasikan dalam kepemimpinan Rasulullah di Madinah yang menunjukkan suatu puncak keberhasilan yang gemilang. Terwujudnya pemerintahan yang adil, yang merupakan cita-cita etika politik Islam yang diterapkan Rasulullah selama menjadi pemimpin politik Madinah.

Propaganda politik dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah dan *Khalifah*. Propaganda pada masa ini diatur sangat tegas tentang sistem pergantian *khalifah*, perilaku propaganda yang mengandung kebohongan saat Rasulullah

masih hidup diancam akan masuk neraka bagi orang yang berbohong atas nama Nabi.

Sebagai seorang politisi sesungguhnya jangan seperti istilah politisi rabun ayam, yang hanya mau melihat yang dekat-dekat, berdasarkan kepentingan para politikus, sehingga politik saat ini dinilai carut marut, kondisi masyarakat dalam krisis dan porak poranda, hal ini tidak menjadi bagian dari perhatian para politikus, posisi penegak hukum penuh sandiwara.

Etika dan moral begitu terlihat sangat memudar dalam dunia politik Indonesia yang berkembang saat ini, bahkan nyaris semua proses demokratisasi telah terpangkas dari makna dan nilainya yang bersifat moral.

DAFTAR PUSTAKA

Alfikri, M. (2022). *Pengantar Komunikasi Politik Islam* (Vol. 1). Academia Publication.

Adiwidjaja, I. *SISTEM POLITIK INDONESIA*. Zahir Publishing.

Muslimin, (2021) *Komunikasi Islam*, Amzah, Imprint Bumi Aksara, Jakarta

Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Shahreza, Mirza. "Pengertian Komunikasi Politik." (2018).

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.

A'la, A. (2005). Carut Marut Politik, Tantangan Pengembangan Teologi Politik Substantivistik. *Unisia*, (57), 226-236.

Alfiyani, Nur. "Media sosial sebagai strategi komunikasi politik." *Potret Pemikiran* 22.1 (2018).

- Alkadri, A. (2021). PROPAGANDA POLITIK DALAM ISI KANDUNGAN HADIS HADIS PALSU. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 68-85.
- A'la, Abd. "Carut Marut Politik, Tantangan Pengembangan Teologi Politik Substantivistik." *Unisia 57* (2005): 226-236.
- Akbar, A. (2013). KONSEP POLITIK DALAM ALQUR'AN. *Journal Analytica Islamica*, 2(1), 141-156.
- Barata, Mariam Fatima, and Melvin Bonardo Simanjuntak. "Strategi Publisitas dan Propaganda Politik (Studi pada Kandidat Presiden & Wakil Presiden, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin)." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 23.2 (2019): 135-154.
- Djuyandi, Yusa. "Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum." *Humaniora* 5.2 (2014): 1202-1212.
- Manurung, Hambali Nanda, and Tri Joko Waluyo. "Peran Sosialisasi Politik Dalam Perolehan Suara Partai." *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 10.2 (2012).

Malik, Abdul. "Agitasi dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar Netizen terkait Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama)." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4.3 (2016).

Rahman, A. (2017). Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Pemula. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN, 2598, 5973*.

Syarif, M. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota 2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. *E-Journal Pemerintahan Integratif, 4(4), 547-561*.

Supriyatno, Y. (2011). Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(2), 1-11*.

Sartika, Rika. "Sosialisasi Politik Dalam Meningkatkan Kecapakan Partisipatoris Pemilu Pemula." *SOSIETAS* 1.1 (2011).

Subekti, T. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan*

Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)
(Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Tahir, Rahman, Heri Kusmanto, and Muryanto Amin.
"Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden
Tahun 2019." *PERSPEKTIF* 9.2 (2020): 236-251.(S.3)

Utomo, Langgeng Budi. "Kesenian Reyog Ponorogo Sebagai
Sarana Agitasi Politik (Kajian Sejarah Politik Kesenian di
Kabupaten Ponorogo Tahun 1959-1965)." (2011).

Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah,
F., Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). Peran
kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap
partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9(2), 94-
99.

Zakiyuddin, Ahmad. "TEKNIK TEKNIK PROPAGANDA
POLITIK JALALUDIN RAKHMAT." *Jurnal Academia
Praja* 1.01 (2018): 39-58.

ALQURAN ONLINE:

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

<https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat.159-html>

<https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>

<https://tafsirweb.com/5619-surat-al-anbiya-ayat.107-html>

BAB 10
KOMUNIKASI PARTAI POLITIK ISLAM
DAN NASIONALISDI INDONESIA
PADA MASA ORDE BARU

Oleh: Saidi

Dinamika komunikasi partai politik Islam dan Nasionalis pada masa Orde Baru dapat diartikan sebagai dinamika konflik dalam masyarakat, yang terjelma dalam partai politik, Ormas atau bahkan antar partai politik seperti dekade 1950-an dan puncaknya tragedi berdarah tahun 1965. Dapat pula dikatakan bahwa dinamika komunikasi politik merupakan keseluruhan proses kehidupan politik untuk mempertinggi mutu keputusan-keputusan bersama sebagai bangsa. (M. Din Syamsuddin, 38-39: 2022).

Dapat dipastikan bahwa pada umumnya negara di dunia yang tidak menetapkan pemilihan umum sebagai bagian dari program pembangunan politiknya. Karena itu setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pemerintah menetapkan bahwa, pemilu merupakan program yang harus dilaksanakan. Namun, keinginan itu baru terlaksana setelah 10 tahun kemudian, yakni pada tahun 1955.

Keinginan yang sama juga berlangsung setelah kelahiran Orde Baru tahun 1966 melalui TAP /MPRS No_ XI /1966. Tapi rencana tersebut baru terlaksana tiga tahun kemudian, pada tanggal 5 Juli 1971 sebagai pemilu pertama Orde Baru atau

kedua paaca kemerdekaan. Semenjak itu secara periodik pemilu dapat diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, dan kini terasa semakin melembaga (Ramly Hutabarat, 197: 2024).

Pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru sebenarnya lebih merupakan mobilisasi massa dan belum menunjukkan bentuk partisipasi rakyat. Bahkan diselenggarakan dalam suasana yang kurang demokratis seperti muncul berbagai kecurangan dan ketidakadilan. Karena itu, tidak mengherankan jika Golkar selama lima pemilu terakhir ini selalu menang mutlak atau menjadi mayoritas tunggal. Kemenangan Golkar itu pada mulanya diawali dari kondisi psikologis pasca tragedi berdarah tahun 1965 yang ikut menentukan perkembangan politik Indonesia selanjutnya.

Ditambah dengan pelaksanaan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), popularitas dan dukungan terhadap presiden Soeharto, depolitisasi dan restrukturisasi politik, keterikatan birokrasi sipil dan ABRI terhadap Golkar. (<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/17626>)

Perubahan dan perkembangan itu akan menjadi masukan, pertimbangan dan bahan kajian bagi perumusan kebijaksanaan publik. Miriam Budiarjo, 35: 2028) memaparkan adapun pertanyaan utama dalam makalah ini adalah bagaimana komunikasi partai politik Islam dan nasionalis di Indonesia pada masa Orde Baru ? Ciri utama Orde Baru yang digunakan sebagai alasan politik dalam membangun bangsa Indonesia adalah:

Pertama, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan. Setting asas tunggal ini telah melegalkan dan memperkuat hegemony party sistem, yang menjadi tujuan politik Orde Baru, yaitu Golkar. Alasan rasional dari hegemony party sistem untuk meredakan konflik ideologi. *Kedua*, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia atau identik dengan membangun stabilitas nasional atau stabilitas politik sebagai landasan pembangunan ekonomi. *Ketiga*, melaksanakan proses pembangunan yang sering disebut sebagai jargon pembangunanisme atau “pembangunan yes dan politik no”.

Era orde baru ditandai dengan mulai berkuasanya Soeharto di tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Kehidupan partai politik di masa orde baru ditandai dengan berbagai usaha penguasa untuk mengurangi jumlah dan peran partai politik di parlemen, di kabinet dan dalam aktivitas akar rumput. Untuk membesarkan golongan karya, penguasa orde baru memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dukungan peraturan perundangan dan didukung oleh militer untuk menindas partai-partai politik yang menjadi pesaing politik Golongan Karya agar kalah dalam Pemilu.

Selain itu penguasa orde baru melalui Ali Murtopo mengusulkan RUU pemilu tahun 1967 kepada parlemen yang intinya menguntungkan Golongan Karya dan ABRI, yakni pemakaian sistem pemilihan distrik, ABRI mendapatkan kursi di DPR tanpa ikut Pemilu dan menjadikan Pancasila sebagai satu-

satunya asas partai dan ormas. Namun, usul Ali Murtopo tersebut mendapat tentangan keras dari partai politik, Namun, tetap diperoleh kesepakatan pada tahun 1967 yakni penggunaan sistem pemilu proporsional dan presiden berhak mengangkat 100 kursi Parlemen dengan komposisi 75 ABRI dan 25 non-ABRI. Kemudian Soeharto diangkat jadi presiden tanggal 27 Maret 1968 dan Pemilu ditunda menjadi tahun 1971.

Dampak dari Undang-Undang tersebut Indonesia hanya memiliki 3 partai politik: 1). Golongan Nasionalis terdiri dari Partai Katolik, Parkindo, PNI, IPKI dan Murba Bersatu dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 2) Golongan Spritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti bersatu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 3) Golongan Karya.

Menurut Deliar Noer, (66-71: 2000) pemakaian asas tunggal Pancasila menimbulkan masalah, yakni: 1) Menafikan adanya perbedaan paham dalam masyarakat; 2) Menghalangi orang yang satu paham berkelompok memperjuangkan pahamnya; 3) Menafikan hubungan antara agama dan politik—sekulerisasi; 4) Mengandung kecenderungan kearah partai tunggal; 5) Menghalangi berkembangnya paham-paham yang bersumber agama dalam kegiatan politik. Setelah pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 Golkar selalu mendapatkan suara di atas 50% di setiap pemilu, sedangkan PPP dan PDI tidak banyak memperoleh suara secara nasional maupun lokal.

Partai politik di era orde baru tidak dapat mengembangkan dirinya secara optimal disebabkan berbagai rekayasa oleh

penguasa. Ada pun kondisi PDI di masa Orde Baru menurut Abdul Majid (77: 1998) antara lain: 1) Tidak mendapat kesempatan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesadaran politik dan kesadaran ideologi rakyat; 2) Kehilangan otonomi untuk mengatur rumah tangga sendiri; 3) Kehilangan kemerdekaan memilih pemimpin sendiri; 4) Tidak mampu melakukan pengawasan secara teliti dan objektif terhadap pelaksana pemerintahan; 5) Mengalami hambatan dan sumbatan dalam melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan anggota dengan sewajarnya dalam tubuh sendiri. Langkah untuk menyederhanakan partai-partai politik adalah dengan menyatukan semua partai menjadi tiga fraksi di DPR. Pertama, F-PP yang terdiri dari empat partai politik Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Kedua, F-DP yang terdiri dari PNI, Parkindo, partai Katolik, IPKI dan Murba. Ketiga, F-KP yang terdiri dari Golkar dan anggota Golkar yang ditunjuk.

Di samping itu, masih ada fraksi lain yaitu fraksi ABRI, fraksi non-politik. (Miriam Budiarjo, 1996).

Menurut pandangan M. Din Syamsuddin (62: 1996) Tujuannya untuk mengalihkan rakyat dari konsentrasi ideologis dan politis. Kebijakan floating mass ini secara serius sangat berpengaruh terutama terhadap PPP. Setelah mampu memecah suara umat Islam Indonesia terhadap partai-partai Islam, pemerintah Orde Baru mulai merubah sikap dan kebijakannya terhadap partai-partai Islam menjadi politik akomodatif (1985-1998). Apalagi setelah berdirinya ICMI dan MUI. Namun,

sebenarnya, pemerintah Orde Baru hanya ingin mengeksploitasi Islam dan umat Islam Indonesia sebagai alat untuk mencapai agenda politiknya.

Din Syamsuddin menyatakan bahwa eksekusi dari fusi tersebut terhadap keberadaan partai Islam, berimplikasi pada dikotomi politik Islam dan non politik Islam. Tujuannya adalah: pertama, dengan format kepartaian baru, maka PPP memiliki kekuatan masa Islam menghadapi dua lawan utama, yaitu Golkar dan PDI. Kedua, adanya usaha sistematis untuk memecah belah politik Islam, karena “fusi artifisial” tidak akan pernah membawa persatuan. Ketiga, fusi juga mengandung arti domestikasi politik Islam. Esensi dari domestikasi adalah agar partai Islam dapat menyesuaikan dan atau dibuat sesuai dengan kehendak dan kebijakan penguasa.

Dari enam kali pelaksanaan pemilu, mayoritas perolehan kursi parlemen dikuasai Soeharto. Pemilu 1971, Golkar + Fabri + Parmusi menguasai 78,5% kursi di DPR. Pemilu 1977, Golkar + Fabri menguasai 72,17% kursi di DPR. Pemilu 1982, Golkar + Fabri menguasai 74,80% kursi di DPR. Pemilu 1987, Golkar + Fabri menguasai 79,80% kursi DPR. Pemilu 1992, Golkar + Fabri menguasai 76,40% kursi di DPR. Pemilu 1997, sebagai pemilu terakhir rezim Orde Baru, Golkar minus Fabri menguasai 74,51% kursi di DPR.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari membaca sistem dan hasil pemilu selama Orde Baru menunjukkan bahwa rezim Orde Baru adalah rezim dengan bentuk pemerintahan

otoritarian, dengan menggunakan hukum, undang-undang, peraturan dan partai politik sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Kenyataan ini cukup relevan dengan pandangan Donald K. Emerson, sebagaimana dikutip Bachtiar Effendy (45-46: 1998) yang mengidentifikasi pola perjuangan umat Islam era 1980-an telah menggunakan pendekatan kultural (Islam kultural) setelah gagal dalam menggunakan pendekatan politik (Islam politik).

Di akhir kekuasaan rezim Soeharto, pendekatan kultural yang sifatnya sementara, terjawab dengan lahirnya berbagai tipologi partai Islam dan atau aktivitas politik parsial, yang diprakarsai oleh cendekiawan Muslim, seperti K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Nurcholis Madjid, M. Amin Rais, yang tetap melegitimasi Islam politik. Sehingga fenomena Islam kultural atau paralelisme hanyalah suatu cara atau agar lebih rasional dikatakan sebagai metode ilmiah untuk aktualisasi peran umat Islam dalam negara pada masa Orde Baru, karena situasional. Para analis mengistilahkan PAN dan PKB sebagai partai Islam tanpa ideologi Islam. Dalam tipologi pemikiran politik Islam, PAN dan PKB masuk dalam golongan Islam substantif (M. Syafi'i Anwar 155-157: 1995).

Komunikasi Partai Politik Islam dan Nasionalis di Masa Orde Baru

Tidak ada seorang pun yang dapat menafikan bahwa umat Islam memainkan peranan yang sangat besar dalam

menghancurkan kekuatan komunis di Indonesia dan sebagai salah satu komponen penagak Orde Baru yang sangat utama.

Meriam (Budiarto, 1988) menyatakan bahwa hubungan yang mulai membaik antara Angkatan Darat dan Islam pada masa transisi menuju Orde Baru sedikit demi sedikit semakin melemah, bahkan di dalam perjalanan selanjutnya dilandasi oleh hubungan yang saling mencurigai dan tidak jarang diwamai oleh konflik. Khusus usaha rehabilitasi Masyumi dan pembentukan pimpinan Partai Muslim Indonesia sebagai alternatif dari Masyumi merupakan contoh yang sangat konkrit.

Ketika Partai Muslimin Indonesia (PMI) "untuk pertama kalinya hendak mengadakan Mukhtar di Malang pada tahun 1968, peserta Mukhtar tampaknya sudah sepakat untuk memilih Mr. Muhammad Rum sebagai Ketua Umum Partai yang baru tersebut, akan tetapi pihak Angkatan darat keberatan dengan Mr. Muhammad Rum karena beliau merupakan tokoh Masyumi yang masih sangat berpengaruh.

Sebagai jalan keluar yang terbaik pada waktu itu adalah Kongres memilih Djamawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Muslimin. Keduanya berasal dari Muhammadiyah yang merupakan komponen yang terbesar dari partai tersebut. Akan tetapi dalam waktu yang tidak lama kepemimpinan Djamawi-Lukman Harun tidak dapat bertahan dengan baik. Pihak pemerintah tampaknya kesulitan untuk menerima kedua tokoh tersebut karena dianggap keras sekali dan tidak akomodatif.

Atas rekayasa dari pihak opus yang dipimpin oleh Ali Murtopo Kepemimpinan partai tersebut diambil oleh Jaelani Naro dan Imran Kadir yang menimbulkan konflik internal dalam tubuh partai. Sehingga akibatnya pemerintah kemudian menunjuk MHS Mintareja sebagai Ketua Partai Muslimin." Ketika menghadapi Pemilihan Umum 1971 konflik antara partai yang membawakan aspirasi Islam tersebut dengan pihak pemerintah berkelanjutan karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Yang berkaitan dengan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri No. 12 yang merupakan suatu usaha untuk melakukan pengebirian terhadap partai-partai politik di Indonesia. *Kedua*, Lembaga Pemilihan Umum yang diketuai oleh Mendagri memangkas dalam jumlah yang sangat besar calon-calon yang diajukan oleh Partai Muslimin Indonesia, karena mereka merupakan mantan tokoh Masyumi yang sangat berpengaruh yang tentu saja akan sangat melemahkan partai pemerintah (Golkar) kalau mereka dibiarkan aktif dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Hubungan yang tidak serasi antara Islam dan negara sejak permulaan Orde Baru dapat terjadi karena beberapa hal: *Pertama*, Islam secara prinsipal sangat percaya dengan prinsip demokrasi, dan kalangan Islam percaya bahwa dalam rangka mewujudkan kepentingan Islam yang lebih baik maka perjuangannya haruslah dilaksanakan secara demokratik dan didasarkan oleh prinsip-prinsip kehidupan politik yang demokratik. *Kedua*, umat Islam dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia ini adalah

beragama Islam.

Dengan mekanisme penyelenggaraan negara yang demokratis maka Umat Islam dengan mudah memobilisasikan dukungan sehingga pada akhirnya menjadi suatu kekuatan politik yang sangat besar dan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan politik lebih mudah dilaksanakan. *Ketiga*, di kalangan Islam sendiri terdapat individu yang menafsirkan Islam secara harfiah/ketat, sehingga di dalam mengartikulasikan kepentingan seringkali diperlihatkan dengan nada dan ekspresi yang keras, hitam putih baik di dalam mengkritik pemerintah maupun kelompok lain sehingga memicu konflik-konflik yang primordialistik.

Di samping itu pemerintah menempuh kebijaksanaan yang secara spesifik mengundang konflik yang tak terhindarkan dengan Islam. Dalam hal ini dapat disebutkan dimulai dengan (1) Undang-undang Perkawinan, (2) masalah perjudian di Jakarta, (3) diberlakukannya kebatinan setingkat dengan agama yang disahkan melalui Sidang Umum MPR tahun 1988, (4) dihapuskannya liburan semasa bulan Ramadhan, (5) pelarangan memakai busana Muslim/berjilbab bagi siswi Sekolah Menengah di beberapa daerah, dan masalah SDSB.

Bagaimana dengan Islam sendiri? Gejala akomodasi dari kalangan Islam dapat dilihat dari pelbagai indikator perilaku politik yang sudah sangat umum dikenal masyarakat secara luas, yaitu:

1. Adalah sejumlah tokoh Islam yang pertama kali

memperlihatkan dukungan untuk memilih kembali Presiden Soeharto untuk masa jabatan periode 1993-1998.

2. Pada sekitar bulan Juni 1992 salah satu organisasi masa Islam yang terbesar, Muhammadiyah, datang menemui Presiden Suharto. Ketika ditanya oleh wartawan Pimpinan Muhammadiyah menyatakan mendukung terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk masa jabatan periode 1993-1998.
3. Puncak dari gerakan dukungan yang dilakukan oleh orang Islam kepada Presiden Soeharto adalah dengan diadakannya do'a politik untuk Kesehatan Presiden dan agar supaya pemilihan kembali Presiden Suharto berjalan dengan lancar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa saling akomodasi politik terjadi? Ada beberapa kemungkinan jawaban yang dapat diajukan, yaitu: pertama, pemerintah sudah menganggap bahwa Islam di Indonesia bukan lagi sebagai kekuatan yang dapat mengancam stabilitas politik nasional. Atau kemungkinan yang kedua adalah bahwa pemerintah melakukan akomodasi politik terhadap Islam dalam rangka usaha untuk mencari dukungan terhadap Islam; atau kemungkinan yang lainnya adalah dengan akomodasi politik maka akan mudah mengatur politik Islam di Indonesia.
4. Tentunya ada berbagai kemungkinan, telah terjadi pergeseran yang fundamental yang menyangkut persepsi tentang pertama, tujuan perpolitikan Islam dan yang kedua,

modus dalam berpolitik. Sementara itu, menyangkut tujuan perpolitikan Islam dapat dikatakan bahwa apa yang hendak diperjuangkan tidak lagi seperti generasi kepemimpinan pasca kemerdekaan yaitu terwujudnya Islam sebagai dasar negara, akan tetapi “bagaimana Islam memperoleh representasi yang wajar dan proporsional sesuai dengan besarnya potensi umat Islam.

Sistem kepartaian di Indonesia pada masa orde baru adalah multipartai dengan satu partai dominan yakni Golongan Karya (Golkar). Usaha penyederhanaan partai politik di era orde baru dikomunikasikan secara paksa dengan menfusikan partai politik ke dalam dua golongan yakni golongan nasionalis dan golongan agama.

Berlakunya sistem politik otoriter di masa Orde Baru secara langsung mempengaruhi dinamika komunikasi partai politik yang ada pada masa itu penguasa melakukan berbagai upaya non-demokratis agar partai politik yang bukan pendukung pemerintah tidak berkembang, bahkan menjadi bonsai. Di masa itu, muncul sistem kepartaian multi partai dengan satu partai dominan, yakni Golkar. Dalam konteks masa itu, komunikasi partai politik Islam dan Nasionalis berada dalam belenggu kekuasaan otoritarianisme rezim Presiden Suharto, yang dengan watak otoriternya selalu memenangkan dan menguntungkan partai Golkar sebagai partai binaan dan pendukungnya

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, *Dari Negara ke Negara: Perubahan Paradigma dalam Ilmu Politik*. (Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FISIPOL UGM, 30 Juni 2001).
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*(Jakarta: Paramadina, 1998).
- Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, (Bandung: Mizan, 2000) ; Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, (Mizan, Jakarta, 1999),
- <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/17626>
Bandingkan dengan Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik* 42.
- M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Orde Baru*

- (Jakarta: Paramadina, 1995),
- Meriam Budiarjo, *Komunisme dan Istilah Demokrasi Dalam Terminologi Komunis*, (Jakarta; Gramedia, 1988).
- Miriam Budiarjo, *Demokrasi Indonesia Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta, Gramedia, 1996).
- Muhammad Najib dan K.S. Himmaty, *Amin Rais dari Yogya ke Binagraha* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Ramly Hutabarat; “Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997)”;
(Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, 2004).
- Umaid Radi, *Strategi PPP 1973-1982*, (Jakarta: Integrita Press, 1998).
- Valina Singka Subekti dalam Tim LIP FISIP UI, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1998).
- William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992),

